IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN DAN KEROHANIAN BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI RUTAN KELAS IIB SUNGAI PENUH

TESIS

Oleh: RICKO DARUSIAN
NIM. 220024028

PROGRAM MAGISTER

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

KERINCI TAHUN 2026

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN DAN KEROHANIAN BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI RUTAN KELAS IIB SUNGAI PENUH

TESIS

Digunakan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Megister Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh:

RICKO DARUSIAN

NIM. 220024028

PROGRAM MAGISTER

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

KERINCI TAHUN 2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RICKO DARUSIAN

NIM : 220024028

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul **"Implementasi Program Pembinaan Keagamaan Dan Kerohanian Bagi Narapidana Residivis Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh"** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan sumber nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sungai Penuh, 08 Mei 2026

Saya yang menyatakan



RICKO DARUSIAN

NIM. 220024028

Dipindai dengan CamScanner

i

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis dengan judul **IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN DAN KEROHANIAN BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI RUTAN KELAS IIB SUNGAI PENUH** yang ditulis oleh RICKO DARUSIAN, Nim: 220024028 telah diperbaiki dan memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian Seminar Hasil pada program Pascasarjana IAIN Kerinci.

Sungai Penuh, 08 Mei 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag	**Dr. Widiya Yul, M.PdI**
NIP. 196008041993031003	NIP. 199001022019032010

Dipindai dengan CamScanner

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah dilakukan proses bimbingan terhadap tesis :

Nama	:	Ricko Darusian
NIM	:	220024028
Judul Tesis	:	IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN DAN KEROHANIAN BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI RUTAN KELAS IIB SUNGAI PENUH

Maka tesis mahasiswa dengan judul tersebut di atas dinyatakan layak untuk diajukan ke Sidang Munaqasah

Sungai Penuh, 08 Mei 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag	**Dr. Widiya Yul, M.PdI**
NIP. 196008041993031003	NIP. 199001022019032010

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan persetujuan Komisi Pembahas/Penguji telah disahkan Tesis atas nama :

Nama	:	Ricko Darusian
NIM	:	220024028
Judul Tesis	:	IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN DAN KEROHANIAN BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI RUTAN KELAS IIB SUNGAI PENUH

Melalui ujian Munaqasah pada hari 02 Juni 2026

Direktur Program Pascasarjana	a.n Ketua Prodi HKI
Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI	**Dr. Widiya Yul, M.PdI**
NIP. 19670710 199401 2 001	NIP. 19900102 20190 3 200

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama	:	Ricko Darusian
NIM	:	220024028
Judul Tesis	:	IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN DAN KEROHANIAN BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI RUTAN KELAS IIB SUNGAI PENUH

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag (Pembimbing I)		
Dr. Widiya Yul, M.PdI (Pembimbing II)		

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Hj. Visnarni, M.PdI
NIP. 19670710 199401 2 001

a.n Ketua Prodi HKI

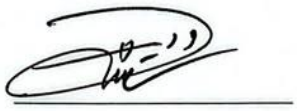
Dr. Widiya Yul, M.PdI
NIP. 19900102 20190 3 200

Dipindai dengan CamScanner

v

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

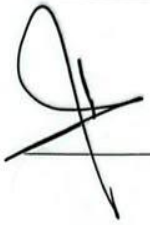
Nama	:	**Ricko Darusian**
NIM	:	**220024028**
Judul Tesis	:	**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN DAN KEROHANIAN BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI RUTAN KELAS IIB SUNGAI PENUH**

Komisi Penguji	**Tanda Tangan**
Dr. Hasep Saputra, M.A .. **Ketua Penguji**	
Dr. Faizin, M.Ag **Penguji**	
Dr. Suriyadi, S.Ag, S.S, M.Ag **Penguji**	
Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag **Penguji**	
Dr. Widiya Yul, M.PdI **Penguji**	

Dipindai dengan CamScanner

vi

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI
UJIAN TESIS MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Hasep Saputra, M.A	
2.	Dr. Faizin, M.Ag **Penguji**	
3.	Dr. Suriyadi, S.Ag, S.S, M.Ag **Penguji**	
4.	Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag **Penguji**	
5.	Dr. Widiya Yul, M.PdI **Penguji**	

Mahasiswa :

Nama	:	RICKO DARUSIAN
NIM	:	220024028
Tanggal Ujian	:	02 Juni 2026

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis ini dengan judul IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN DAN KEROHANIAN BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI RUTAN KELAS IIB SUNGAI PENUH yang ditulis oleh RICKO DARUSIAN, Nim: 220024028 ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang tim penguji pada tanggal 02 Juni 2026.

Tim Penguji	Tanda Tangan
Dr. Hasep Saputra, M.A **Ketua Penguji**	
Dr. Faizin, M.Ag **Penguji**	
Dr. Suriyadi, S.Ag, S.S, M.A **Penguji**	
Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag **Penguji**	
Dr. Widiya Yul, M.PdI **Penguji**	

Mengetahui
Direktur PPs,

KEMENTERIAN AGAMA PROGRAM PASCASARJANA IAIN KERINCI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

Prof. Dr. Hj. Wisnarni
NIP. 19670710 199401 2 001

Dipindai dengan CamScanner

viii

PERSEMBAHAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Dengan segenap syukur dan kerendahan hati,
karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

Sang Maha Pengasih, Allah SWT, yang senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan kesempatan sehingga penulis mampu melewati setiap proses, ujian, dan keterbatasan dalam menyelesaikan karya ini. Tiada daya dan upaya selain atas pertolongan-Nya.

Kedua orang tua tercinta Bapak M. Darus (Alm) dan ibu Dahliana, yang tidak pernah berhenti memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan dalam setiap langkah kehidupan penulis. Semoga segala jerih payah dan cinta yang telah diberikan menjadi amal kebaikan di sisi Allah SWT.

Ungkapan terima kasih yang tak terhingga untuk istri tercinta Feni Afrianti, anak yang Sholeh serta berbakti Muhammad Daanish Darusian dan Muhammad Taqiyyan Kaief Daarusian, yang telah memeberikan kasih sayang, dan dukungan yang senantiasa mengiringi penulis hingga terselesaikannya tesis ini.

MOTTO

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"Katakanlah (Muhammad), 'Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'" (QS. Az-Zumar: 53)

ABSTRAK

RICKO DARUSIAN. 2026. " IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN DAN KEROHANIAN BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI RUTAN KELAS IIB SUNGAI PENUH ". Thesis. Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka residivisme di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh meskipun program pembinaan keagamaan telah diimplementasikan secara rutin. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kesalehan ritual narapidana dengan kualitas reintegrasi sosial pasca-bebas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembinaan keagamaan dari perspektif Hukum Keluarga Islam, serta merumuskan model pembinaan yang mampu memutus siklus residivisme.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap narapidana residivis, keluarga warga binaan, petugas pemasyarakatan, dan tokoh masyarakat di Sungai Penuh. Analisis data dilakukan secara integratif menggunakan teori *Maqashid Syariah* (khususnya *Hifdz Al-Nasl*), *Social Control Theory* dari Travis Hirschi, dan *Labeling Theory* dari Howard S. Becker.

Penelitian ini menemukan bahwa program pembinaan keagamaan dan kerohanian bagi narapidana residivis di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh masih bersifat ritualistik dan administratif sehingga belum mampu menyentuh akar persoalan residivisme yang berkaitan dengan stigma sosial, trauma psikologis, serta rusaknya hubungan keluarga. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, terputusnya perlindungan keluarga akibat pemenjaraan berulang menjadi faktor utama yang mendorong narapidana kembali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pelembagaan mediasi perdamaian (ishlah) berbasis Hukum Keluarga Islam ke dalam kurikulum pembinaan kerohanian sebagai instrumen strategis pencegahan residivisme melalui pemulihan hubungan keluarga, penguatan dukungan emosional, dan reintegrasi sosial narapidana setelah bebas.

Kata Kunci: Kerohanian, Rekonsiliasi, Narapidana Residivis

ABSTRACT

RICKO DARUSIAN. 2026. "IMPLEMENTATION OF RELIGIOUS AND SPIRITUAL GUIDANCE PROGRAMS FOR RECIDIVIST INMATES FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC FAMILY LAW AT THE CLASS IIB SUNGAI PENUH DETENTION CENTER". Thesis. Post Graduate Program of State IslamicInstitute (IAIN) Kerinci.

This research is motivated by high recidivism rates at the Class IIB Sungai Penuh Detention Center despite the regular implementation of religious guidance programs. This phenomenon indicates a gap between inmates' ritual piety and the quality of their social reintegration after release. This study aims to analyze the effectiveness of religious guidance from the perspectives of Islamic Family Law and Criminology, and to formulate a guidance model capable of breaking the cycle of recidivism.

The research method used is qualitative with a juridical-empirical approach. Data were collected through in-depth interviews with recidivist inmates, inmates' families, correctional officers, and community leaders in Sungai Penuh. Data analysis was carried out integratively using the theory of Maqashid Shariah (specifically Hifdz Al-Nasl), Travis Hirschi's Social Control Theory, and Howard S. Becker's Labeling Theory.

This study found that the religious and spiritual development program for recidivist inmates at the Sungai Penuh Class IIB Detention Center remains ritualistic and administrative in nature, thus failing to address the root causes of recidivism, which include social stigma, psychological trauma, and damaged family relationships. From an Islamic Family Law perspective, the disruption of family protection due to repeated imprisonment is a major factor driving inmates to re-offend. Therefore, this study proposes the institutionalization of Islamic Family Law-based peace mediation (ishlah) within the spiritual development curriculum as a strategic instrument for preventing recidivism through restoring family relationships, strengthening emotional support, and social reintegration of inmates upon release.

Keywords: *Spirituality, Reconciliation, Islah, Recidivist Inmates*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal penelitian dengan judul *"Implementasi Program Pembinaan Keagamaan Dan Kerohanian Bagi Narapidana Residivis Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh"*. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik dalam rangka menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip Taubat Restoratif (*Al-Haqqul Adami*) dan Rekonsiliasi Keluarga (*Islah*) dalam kebijakan pembinaan narapidana, dengan harapan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi hukum Islam sekaligus kontribusi praktis dalam perbaikan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah memberikan kontribusinya. Untuk itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Rektor beserta Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah menyediakan berbagai fasilitas (sarana-prasarana) untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan di IAIN Kerinci.
2. Direktur, Wakil Direktur Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Ketua Program Studi, Sekretaris Strata Dua (S2) Magister Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang memberikan pengajaran dalam pelaksanaan perkuliahan di IAIN Kerinci.
3. Bapak/Ibu Prof, Dr. H. Azhar, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak/Ibu Dr. Widiya Yul M.Pdi. selaku Pembimbing II, yang telah membimbing dalam pembuatan tesis, serta Bapak/Ibu Tim Penguji/Narasumber yang

telah memberikan pembimbingan dalam rangka penyusunan tesis ini

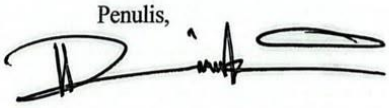
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Pascasarjana pengajaran dalam pelaksanaan perkuliahan di IAIN Kerinci.
5. Kepada pimpinan Rutan Kelas IIB Sungai Penuh, Bapak Sahat Parsaulian Sihombing, Amd.P, S.H., M.H.
6. Rekan-rekan seperjuangan di Program Pascasarjana IAIN Kerinci, atas semangat, kerja sama, dan dukungan moral yang menjadi penyemangat dalam menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini.

Teristimewa buat kedua orang tua: Ayah dan Ibu, istri dan anak, dan seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam karya ini tentunya terdapat beberapa kelemahan dalam penelitian ini Selain itu, penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan penerpan pembinaan WBP pada Rutan kelas IIB Sungai Penuh Aamiin yaa Rabbal'alamiin.

Sungai Penuh, 08 Mei 2026

Penulis,



RICKO DARUSIAN

NIM. 220024028

Dipindai dengan CamScanner

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/Y/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan :

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	**Huruf Kecil**
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
م	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	'	'

ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoflong) dan vokal rangkap (diflong).

a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
اَ	Fathah	A	من
اِ	Kasrah	I	من
اُ	Dhammah	U	رفع

b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf,

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ني	Fathah dan ya	Ai	كيف
تو	Fathah dan waw	Au	حول

3. Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda),

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ماا مى	Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya	A/a	مات رمى	Mata/ Rama
مي	Kasrah dan ya	8/1	قيل	Qila
نؤ	Dhammah dan waw	U/u	يموت	Yamutu

4. Ta Marbuthah

Transileterasi Ta Marbuthah dijelaskan sebagai berikut :

a. Ta Marbuthah hidup atau yang berharokat fathah : kasrah dan dhammah maka transileterasinya adalah huruf t;

b. Ta Marbuthah yang sukun (mati) maka transileterasinya adalah huruf h; Kata yang di akhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang al serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbuthah itu di transileterasikan dengan h.

روضة االظفال = *Raudhatul athfal*

المنورة المدينة = *Al-Madinah Al - Munawarah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditranseliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut, Misalnya :

ربنا = *Robbana*

البر = *Al - birr*

6. Kata sandang al

a. Diikuti oleh huruf as-syamsiyah, maka di transileterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

At-Tawwābu = التواب

Ar-Rajulu = الراجول

As-Sayyidu = السيد

As-Syamsu = الشمس

b. Diikuti oleh huruf al-Qamariyah, maka ditranseliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الجلال. = *Al-Jalal*

الكتاب. = *Al-Kitab*

البديع. = *Al-badi'u*

القمر. = *Al-Qomaru*

Catatan : kata sandang di tulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf as-syamsiyah maupun al-Qomariyah.

7. Hamzah

Hamzah di transliterasikan dengan apoatrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تا خذون. = *Ta 'khuzuna*

الشعداء. = *As-syuhada*

امرت. = *Umirtu*

فاتب يها. = *Fa' ti biha*

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca

(dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu di rangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
واوفواالكيل	*Wa aufu al-kaila*	*Wa auful-kaila*
ولله على الناسا	*Wa lillahi 'ala al-nas*	*Wa lillahi 'alannas*
يدرس في المدرسة	*Yadrusu fi al-madrasah*	*Yadrusu fil-madrasah*

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau nama tempat tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	من عرف نفشه	*Man 'arafa nafsahu*
Nama diri	ومامحمد الارسول	*Wa ma Muhammadun illa rasul*
Nama tempat	من المدينة المنورة	*Minal-Madinatil-rasul*
Nama bulan	الى شهر رمضان	*Ila syahri Ramadana*
Nama diri didahului al	رجع من المكة	*Zahaba as-Syafi' i*
Nama tempat didahului al	رجع من المكة	*Raja'a min al-Makkah*

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital,

contoh:

والله = *Wallah*

من الله = *Minallah*

في الله. = *Fillah*

لله. = *Lillah*

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... Error! Bookmark not defined.

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... Error! Bookmark not defined.

LEMBAR PENGESAHAN ..... Error! Bookmark not defined.

LEMBAR PERSETUJUAN AKHIR TESIS ..... Error! Bookmark not defined.

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI ..... Error! Bookmark not defined.

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI ..... Error! Bookmark not defined.

LEMBAR PENGESAHAN TESIS ..... Error! Bookmark not defined.

PERSEMBAHAN MOTTO ..... **iii**

ABSTRAK ..... **x**

ABSTRACT ..... **xi**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xiv**

BAB I **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 10

C. Fokus Masalah 12

D. Pertanyaan Penelitian 12

E. Tujuan Penelitian 13

F. Manfaat Penelitian 14

G. Definisi Operasional 15

BAB II **18**

KAJIAN PUSTAKA **18**

A. KAJIAN TEORI 18

B. KAJIAN PENELITIAN YANG RELEVAN 35

C. KERANGKA PIKIR TESIS 38

BAB III **41**

METODOLOGI PENELITIAN **41**

A. Jenis Penelitian 41

B. Tempat dan Waktu Penelitian 41

C. Subjek dan Informan Penelitian 43

D. Sumber Data 44

E. Instrumen Penelitian 45

F. Teknik Pengumpulan Data 46

G. Keabsahan Data 48

H. Teknik Analisis Data 49

BAB IV **52**

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52

A. Temuan Umum 52

B. Temuan Khusus 65

C. Pembahasan 79

BAB V **94**

SIMPULAN DAN SARAN **94**

A. Simpulan 94

1. Mekanisme dan Problematika Implementasi Program Pembinaan Keagamaan dan Kerohanian 94

2. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Faktor Penyebab Residivisme 94

3. Konstruksi Pelembagaan Ishlah sebagai Instrumen Pencegahan Residivisme 94

B. Implikasi.....95

C. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA.....97

LAMPIRAN 99

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tahapan Penelitian 42
Tabel 1. Tahapan Penelitian 42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Alur..... 39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara 99
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian..... 103

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan peradaban, sosiologi hukum, dan hak asasi manusia, paradigma retributif yang bertumpu pada "penjara sebagai instrumen penderitaan eksklusif" mulai mengalami dekonstruksi. Pemberian rasa sakit secara institusional terbukti tidak memiliki korelasi linier dengan penurunan angka kejahatan. Sebaliknya, institusi pemenjaraan konvensional kerap kali bertransformasi menjadi "sekolah kejahatan" (*school of crime*) yang melahirkan residivis. Menyadari kebuntuan tersebut, hukum pidana modern di Indonesia bergerak secara progresif menuju paradigma *Restorative Justice* (keadilan restoratif) dan *Rehabilitative Justice* (keadilan rehabilitatif). Keadilan restoratif menggeser titik tekan hukum pidana dari sekadar menghukum pelaku demi kepuasan negara, menjadi upaya pemulihan kerugian korban, pelaku, dan masyarakat (Arief, 2018: 112). Sementara itu, keadilan rehabilitatif berfokus pada intervensi dan perbaikan mental, moral, serta keterampilan sosial pelanggar hukum agar pemicu kriminogenik di dalam dirinya dapat direduksi secara permanen.

Di Indonesia, pergeseran paradigma filosofis ini secara monumental ditandai dengan dicetuskannya sistem "Pemasyarakatan" yang menggantikan sistem "Kepengurusan" warisan kolonial. Barda Nawawi Arief (2014: 78), salah satu pakar hukum pidana terkemuka, menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya merupakan sub-sistem dari kebijakan sosial (*social policy*). Oleh karena itu, tujuan pemidanaan tidak boleh dilepaskan dari tujuan akhir kebijakan sosial, yaitu perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Menurut Arief, perampasan kemerdekaan melalui pidana penjara hanyalah sarana fungsional sementara, bukan tujuan akhir pemidanaan.

Senada dengan hal tersebut, Romli Atmasasmita (2011: 92) dalam analisisnya mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu, mengkritik tajam praktik isolasi narapidana yang memutus akar sosial mereka secara absolut. Atmasasmita mengemukakan bahwa esensi utama dan fundamental dari

sistem pemasyarakatan adalah "reintegrasi sosial". Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan (Rutan) harus difungsikan sebagai institusi klinis dan edukatif, bukan sekadar gudang penyimpanan manusia (*human warehousing*). Proses reintegrasi sosial ini mensyaratkan adanya asimilasi nilai-nilai kebaikan yang dilakukan secara sistematis, di mana narapidana dididik ulang (*re-education*) agar menyadari kesalahannya, memperbaiki kualitas diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga pada akhirnya ia memiliki kelayakan moral untuk diterima kembali oleh lingkungan masyarakatnya.

Apabila hukum positif memandang rehabilitasi narapidana dari sudut pandang sosiologis dan psikologis-sekuler, maka Hukum Islam menawarkan basis ontologis yang jauh lebih transendental melalui konsep *Maqashid Syariah* (Tujuan-tujuan Syariat). Terdapat miskonsepsi akademis yang sering kali mereduksi hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) hanya pada dimensi hukuman fisik yang keras (*qisas* dan *hudud*). Padahal, dalam ranah *ta'zir* (hukuman yang jenis dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* atau pemerintah), roh utama dari penjatuhan sanksi adalah *ta'dib* (edukasi karakter) dan *ar-rad'u* (pencegahan) (Audah, 2015: 134).

Abu Ishaq Al-Shatibi, arsitek utama teori *Maqashid Syariah*, merumuskan bahwa syariat diturunkan murni untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan menolak kerusakan (*daf'u al-mafsadah*). Hal ini diklasifikasikan ke dalam lima perlindungan esensial (*Al-Kulliyyat Al-Khams*). Dalam konteks implementasi pembinaan narapidana di Rutan, dua pilar utama yang sangat relevan adalah pemeliharaan jiwa (*Hifdz Al-Nafs*) dan pemeliharaan akal (*Hifdz Al-Aql*).

Pertama, perlindungan jiwa (*Hifdz Al-Nafs*) dalam fase pemidanaan tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai larangan membunuh fisik, melainkan pemeliharaan terhadap martabat, psikologis, dan hak hidup narapidana sebagai manusia seutuhnya (*karamah insaniyyah*). Memenjarakan seseorang secara fisik berpotensi mematikan "jiwa" sosial dan spiritualnya jika tidak diimbangi dengan asupan kerohanian (Hallaq, 2009: 88). *Kedua*, perlindungan akal (*Hifdz Al-Aql*). Tindak pidana umumnya terjadi akibat hilangnya kendali akal sehat yang dikuasai oleh hawa nafsu. Pembinaan

kerohanian di dalam Rutan sejatinya adalah upaya sistematis untuk melakukan restorasi fungsi akal (*Hifdz Al-Aql*), di mana narapidana didorong untuk kembali memfungsikan rasionalitas ilahiahnya dalam menimbang konsekuensi dari setiap perbuatan (Zahrah, 2011: 215).

Di sinilah letak titik singgungnya Rutan beserta seluruh instrumen pembinaannya tidak boleh sekadar diposisikan sebagai institusi administratif. Rutan harus difungsikan secara paripurna sebagai "institusi pertaubatan" (*institutionalization of taubat*). Program pembinaan keagamaan tidak boleh hanya diukur dari dimensi vertikal (ketaatan ritual narapidana di dalam sel), tetapi harus mampu menjadi medium *ishlah* yang mereintegrasikan narapidana dengan masyarakatnya. Pemahaman komprehensif atas persinggungan antara asas reintegrasi sosial dalam hukum pidana dan pelembagaan taubat dalam hukum Islam inilah yang menjadi pijakan teoretis paling mendasar dalam penelitian ini.

Dalam tinjauan sosiologi hukum dan kriminologi, bekerjanya sistem pemidanaan tidak terjadi di ruang hampa, melainkan bersinggungan langsung dengan realitas struktur sosial masyarakat. Salah satu tolok ukur paling objektif untuk menguji keberhasilan sistem peradilan pidana khususnya sistem pemasyarakatan adalah angka pengulangan tindak pidana atau residivisme. Secara akademik dan yuridis, residivisme didefinisikan sebagai pengulangan tindak pidana oleh subjek hukum yang sama, yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) dan telah menjalani masa pidananya (Sahetapy, 2013: 56).

Fenomena residivisme bukan sekadar persoalan teknis pelanggaran hukum positif, melainkan sebuah manifestasi sosiologis dari kegagalan sistemik dalam proses reintegrasi dan asimilasi sosial. Menurut Soerjono Soekanto (2014: 112), asimilasi hukum dalam konteks pemasyarakatan baru dapat dikatakan berhasil apabila seorang pelanggar hukum mampu menginternalisasi kembali nilai dan norma masyarakat yang sah, sehingga ia dapat diterima dan berfungsi secara wajar. Ketika seorang mantan narapidana kembali melakukan kejahatan, hal ini menjadi indikator kritis bahwa proses "pengobatan" sosial di dalam lembaga pemasyarakatan tidak menyentuh akar

penyakit kriminogeniknya. Institusi penahanan pada akhirnya hanya berhasil menjalankan fungsi penjeraan fisik secara preskriptif, namun gagal merekonstruksi kesadaran moral dan memulihkan ikatan sosial narapidana dengan lingkungan di luar tembok institusi (Arief, 2018: 120).

Teori Pelabelan dan Resistensi Pembinaan Membedah anatomi kejahatan residivis mengharuskan peneliti untuk menyelami dinamika psikososial yang bergejolak di dalam diri "narapidana berulang". Berbeda dengan *first-time offenders* (pelanggar hukum pemula) yang umumnya masih memiliki rasa penyesalan, ketakutan, dan *shock culture* saat pertama kali masuk penjara, narapidana residivis memiliki arsitektur psikologis yang jauh lebih keras dan kompleks. Mereka umumnya telah terjangkit apa yang oleh Donald Clemmer disebut sebagai *prisonization* (prisionisasi), yakni proses asimilasi keliru di mana narapidana justru mengadopsi sub-kultur, tata nilai, dan mekanisme kejahatan dari sesama penghuni penjara, alih-alih menyerap nilai pembinaan (Clemmer, 2011: 89).

Kondisi psikologis narapidana residivis ini sangat dipengaruhi oleh proses keterasingan sosial (*social alienation*) yang mereka alami pasca-pembebasan pertama. Dinamika ini sangat relevan dengan *Labeling Theory* (Teori Pelabelan) yang dikemukakan oleh Howard S. Becker. Becker (2015: 34) menegaskan bahwa penyimpangan (*deviance*) bukanlah semata-mata kualitas dari tindakan pelaku, melainkan konsekuensi dari penerapan aturan, sanksi, dan stigma oleh orang lain terhadap sang "pelanggar". Ketika seseorang bebas dari masa penahanannya, masyarakat secara hegemonik menyematkan label "mantan narapidana", "penjahat", atau "residivis". Stigmatisasi yang brutal ini menutup akses mereka terhadap struktur sosial yang sah—baik berupa penolakan di dunia kerja, hancurnya reputasi komunal, hingga pengucilan oleh keluarga inti.

Akibat dari penolakan ganda tersebut, mantan narapidana terdorong untuk melakukan penyimpangan sekunder (*secondary deviance*) sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri (*defense mechanism*) demi bertahan hidup di tengah masyarakat yang memusuhinya (Akers, 2017: 142). Ketika mereka akhirnya kembali tertangkap dan masuk kembali ke dalam Rumah Tahanan

Negara, *defense mechanism* ini bermanifestasi menjadi wujud resistensi dan sinisme yang sangat tinggi terhadap seluruh program pembinaan formal. Bagi seorang residivis, program pembinaan keagamaan atau kerohanian konvensional yang diselenggarakan oleh petugas sering kali dipandang secara skeptis; hanya dianggap sebagai rutinitas administratif untuk memenuhi instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) demi mendapatkan Hak Remisi, dan bukan sebagai sarana pencerahan spiritual yang sejati (Zaidan, 2019: 77).

Berdasarkan akumulasi data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia dalam lima tahun terakhir, persentase angka residivisme secara nasional secara persisten berada pada fluktuasi yang mengkhawatirkan, yakni pada kisaran 15% hingga 18% dari total populasi Warga Binaan Pemasyarakatan secara nasional (Ditjenpas, 2025: 12). Angka statistik ini pada hakikatnya merupakan fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*), di mana tingkat pengulangan tindak pidana diyakini jauh lebih tinggi apabila turut mengakumulasi kasus-kasus yang tidak bermuara pada putusan peradilan (*dark number of crime*).

Akumulasi dari krisis finansial, hancurnya reputasi sosial (*social stigma*), dan kelelahan emosional inilah yang mendorong pihak keluarga mengalami alienasi, yang berujung pada keputusan untuk memutus hubungan dengan narapidana. Disfungsi keluarga yang ekstrem ini melahirkan konsekuensi fatal saat narapidana menyelesaikan masa pidananya. Mereka keluar dari gerbang penjara dalam keadaan kehilangan *support system*. Narapidana yang ditolak oleh keluarganya akan mengalami alienasi ganda (*double alienation*): dibuang oleh masyarakat luas dan tidak diakui oleh keluarga intinya (Anwar, 2016: 210). Dalam kondisi tunawisma secara sosial dan psikologis inilah, mantan narapidana pada akhirnya mencari perlindungan pada satu-satunya ekosistem yang bersedia menerima mereka: sindikat kejahatan dan sub-kultur kriminal masa lalunya. Hal inilah yang menjadi rasionalisasi sosiologis mengapa narapidana residivis terus bermunculan.

Keberhasilan bimbingan kerohanian kerap kali direduksi pada parameter kuantitatif dan kepatuhan ritual: seberapa sering narapidana mengikuti pengajian, kemampuan membaca Al-Qur'an, serta kedisiplinan melaksanakan salat fardu (ibadah *mahdhah*). Meskipun ibadah vertikal (*Habluminallah*) adalah elemen krusial dalam pertobatan individu, pendekatan asimetris ini sangat tidak memadai bagi narapidana residivis. Bagi seorang residivis, luka spiritual dan psikologis terdalamnya bukanlah semata-mata ketidaktahuan akan hukum syariat, melainkan rusaknya *Hablum Minannas* (hubungan antarmanusia), khususnya dengan keluarga inti. Tesis ini mengajukan argumen bahwa untuk mencapai sebuah *Taubat Restoratif*, pertobatan batin (*an-nadam*) harus diiringi dengan resolusi konflik secara horizontal. Di titik inilah konsep Ishlah (rekonsiliasi/perdamaian) dalam Hukum Keluarga Islam ditawarkan sebagai pisau analisis dan solusi metodologis (Mubarok, 2019: 77).

Terminologi *ishlah* di dalam Al-Qur'an secara spesifik sering kali disandingkan dengan urgensi penyelesaian sengketa dan keretakan internal keluarga (sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa: 128)[^4]. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, program pembinaan kerohanian di Rutan tidak boleh lagi memosisikan narapidana dalam ruang hampa sosiologis, melainkan harus bertransformasi menjadi "Jembatan Ishlah" yang merajut kembali komunikasi antara narapidana dan keluarganya di luar tembok tahanan.

Artinya, institusi Rutan dan para fungsional Pembimbing Kemasyarakatan serta pembimbing kerohanian tidak cukup hanya bertindak sebagai penceramah (*mubaligh*), melainkan harus mengemban peran sebagai *Hakam* (mediator hukum dan moral). Kurikulum pembinaan keagamaan harus mengintegrasikan mekanisme *Family Counseling* yang berbasis nilai-nilai Islam. Keluarga narapidana harus dilibatkan dalam sesi-sesi bimbingan kerohanian tertentu untuk diedukasi mengenai esensi pemaafan, pemulihan hubungan (*reunifikasi*), dan penyiapan mental menyambut kembalinya mantan narapidana ke tengah keluarga.

Dalam tataran implementasi birokratis, mandat undang-undang pemasyarakatan tersebut ditransmisikan ke dalam berbagai peraturan pelaksana dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterbitkan oleh Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas). Salah satu instrumen operasional revolusioner yang menjadi tulang punggung evaluasi pembinaan saat ini adalah penerapan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), yang secara teknis diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021.

SPPN didesain sebagai instrumen ukur yang objektif, terukur, dan berbasis teknologi informasi pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) untuk menilai tingkat perubahan perilaku Warga Binaan. Melalui instrumen ini, pemenuhan hak-hak integrasi narapidana—seperti Remisi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Asimilasi—tidak lagi sekadar didasarkan pada perhitungan matematis masa pidana dan rekomendasi subjektif petugas, melainkan bergantung penuh pada nilai akumulatif kepatuhan narapidana terhadap program pembinaan (Ditjenpas, 2021: 15)[^2].

Dalam parameter SPPN dan SOP bimbingan kerohanian yang berlaku saat ini, indikator keberhasilan bersifat sangat individualistik dan berpusat pada ketaatan ritual di dalam Rutan. Narapidana akan dinilai "Baik" dan layak mendapatkan remisi asalkan ia rajin duduk di saf depan masjid Rutan. Tidak ada satu pun klausul regulasi, baik dalam Permenkumham maupun Kepdirjenpas, yang mewajibkan otoritas Rutan untuk memfasilitasi, mengukur, dan menilai keberhasilan *ishlah* (rekonsiliasi psikososial) antara narapidana residivis dengan keluarganya sebagai syarat kelulusan pembinaan.

Absennya instrumen *ishlah* keluarga dalam regulasi pembinaan kepribadian ini menyebabkan Rutan hanya difungsikan sebagai "pabrik kesalehan individual" di ruang tertutup, namun secara legal abai dalam merekonstruksi "kesalehan sosial" yang justru menjadi jangkar utama pencegah residivisme. Kekosongan hukum operasional (*vacuum of norm*) inilah yang menyebabkan intervensi pemasyarakatan terhadap narapidana

residivis sering kali menjadi siklus repetitif yang sia-sia. Oleh karenanya, tesis ini mendalilkan urgensi pembaruan kebijakan klinis yang mengintegrasikan mediasi keluarga (*family counseling* berbasis *ishlah*) ke dalam standar operasional pembinaan kerohanian khusus residivis.

Karakteristik Sosiokultural Masyarakat Sungai Penuh Analisis terhadap implementasi kebijakan pemasyarakatan tidak dapat dipisahkan dari ekologi sosial di mana institusi tersebut beroperasi. Kota Sungai Penuh, yang secara historis dan kultural merupakan jantung dari wilayah "Bumi Sakti Alam Kerinci", memiliki karakteristik masyarakat yang sangat religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Sosiokultural masyarakat setempat berpijak pada filosofi *"Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah"*. Filosofi ini bukan sekadar jargon, melainkan landasan ontologis yang menempatkan hukum Islam sebagai ruh dari seluruh tata aturan adat dan interaksi sosial (Zainuddin, 2018: 45).

Fenomena Residivisme di Tengah Masyarakat Religius Muncul sebuah paradoks empiris yang sangat tajam di wilayah hukum Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jambi, khususnya di wilayah koordinasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rutan Kelas IIB Sungai Penuh. Di satu sisi, Kanwil Ditjenpas Jambi secara progresif terus meluncurkan berbagai inovasi dalam program asimilasi dan integrasi sosial untuk mendukung keadilan restoratif. Di sisi lain, Rutan Kelas IIB Sungai Penuh secara faktual masih terus menerima narapidana residivis individu yang kembali melakukan tindak pidana meskipun mereka berasal dari atau tinggal di lingkungan masyarakat yang sangat kental dengan nilai-nilai agama dan adat.

Kondisi Pembinaan Kerohanian Saat Ini Berdasarkan observasi pra-penelitian dan data awal di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh, pelaksanaan pembinaan keagamaan dan kerohanian saat ini masih terjebak pada format yang bersifat konvensional dan administratif. Program yang berjalan umumnya meliputi kegiatan rutin seperti pengajian umum, bimbingan baca tulis Al-Qur'an, dan pelaksanaan ibadah wajib secara berjamaah yang dipandu oleh petugas atau penyuluh agama dari Kementerian Agama setempat.

Fakta spesifik yang ditemukan di lapangan menunjukkan beberapa kelemahan dalam penanganan residivis:

- Ketiadaan Diferensiasi Program: Belum terdapat pemisahan atau spesialisasi modul pembinaan kerohanian antara narapidana pemula dengan narapidana residivis. Residivis sering kali hanya mengikuti pengulangan materi yang sama, sehingga tidak menyentuh akar trauma psikologis atau konflik batin yang menyebabkan mereka mengulangi kejahatan.
- Pendekatan Individual-Ritualistik: Pembinaan lebih ditekankan pada aspek ritual pribadi (kesalehan individu) namun mengabaikan aspek kesalehan sosial. Belum terlihat adanya program sistematis yang menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam untuk memediasi atau menghubungkan narapidana residivis dengan keluarganya sebagai bagian dari proses pembinaan.
- Resistensi Residivis: Terdapat kecenderungan residivis bersikap apatis terhadap pembinaan kerohanian formal karena merasa "jalan pulang" mereka menuju keluarga dan masyarakat sudah tertutup oleh stigma.

Kondisi ini menegaskan bahwa pihak Rutan Kelas IIB Sungai Penuh saat ini lebih banyak berperan sebagai fasilitator ibadah, namun belum bertransformasi menjadi mediator *ishlah*. Tanpa adanya intervensi pembinaan yang berbasis pada pemulihan hubungan keluarga (perspektif *Ahwal Al-Syakhshiyyah*), program kerohanian bagi residivis di Rutan Sungai Penuh hanya akan menjadi rutinitas tanpa transformasi perilaku yang substansial.

Selama ini, narapidana residivis sering kali hanya diposisikan sebagai "angka kegagalan" dalam statistik pemasyarakatan, padahal secara sosiologis dan psikologis, mereka adalah subjek klinis yang menuntut diagnosis spiritual yang sama sekali berbeda dari narapidana pemula. Tesis ini hadir untuk mengisi kekosongan dari penelitian ini terletak pada upaya mendekonstruksi dan merekonstruksi paradigma pembinaan kerohanian: dari yang awalnya bersifat "instruksional-individualistik" (hanya menyuruh narapidana salat/mengaji) menjadi "mediasi-kolektif" yang berbasis pada *family*

counseling. Dengan memosisikan otoritas Rutan sebagai *Hakam* (fasilitator perdamaian) yang menjembatani upaya rekonsiliasi (*ishlah*) antara residivis dengan keluarganya, penelitian ini menawarkan arsitektur keadilan restoratif yang bersendi teguh pada syariat Islam (Mubarok, 2019: 80)[^2].

Sebagaimana telah diuraikan pada bangunan argumentasi sebelumnya, pergeseran paradigma pemidanaan menuju pelindungan hak asasi (*Landasan Filosofis*) pada kenyataannya masih dibayangi oleh tingginya angka pengulangan tindak pidana akibat keterasingan sosial (*Landasan Sosiologis*). Akar dari keterasingan yang melahirkan residivis ini bermuara pada hancurnya *support system* keluarga akibat pemidanaan. Sayangnya, infrastruktur hukum positif dan kebijakan teknis penilaian narapidana saat ini (seperti instrumen SPPN) masih memiliki ruang kosong, karena belum mengakomodasi instrumen *ishlah* keluarga dalam modul kurikulum bimbingan kepribadian khusus bagi residivis (*Landasan Yuridis*). Ironi ini semakin nyata ketika dikontekstualisasikan pada Rutan Kelas IIB Sungai Penuh, di mana kuatnya nilai religiusitas dan filosofi adat masyarakat setempat nyatanya belum mampu bertransformasi menjadi benteng sosial yang secara otomatis memutus rantai residivisme (*Kontekstualisasi Lokal*).

Berdasarkan konvergensi antara urgensi teoretis mengenai pergeseran keadilan, urgensi sosiologis mengenai krisis *Hifdz Al-Nasl* pada struktur keluarga narapidana, serta urgensi empiris terkait kekosongan regulasi dan dinamika lokal di wilayah Kanwil Ditjenpas Jambi, maka peneliti memandang sangat krusial dan mendesak untuk melakukan penelitian secara mendalam, komprehensif, dan analitis dengan judul: "IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN DAN KEROHANIAN BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI RUTAN KELAS IIB SUNGAI PENUH"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Paradoks Sosiokultural dan Residivisme: di mana tingginya nilai

religiusitas dan kepatuhan pada hukum adat di lingkungan masyarakat Sungai Penuh justru melahirkan stigma sosial yang sangat keras bagi mantan narapidana, yang pada akhirnya menutup ruang reintegrasi sosial dan memicu tingginya angka pengulangan tindak pidana (residivisme).

2. Kekosongan Diferensiasi Regulasi (Kesenjangan Kebijakan): Terdapat kelemahan dalam instrumen kebijakan pemasyarakatan saat ini (termasuk penerapan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana/SPPN) yang menerapkan standar ganda atau pendekatan seragam (*one-size-fits-all*), yakni tidak adanya diferensiasi modul pembinaan kerohanian antara narapidana pemula dengan narapidana residivis yang memiliki tingkat resistensi psikologis lebih kompleks.
3. Pendekatan Pembinaan yang Asimetris (Individual-Ritualistik): Pelaksanaan program pembinaan keagamaan di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh masih bersifat instruksional dan sangat individualistik, yakni hanya berfokus pada pencapaian kesalehan ritual narapidana di dalam sel (seperti rutinitas salat dan mengaji), namun mengabaikan pemulihan kesalehan sosial narapidana dengan lingkungan di luar tembok penjara.
4. Disrupsi *Hifdz Al-Nasl* dan Hilangnya *Support System*: Terabaikannya dimensi perlindungan keluarga (*Hifdz Al-Nasl*) dalam proses pemidanaan, yang mengakibatkan narapidana residivis mengalami alienasi, hancurnya struktur keluarga, dan kehilangan *support system* moral saat mereka bebas, sehingga mereka terdorong kembali ke dalam sub-kultur kejahatan masa lalunya.
5. Absennya Pelembagaan *Ishlah* dalam Kurikulum Rutan: Belum adanya integrasi konsep rekonsiliasi berbasis Hukum Keluarga Islam (*ishlah*) dalam SOP pembinaan kerohanian, di mana Rutan Kelas IIB Sungai Penuh belum memosisikan diri sebagai *Hakam* (mediator) yang memfasilitasi *family counseling* untuk memulihkan hubungan yang retak antara narapidana residivis dengan keluarganya.

C. Fokus Masalah

Mengingat luasnya spektrum permasalahan yang telah dipetakan pada bagian identifikasi masalah—yang mencakup anomali sosiokultural, kelemahan regulasi positif, hingga dinamika psikososial narapidana—serta demi menjaga kedalaman analisis (*in-depth analysis*) dan keterarahan argumen akademik, maka peneliti memandang perlu untuk menetapkan pembatasan ruang lingkup penelitian.

Penelitian ini secara eksklusif difokuskan pada evaluasi implementasi program pembinaan keagamaan dan kerohanian khusus bagi subjek narapidana residivis di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sungai Penuh. Untuk menghindari tumpang tindih dengan penelitian kriminologi murni, permasalahan tersebut akan dibedah secara spesifik menggunakan pisau analisis Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyyah*), yang dititikberatkan pada dua dimensi utama:

1. Evaluasi terhadap ada atau tidaknya upaya pelindungan dan pemulihan ikatan keluarga narapidana residivis (*Hifdz Al-Nasl*) dalam kurikulum pembinaan di Rutan.
2. Analisis terhadap urgensi pelembagaan mediasi perdamaian (*Ishlah*) antara narapidana residivis dan keluarganya sebagai bagian integral dari program bimbingan kerohanian untuk mencegah pengulangan tindak pidana.

D. Pertanyaan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang, identifikasi, dan fokus masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan pertanyaan pokok yang akan dijawab dan dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk, mekanisme, dan problematika implementasi program pembinaan keagamaan dan kerohanian bagi narapidana residivis di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh saat ini?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyyah*) dalam memotret terputusnya perlindungan keluarga (*Hifdz Al-Nasl*)

sebagai faktor determinan penyebab terjadinya residivisme di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh?

3. Bagaimana konstruksi pelembagaan mediasi perdamaian (*Ishlah*) berbasis Hukum Keluarga Islam di dalam kurikulum pembinaan kerohanian sebagai instrumen strategis untuk mencegah residivisme di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, penelitian ini diselenggarakan dengan tujuan krusial sebagai berikut:

1. Untuk menemukan, mendeskripsikan, dan mengevaluasi secara kritis mekanisme, bentuk, serta problematika yang dihadapi dalam implementasi program pembinaan keagamaan dan kerohanian bagi narapidana residivis di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh saat ini.
2. Untuk menganalisis secara mendalam melalui kacamata Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyyah*) mengenai disfungsi dan terputusnya pelindungan keluarga (*Hifdz Al-Nasl*) sebagai variabel sosiologis determinan yang memicu terjadinya pengulangan tindak pidana (residivisme) di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh.
3. Untuk merumuskan dan mengkonstruksi model pelembagaan mediasi perdamaian (*Ishlah*) berbasis Hukum Keluarga Islam ke dalam kurikulum pembinaan kerohanian di Rutan, sebagai tawaran instrumen strategis guna mencegah residivisme dan mewujudkan *taubat restoratif* secara holistik.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai dokumen akademis di atas meja, melainkan mampu memberikan signifikansi dan kontribusi nyata, baik bagi pengembangan khazanah keilmuan maupun bagi perbaikan sistem penegakan hukum di Indonesia. Adapun manfaat dari penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua dimensi pokok, yakni:

a. Manfaat Teoretis (Akademis) Secara keilmuan, hasil penelitian ini diproyeksikan untuk memberikan kontribusi teoretis sebagai berikut:
   - Pengembangan Epistemologi Hukum Keluarga Islam: Penelitian ini diharapkan dapat memperluas spektrum kajian *Ahwal Al-Syakhshiyyah*. Konsep *Hifdz Al-Nasl* (pelindungan keturunan) dan *Ishlah* (rekonsiliasi) yang selama ini dominan dikaji dalam ruang lingkup keperdataan privat (seperti pencegahan perceraian), akan diekstensifikasi menjadi instrumen resolusi konflik dalam disiplin ilmu kriminologi dan penologi (ilmu pemasyarakatan).
   - Pembaruan Teori Pemasyarakatan (Penologi): Memberikan sumbangsih pemikiran berupa "Model Pembinaan Kerohanian Berbasis Keluarga". Penelitian ini menggeser paradigma pembinaan narapidana residivis dari yang sebelumnya bersifat *individualistik-ritualistik* menjadi *kolektif-sosiologis*, sehingga memperkaya literatur mengenai implementasi keadilan restoratif paripurna.
   - Pengayaan Kajian Sosiologi Hukum: Menjadi literatur dan referensi (*state of the art*) bagi akademisi dan peneliti selanjutnya yang ingin membedah relasi antara sistem pemidanaan negara, ketaatan pada hukum syariat, dan dinamika sosiokultural masyarakat lokal (khususnya masyarakat adat di wilayah Jambi dan Kerinci).

b. Manfaat Praktis (Aplikatif) Secara pragmatis dan institusional, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan langsung bagi berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*):

- Bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan Kemenkumham RI: Sebagai bahan masukan strategis dan evaluasi kritis berbasis riset (*evidence-based policy*) dalam menyempurnakan regulasi nasional. Khususnya untuk merevisi dan memperbarui instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) serta merumuskan Standard Operating Procedure (SOP) pembinaan kerohanian yang mendiferensiasikan modul antara narapidana baru dan residivis.
- Bagi Kanwil Kemenkumham Jambi dan Rutan Kelas IIB Sungai Penuh: Menjadi *blueprint* (cetak biru) dan pedoman aplikatif bagi Kepala Rutan, Pejabat Struktural, dan Pembimbing Kerohanian dalam mengintegrasikan program *Family Counseling* dan mediasi *Ishlah* ke dalam jadwal pembinaan sehari-hari, guna menekan angka overkapasitas yang diakibatkan oleh tingginya angka residivisme di wilayah tersebut.
- Bagi Narapidana Residivis dan Keluarganya: Sebagai jembatan psikologis dan spiritual yang memfasilitasi rekonsiliasi (*taubat restoratif*). Implementasi dari penelitian ini secara praktis akan membantu memulihkan nama baik keluarga, menyembuhkan trauma penolakan sosial, dan memastikan narapidana memiliki *support system* yang kokoh saat kembali ke tengah masyarakat.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran, ambiguitas makna, serta perluasan ruang lingkup yang tidak relevan dalam penelitian ini, peneliti memandang perlu untuk memberikan batasan pengertian dan definisi operasional terhadap beberapa terminologi pokok yang tertera pada judul. Adapun batasan terminologi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Implementasi Secara leksikal, implementasi bermakna pelaksanaan atau penerapan. Dalam operasionalisasi tesis ini, implementasi didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas sistematis, terencana, dan terukur yang dilakukan oleh otoritas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB

Sungai Penuh—baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan pihak ketiga (seperti Kemenag atau tokoh masyarakat)—dalam mengeksekusi kurikulum, metode, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait bimbingan kerohanian.

b. Program Pembinaan Keagamaan dan Kerohanian Dalam konteks konvensional, ini adalah program edukasi agama. Namun dalam operasionalisasi penelitian ini, program ini dimaknai secara lebih holistik ganda:
    - Dimensi Vertikal: Edukasi ritual (ibadah *mahdhah*) untuk menumbuhkan penyesalan batin (*an-nadam*).
    - Dimensi Horizontal: Kurikulum intervensi sosial berbasis mediasi (*family counseling*) yang menjadikan pembimbing kerohanian sebagai *Hakam* (mediator) untuk menjembatani rekonsiliasi antara narapidana dengan keluarganya di luar tembok penjara guna mencapai apa yang dalam penelitian ini disebut sebagai Taubat Restoratif.
c. Narapidana Residivis Secara yuridis, residivis adalah Warga Binaan Pemasyarakatan yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) dan telah menjalani masa pidananya. Secara operasional dalam tesis ini, subjek narapidana residivis difokuskan pada dinamika psikososial mereka—yakni individu yang memiliki tingkat resistensi tinggi terhadap pembinaan akibat mengalami alienasi (keterasingan) sosial dan kehilangan *support system* utama akibat penolakan dari keluarga/masyarakat (*secondary deviance*).
d. Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyyah*) Secara umum, Hukum Keluarga Islam mengatur perihal perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Namun, batasan operasional Hukum Keluarga Islam dalam penelitian ini tidak difokuskan pada aspek hukum keperdataan privat, melainkan diekstensifikasi sebagai pisau analisis sosiologi kriminologi. Kajian ini difokuskan pada dua instrumen utama:

- *Hifdz Al-Nasl* (Pelindungan Keturunan/Keluarga): Dijadikan parameter untuk membedah bagaimana putusnya ikatan keluarga menjadi penyebab utama narapidana mengulangi kejahatan.
- *Ishlah* (Rekonsiliasi/Perdamaian): Dijadikan sebagai model dan instrumen mediasi yang wajib diintegrasikan oleh Rutan untuk memulihkan hubungan kekerabatan narapidana residivis.

5. Rumah Tahanan Kelas IIB Sungai Penuh

Rumah Tahanan Kelas IIB Sungai Penuh adalah lembaga pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat pembinaan dan penahanan sementara bagi individu yang sedang menjalani proses hukum atau menjalani hukuman pidana. Dalam konteks penelitian ini, Rumah Tahanan Kelas IIB Sungai Penuh menjadi lokasi utama pelaksanaan program pendidikan agama Islam dan observasi perubahan perilaku narapidana.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORI

1. Tinjauan tentang Sistem Pemasyarakatan dan Keadilan Restoratif

a. Filosofi Pemidanaan: Transisi dari Keadilan Retributif Menuju Pemasyarakatan

Diskursus mengenai ontologi pemidanaan dan institusi penahanan senantiasa berpusat pada perdebatan filosofis mengenai hakikat keadilan dan tujuan penghukuman itu sendiri. Secara historis, embrio hukum pidana di Indonesia—yang sebagian besar merupakan warisan sistem konkordansi kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*)—sangat kental diwarnai oleh corak keadilan retributif (*retributive justice*). Dalam paradigma klasik ini, keadilan diidentikkan dengan pembalasan absolut (*lex talionis*). Institusi "penjara" pada masa itu (*sistem kepengurusan*) didesain secara eksklusif sebagai ruang isolasi yang bertujuan untuk menjatuhkan derita, siksaan batin, dan penjeraan fisik kepada pelanggar hukum, dengan asumsi bahwa penderitaan tersebut akan membayar lunas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana (Zaidan, 2016: 45)[^1].

Namun, seiring dengan perkembangan sosiologi hukum dan kriminologi modern, paradigma penjatuhan derita tersebut mengalami dekonstruksi radikal. Penjara konvensional terbukti gagal menekan angka kejahatan dan justru bermetamorfosis menjadi wadah transmisi kejahatan (*school of crime*). Menyadari kegagalan filosofis tersebut, sistem peradilan pidana di Indonesia mengalami revolusi konseptual pada tahun 1963 melalui gagasan Dr. Sahardjo, S.H., yang mengganti nomenklatur "Penjara" menjadi "Pemasyarakatan". Perubahan ini adalah sebuah lompatan epistemologis yang menggeser titik tekan hukum pidana menuju keadilan rehabilitatif dan restoratif.

Mensintesiskan pergeseran paradigma ini, Barda Nawawi Arief (2014: 78) memberikan landasan teoretis yang sangat fundamental. Menurut Arief, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya adalah subordinasi dan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Oleh karena itu, rasionalitas dari pemidanaan bukanlah penghukuman itu sendiri, melainkan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social*

welfare). Perampasan kemerdekaan fisik hanyalah sarana fungsional sementara. Pandangan ini diperkuat oleh Romli Atmasasmita (2011: 92) yang mengkritik tajam praktik isolasi mutlak. Atmasasmita mensintesiskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan harus direkonstruksi agar berfungsi sebagai institusi klinis dan edukatif, bukan sekadar "gudang penyimpanan manusia" (*human warehousing*). Reintegrasi sosial menyaratkan proses asimilasi terencana di mana narapidana dididik ulang (*re-education*) agar menyadari kesalahannya, memulihkan kualitas moralnya, dan memiliki kepantasan untuk kembali diterima di masyarakat.

b. Regulasi Terkini: Esensi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

Transformasi filosofis tersebut diejawantahkan secara kokoh ke dalam instrumen hukum positif melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kehadiran regulasi ini mereformasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dengan menawarkan konstruksi hukum yang lebih adaptif, humanis, dan berbasis pada asas individualisasi pidana (Priyatno, 2022: 45). Salah satu *ratio legis* (alasan fundamental pembentukan hukum) dari undang-undang ini adalah penegasan bahwa perampasan kemerdekaan fisik tidak serta-merta merampas hak otonomi spiritual narapidana.

Hal ini secara eksplisit diamanatkan dalam Pasal 9 huruf (a) UU No. 22 Tahun 2022, yang memberikan jaminan konstitusional bahwa setiap Warga Binaan berhak "menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya". Jaminan ini memosisikan pemenuhan hak kerohanian sebagai sebuah kewajiban hukum (*legal obligation*) negara. Lebih lanjut, esensi pembinaan kerohanian mendapatkan landasan operasionalnya dalam Pasal 38. Pasal ini menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem pemasyarakatan meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian, di mana pembinaan kepribadian diorientasikan secara spesifik pada peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan perbaikan perilaku (Sholehuddin, 2023: 112).

Secara konseptual, konstruksi pasal ini mengonfirmasi bahwa negara memandang "krisis spiritual dan moral" sebagai kausalitas utama tindak pidana. Oleh karena itu, penyembuhan melalui intervensi keagamaan

(pembinaan kerohanian) diakui sebagai metode klinis yang rasional. Institusi pemasyarakatan diwajibkan menyediakan fasilitas dan instruktur agar internalisasi nilai agama berjalan terstruktur. Pemenuhan hak ini nantinya dikuantifikasi melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) sebagai syarat mutlak diberikannya hak integrasi (seperti remisi dan pembebasan bersyarat).

c. Tujuan Reintegrasi Sosial: Kembali kepada Masyarakat yang Sehat

Muara dari seluruh rangkaian sistem peradilan pidana dan pembinaan kerohanian di atas adalah terwujudnya reintegrasi sosial secara paripurna. Reintegrasi sosial tidak boleh direduksi maknanya semata-mata sebagai proses administratif pelepasan narapidana dari gerbang penjara. Secara ontologis, reintegrasi adalah upaya komprehensif untuk memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana agar memiliki keberterimaan untuk hidup berdampingan secara damai di tengah masyarakat (Arief, 2018: 115).

Namun, proses pengembalian ini merupakan sebuah dialektika sosial yang menuntut kesiapan dua arah. Keberhasilan reintegrasi mutlak membutuhkan kehadiran "masyarakat yang sehat" (*healthy society*). Muladi (2015: 78) menegaskan bahwa masyarakat yang sehat dalam konteks pemasyarakatan adalah tatanan sosial yang rasional, memiliki kapasitas pemaafan (*forgiveness*), dan terbebas dari jerat stigmatisasi buta (*blind stigmatization*)[^2]. Apabila lingkungan masyarakat bersikap eksklusif, menghakimi secara moral, dan menutup ruang partisipasi, maka asimilasi yang dibangun di dalam lembaga pemasyarakatan akan runtuh. Penolakan sosial inilah yang memutus ikatan sosial (*social bond*) mantan narapidana dan memaksa mereka melakukan penyimpangan sekunder yang berujung pada residivisme.

Oleh karena itu, doktrin reintegrasi sosial mensyaratkan otoritas pemasyarakatan untuk mengambil peran proaktif. Institusi tidak boleh lagi hanya berfokus pada perbaikan narapidana di dalam sel, tetapi harus merancang "pembinaan ke luar" yang mempersiapkan masyarakat—khususnya keluarga inti narapidana. Narapidana baru dapat dikatakan "kembali secara

utuh" apabila keluarga dan lingkungannya telah diedukasi untuk siap merangkul dan menerima mereka kembali tanpa prasangka.

2. Tinjauan Kriminologis dan Sosiologis tentang Residivisme

a. Konseptualisasi Residivis: Perspektif Hukum Positif dan Kriminologi

Fenomena residivisme merupakan episentrum dari problematika sistem peradilan pidana. Untuk membedah persoalan ini secara komprehensif, residivisme harus dikonseptualisasikan dari dua instrumen epistemologis yang berbeda, yakni secara yuridis-normatif (hukum positif) dan secara kriminologis-sosiologis.

Secara yuridis-normatif, residivisme diposisikan secara tegas sebagai salah satu alasan pemberatan pidana (*strafverzwaring*). Dalam konstruksi hukum positif Indonesia—baik KUHP warisan kolonial maupun UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP—residivis dimaknai sebagai pengulangan tindak pidana oleh subjek hukum yang sama. Secara dogmatik, syarat kumulatif terbentuknya status residivis secara legal mencakup: pelaku pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); pelaku telah menjalani seluruh atau sebagian dari masa pidananya; dan pelaku kembali melakukan tindak pidana baru dalam tenggang waktu tertentu (umumnya dalam kurun waktu lima tahun) setelah pembebasannya (Zaidan, 2016: 67). Dalam kacamata legalistik-formal ini, residivisme murni dipandang sebagai wujud "pembangkangan" terhadap otoritas hukum.

Namun, definisi legal-formal tersebut dinilai reduksionis karena tidak memadai untuk membongkar kausalitas mengapa seseorang kembali berbuat jahat. Oleh karena itu, kriminolog terkemuka Indonesia, J.E. Sahetapy (2013: 56), memberikan pandangan yang sangat fundamental: residivisme adalah bukti empiris dan indikator mutlak dari kegagalan proses asimilasi dan reintegrasi narapidana ke dalam tatanan masyarakat. Sahetapy menegaskan bahwa pengulangan kejahatan terjadi karena "pengobatan" di dalam institusi penahanan gagal menetralkan akar kriminogenik pelaku, yang kemudian diperparah oleh benturan realitas sosial di mana masyarakat menolak kehadiran mereka. Kriminologi memandang bahwa residivis sering kali "diciptakan" kembali oleh ekosistem sosial yang gagal memfasilitasi pertobatannya.

b. Dinamika Psikososial Narapidana Berulang: Teori Pelabelan (*Labeling Theory*)

Membongkar patologi residivisme menuntut peneliti untuk menyelami dinamika psikososial yang bergejolak pasca-pembebasan. Secara empiris, ketika seorang narapidana keluar dari institusi pemasyarakatan, hutang pidananya secara yuridis telah lunas, namun hutang sosialnya sering kali baru saja dimulai. Dinamika ini sangat presisi apabila dianalisis menggunakan *Labeling Theory* (Teori Pelabelan) dari Howard S. Becker.

Dalam karyanya, *Outsiders*, Becker (1963: 9) mendalilkan postulat yang mendekonstruksi kriminologi klasik: penyimpangan bukanlah semata-mata kualitas inheren dari tindakan seseorang, melainkan konsekuensi dari penerapan aturan dan sanksi oleh masyarakat terhadap "pelanggar". Ketika Warga Binaan kembali ke masyarakat, tatanan sosial secara hegemonik menempelkan stigma permanen sebagai "mantan narapidana" atau "penjahat". Label ini bertransformasi menjadi status utama (*master status*) yang mereduksi seluruh identitas positif lain yang dimiliki individu tersebut (Mulyadi, 2021: 88).

Dampak psikososial dari label ini sangatlah destruktif. Secara institusional, mereka ditolak di dunia kerja. Secara kultural, mereka diasingkan dari interaksi sosial. Akumulasi dari penolakan sosial yang brutal ini mendorong mantan narapidana memasuki krisis eksistensial, yang melahirkan apa yang disebut sebagai *secondary deviance* (penyimpangan sekunder). Karena akses menuju kehidupan sosial yang sah ditutup rapat, mantan narapidana menginternalisasi label buruk tersebut. Mereka mulai mendefinisikan dirinya sebagai penjahat—sesuai dengan konstruksi masyarakat—dan mencari pelarian pada sindikat kejahatan masa lalunya (Akers, 2017: 142). Dengan demikian, kejahatan berulang adalah bentuk mekanisme pertahanan diri (*defense mechanism*) terhadap masyarakat yang memusuhinya.

c. Hilangnya *Support System*: Dekonstruksi Ikatan Sosial (*Social Control Theory*)

Jika Teori Pelabelan membedah bagaimana masyarakat secara aktif mendorong seseorang kembali menjadi penjahat, maka pisau analisis selanjutnya harus diarahkan pada kerapuhan internal mantan narapidana itu

sendiri. Kerapuhan ini dapat dibedah menggunakan *Social Control Theory* (Teori Kontrol Sosial) yang dikemukakan oleh Travis Hirschi.

Hirschi (2002: 16) mengajukan pertanyaan fundamental: "mengapa kebanyakan orang taat pada hukum?". Jawabannya adalah karena individu memiliki ikatan sosial (*social bond*) yang kuat dengan institusi konvensional di masyarakat, yang berfungsi sebagai kontrol internal. Dari empat elemen ikatan sosial (*attachment, commitment, involvement, belief*), *attachment* (kasih sayang/kelekatan) menempati hierarki paling krusial, di mana keluarga menduduki posisi sebagai institusi primer. Seseorang menahan diri dari kejahatan karena takut mengecewakan atau menghancurkan nama baik keluarganya. Keluargalah yang menjadi *support system* dan rem moral paling efektif.

Namun, eksekusi pemidanaan (pemenjaraan) sering kali memicu daya rusak yang menghancurkan ikatan sosial tersebut. Keluarga turut menanggung beban berat—baik himpitan ekonomi maupun sanksi moral dari masyarakat (*secondary victimization*). Rentetan penderitaan ini kerap kali melahirkan keputusasaan pada pihak keluarga, yang berujung pada terputusnya komunikasi, penolakan psikologis, hingga perceraian.

Terputusnya *attachment* dengan institusi keluarga ini melahirkan konsekuensi fatal. Saat narapidana bebas, ia melangkah ke dunia luar tanpa memiliki *support system*. Ia kehilangan "taruhan dalam kepatuhan" (*stake in conformity*). Dalam kondisi vakum inilah, mantan narapidana mencari afiliasi dan penerimaan pada kelompok yang memiliki kesamaan nasib: residivis lain. Teori ini mengukuhkan argumen bahwa intervensi pembinaan di Rutan tidak boleh hanya membina individu narapidana, tetapi wajib merekonstruksi *attachment* (ikatan kasih sayang) dengan keluarga melalui pendekatan mediasi untuk mencegah kejahatan berulang.

3. Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyyah*) dan *Hifdz Al-Nasl*

a. Epistemologi *Maqashid Syariah*: Tinjauan *Al-Kulliyyat Al-Khams*

Untuk membedah efektivitas pembinaan pemasyarakatan dari kacamata teologis, kerangka analisis harus ditarik ke hulu filsafat hukum Islam, yakni *Maqashid Syariah* (Tujuan-tujuan Syariat). Dalam tradisi keilmuan *ushul fiqh*,

arsitektur utama *Maqashid Syariah* diformulasikan secara sistematis oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi. Asy-Syatibi (2004: 15) menegaskan bahwa seluruh syariat diturunkan murni untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia (*jalb al-maslahah*) dan menolak kerusakan (*daf'u al-mafsadah*), baik di dunia maupun di akhirat.

Kemaslahatan tertinggi ini diklasifikasikan oleh Asy-Syatibi ke dalam lima perlindungan esensial yang dikenal sebagai *Al-Kulliyyat Al-Khams* (Lima Prinsip Universal): pelindungan agama (*Hifdz Al-Diin*), jiwa (*Hifdz Al-Nafs*), akal (*Hifdz Al-Aql*), keturunan (*Hifdz Al-Nasl*), dan harta (*Hifdz Al-Maal*). Dalam konteks pemidanaan dan pembinaan narapidana, sentralitas intervensi negara sering kali harus dikembalikan pada upaya pelindungan jiwa dan akal.

Hifdz Al-Nafs (pelindungan jiwa) dalam ekosistem pemasyarakatan tidak hanya dimaknai sempit sebagai larangan penyiksaan fisik atau pembunuhan, melainkan pelindungan terhadap martabat kemanusiaan (*karamah insaniyyah*) pelanggar hukum. Memenjarakan seseorang tanpa memberikan bimbingan spiritual sama halnya dengan membiarkan "jiwa" narapidana tersebut mati dalam keputusasaan. Sementara itu, *Hifdz Al-Aql* (pelindungan akal) menjadi fondasi dari pertobatan. Kejahatan sering kali bermula dari hilangnya kendali rasionalitas yang dibajak oleh hawa nafsu. Pembinaan kerohanian di dalam Rutan sejatinya adalah proses restorasi akal sehat (*Hifdz Al-Aql*), agar narapidana kembali mampu menggunakan rasionalitas ilahiahnya untuk menimbang konsekuensi moral dari perbuatannya (Audah, 2015: 142)[^1]. Namun demikian, pemulihan jiwa dan akal secara individual ini tidak akan bertahan lama jika tidak ditopang oleh pelindungan sistem sosialnya, yakni *Hifdz Al-Nasl*.

b. Keluarga Sebagai Institusi Pencegahan Kejahatan: Ekstensifikasi Makna *Hifdz Al-Nasl*

Dalam hukum Islam, urusan keluarga diatur secara komprehensif melalui *Ahwal Al-Syakhshiyyah* (Hukum Keluarga). Terdapat miskonsepsi akademis yang sering kali mereduksi *Ahwal Al-Syakhshiyyah* sekadar sebagai instrumen hukum keperdataan privat yang mengurus validitas administrasi perkawinan, tata cara perceraian, dan pembagian harta waris. Padahal, secara sosiologis,

Wahbah Az-Zuhaili (2011: 45) meletakkan keluarga sebagai unit yurisdiksi sekaligus "institusi moral primer" yang memiliki otoritas mutlak dalam mencetak peradaban.

Dalam kacamata *Maqashid Syariah*, pemeliharaan terhadap institusi moral primer ini dibingkai dalam konsep *Hifdz Al-Nasl* (Pemeliharaan Nasab/Keturunan). Ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qardhawi (2014: 112) melakukan "ekstensifikasi" (perluasan makna) terhadap *Hifdz Al-Nasl*. Pelindungan nasab tidak lagi hanya dimaknai secara biologis sebagai larangan berzina (*hifdz al-furuj*), melainkan mencakup kewajiban *tarbiyah* (pendidikan moral), penjagaan nama baik, dan penciptaan ekosistem rumah tangga yang *sakinah* (tenteram).

Melalui ekstensifikasi ini, tesis ini mendalilkan bahwa memelihara nasab berarti mencegah anggota keluarga menjadi entitas yang merusak masyarakat (pelaku kriminal). Keluarga diposisikan sebagai institusi pencegahan kejahatan pertama dan utama (*primary crime prevention institution*). Apabila *Hifdz Al-Nasl* beroperasi secara maksimal, maka ikatan emosional dan pengawasan moral di dalam rumah akan menjadi benteng terkuat yang menghalangi seseorang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, ketika seseorang menjadi narapidana—terlebih residivis—hal itu merupakan indikator klinis bahwa institusi keluarga tersebut telah mengalami kelumpuhan dalam menjalankan fungsi *Hifdz Al-Nasl*-nya.

c. Disfungsi Keluarga Akibat Pemenjaraan: Benturan Hukum Pidana dan Hukum Keluarga

Ketika negara mengeksekusi sanksi pidana penjara, secara bersamaan negara tanpa disadari sedang memicu ledakan disfungsi pada struktur keluarga pelanggar hukum. Pemenjaraan memunculkan apa yang dalam kriminologi disebut sebagai "viktimisasi sekunder" (*secondary victimization*), di mana keluarga yang ditinggalkan di luar tembok penjara turut menanggung "hukuman" secara sosial, psikologis, dan ekonomi. Dalam analisis *Ahwal Al-Syakhshiyyah*, pemenjaraan secara langsung mendekonstruksi tiga pilar utama penopang *Hifdz Al-Nasl*:

Pertama, hilangnya fungsi *Nafaqah* (Pencari Nafkah). Ketika suami/ayah

yang menjadi tulang punggung dijebloskan ke Rutan, struktur ekonomi keluarga runtuh seketika. Kemiskinan mendadak ini menempatkan istri dan anak-anak dalam posisi rentan, yang ironisnya sering memicu mereka melakukan tindak pidana baru demi bertahan hidup. *Kedua*, terputusnya fungsi *Hadhanah* (Hak Asuh dan Pengasuhan Anak). Absennya figur orang tua mendistorsi proses internalisasi nilai moral pada anak. Anak-anak yang kehilangan sosok ayah/ibu yang dipenjara berisiko mewarisi siklus kejahatan antargenerasi (Nasution, 2018: 134).

Ketiga, terbukanya potensi disolusi perkawinan (*Fasakh/Thalaq*). Pemenjaraan tidak hanya menghancurkan ekonomi, tetapi juga menghancurkan reputasi keluarga di mata masyarakat yang religius. Tekanan sosiologis ini sering kali mendorong pihak istri/suami untuk menyerah dan mengajukan perceraian. Secara hukum positif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia melegitimasi hal ini. Pasal 116 huruf (c) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat diajukan jika "salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat"[^2].

Akumulasi dari hilangnya nafkah, putusnya pengasuhan, dan terjadinya perceraian akibat pemenjaraan inilah yang menghancurkan struktur keluarga hingga ke titik nadir. Disfungsi eksistensial ini menjadi kausalitas utama mengapa seorang narapidana bertransformasi menjadi residivis. Ketika narapidana dibebaskan, ia keluar menuju dunia yang hampa; tidak ada lagi istri yang menunggu, tidak ada anak yang bisa ia peluk, dan tidak ada lagi *nasab* yang mengakuinya. Terputusnya *Hifdz Al-Nasl* ini menghilangkan satu-satunya *support system* yang ia miliki, memaksanya kembali ke lingkungan sub-kultur kejahatan sebagai kompensasi atas keterasingannya dari keluarga dan masyarakat.

4. Konsep Pembinaan Kerohanian dan Pelembagaan *Ishlah*

a. Dari Taubat Ritual ke Taubat Restoratif: Melampaui Ibadah *Mahdhah*

Kritik paling fundamental terhadap arsitektur sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini bermuara pada bagaimana negara dan otoritas Rumah Tahanan (Rutan) mendefinisikan "keberhasilan pembinaan". Hingga saat ini, indikator keberhasilan program bimbingan kerohanian masih sangat

didominasi oleh parameter kesalehan ritual yang bersifat individual-preskriptif. Instrumen evaluasi, seperti Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), cenderung mengukur tingkat pertobatan narapidana semata-mata dari intensitas pelaksanaan ibadah *mahdhah*—seperti kedisiplinan melaksanakan salat fardu berjamaah, kemampuan membaca Al-Qur'an, atau kehadiran secara fisik dalam majelis taklim di masjid Rutan (Sholehuddin, 2023: 145).

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa akar kejahatan murni berawal dari kejahilan teologis (Hablum Minallah), sehingga solusinya adalah pembinaan keagamaan secara searah. Namun, bagi narapidana residivis, pendekatan ini tidak selalu memadai. Sebagaimana telah diuraikan pada analisis sosiologis sebelumnya, residivis umumnya telah memiliki pengalaman mengikuti program pembinaan kepribadian, termasuk pembinaan keagamaan, selama menjalani pidana sebelumnya. Persoalan yang lebih mendasar sering kali terletak pada rusaknya Hablum Minannas (hubungan antarmanusia), yang ditandai dengan menurunnya kepercayaan, dukungan, dan penerimaan dari keluarga maupun lingkungan sosial. Padahal, sistem pemasyarakatan Indonesia menempatkan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama pembinaan, yaitu memulihkan hubungan warga binaan dengan keluarga dan masyarakat agar mampu kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab (Muladi, 2008: 37). Selain itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya diukur dari perubahan perilaku individu, tetapi juga dari kesiapan warga binaan untuk diterima kembali oleh keluarga dan lingkungan sosialnya (Ditjen PAS, 2020: 12).

Oleh karena itu, tesis ini mendalilkan urgensi pergeseran paradigma pembinaan dari sekadar "Taubat Ritual" menuju "Taubat Restoratif". Taubat restoratif adalah sebuah manifestasi pertobatan paripurna yang tidak hanya memohon ampunan secara vertikal kepada Tuhan (*an-nadam*), tetapi juga mensyaratkan adanya pemulihan hak dan resolusi konflik secara horizontal terhadap manusia (Zaidan, 2019: 88)[^1]. Dalam konteks residivisme, ibadah *mahdhah* di dalam sel penjara tidak akan pernah mampu memutus rantai kejahatan jika narapidana tersebut tidak difasilitasi untuk memulihkan

kerusakan sosial yang telah ia timbulkan pada keluarganya. Taubat restoratif menuntut adanya pemulihan *support system*, karena tanpa penerimaan sosial, ritual agama yang dilakukan narapidana di dalam Rutan akan runtuh seketika saat ia berhadapan kembali dengan realitas penolakan di luar tembok penjara.

b. Mediasi *Ishlah* (Rekonsiliasi): Rutan Sebagai *Hakam* dalam Memulihkan *Hifdz Al-Nasl*

Menyadari bahwa Taubat Restoratif membutuhkan instrumen sosiologis dan yuridis untuk dapat diimplementasikan, maka konsep *Ishlah* (rekonsiliasi/perdamaian) dalam Hukum Keluarga Islam ditawarkan sebagai solusi metodologis yang wajib dilembagakan ke dalam kurikulum Rutan. Secara etimologis dan terminologis, *Ishlah* bermakna memutus perselisihan dan membangun kembali harmoni yang sempat retak. Konsep ini memiliki akar teologis yang sangat kokoh di dalam Al-Qur'an, salah satunya termaktub dalam Surah An-Nisa ayat 128 yang menegaskan prinsip: *"Wa as-shulhu khair"* (Dan perdamaian itu lebih baik).

Meskipun secara historis dan yurisprudensi ayat ini sering kali dikontekstualisasikan secara sempit pada ranah sengketa perkawinan (pencegahan perceraian), penelitian ini melakukan ekstensifikasi (perluasan makna) teoretis. *Ishlah* harus didudukkan sebagai metodologi resolusi konflik holistik antara narapidana pelanggar hukum dengan keluarga yang menanggung aib dari kejahatan tersebut (Mubarok, 2019: 77)[^2]. Ketika seorang individu melakukan tindak pidana berulang, konflik yang terjadi bukan hanya antara pelaku dan negara, tetapi juga melahirkan konflik batin dan sosial yang sangat tajam antara pelaku dan keluarganya.

Dalam kerangka pelembagaan *Ishlah* ini, peran institusi pemasyarakatan harus direkonstruksi secara radikal. Rutan dan para fungsional Pembimbing Kerohanian tidak boleh lagi memosisikan diri secara pasif hanya sebagai *Mubaligh* (penceramah agama) yang berdiri di atas mimbar. Rutan secara institusional harus mengambil alih peran sebagai *Hakam* (mediator/juru damai) yang diamanatkan oleh syariat. Sebagai *Hakam*, otoritas Rutan wajib memfasilitasi program *Family Counseling* yang mempertemukan narapidana residivis dengan keluarga intinya sebelum masa pidananya berakhir.

Melalui mediasi *Ishlah* inilah, Pembimbing Kerohanian bertugas mengedukasi keluarga mengenai esensi pemaafan, meruntuhkan stigma, dan mempersiapkan mental keluarga untuk menyambut kembalinya narapidana. Pelembagaan *Ishlah* memastikan bahwa ketika pintu Rutan Kelas IIB Sungai Penuh terbuka bagi seorang residivis yang telah bebas, ia tidak melangkah ke dunia yang hampa. Ia memiliki "tempat pulang" secara moral dan fisik. Ketika *Ishlah* berhasil merajut kembali *Hifdz Al-Nasl* (ikatan nasab/keluarga), maka narapidana tersebut mendapatkan kembali *support system* utamanya, yang sekaligus menjadi benteng terkuat untuk mencegahnya tergelincir kembali ke dalam residivisme.

1. Pembinaan Keagamaan

1) Pengertian Pembinaan Keagamaan

Pembinaan berasal dari kata dasar bina, yang berasal dari bahasa arab “bana” yang berarti membina, membangun, mendirikan, dan membentuk. Kemudian mendapat awalan pe- dan –an sehingga menjadi kata pembinaan yang mempunyai arti usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan juga dapat berarti suatu kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada sesuai dengan yang diharapkan. Hasan dkk, (2013: 152)

Pembinaan adalah suatu proses yang membantu individu melalui usaha sendiri dalam rangka menemukan dan mengembangkan kemampuannya dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan pribadi dan manfaat sosial.

Menurut Hendiyat Soetopo dan Westy Soemanto. Pembinaan adalah menunjuk pada suatu kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada. Sedangkan menurut Masdar Helmi (2019:31), pembinaan mencakup segala ikhtiar (usaha-usaha), tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas beragama baik dalam bidang tauhid, bidang peribadatan, bidang akhlak dan bidang kemasyarakatan.

Miftah Thoha (2004:7) mengatakan bahwa pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. dalam

peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ke taqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Jadi dapat dikatakan bahwa pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sabar, berencana, teratur, dan terarah serta bertanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian dan memperbaiki pribadi kearah yang

Ngainun Naim (2014:2) Teori pembinaan yang diatas tersebut sama halnya dengan teori behavioristik, yakni belajar adalah perubahan kemampuan peserta didik untuk bertingkah laku secara baru sevagai akibat dari hasil interaksi, stimulus dan respon lingkungan yang di dapatnya. Seseorang telah dianggap belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkkan perubahan tingkah laku.

Maka akan dijelaskan pengertiannya pembinaan atau bimbingan keagamaan. Adapun pengertian dari pembinaan keagamaan menurut tokoh adalah sebagai berikut :

1. Menurut Faqih, pembinaan keagamaan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam kehidupan keagamaan senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.
2. Menurut Arifin, pembinaan keagamaan adalah usaha pemberian bantuan kepada orang yang mengalami kesulitan baik lahiriyah maupun batiniyah yang mengangkut kehidupan dimasa kini dan dimasa mendatang. Bantuan tersebut berupa pertolongan di bidang mental dan spiritual, agar orang yang bersangkutan mampu mengatasi dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri melalui dorongan dengan kekuatan iman dan taqwanya kepada Allah.

3. Menurut Abu Tauhid dalam Kursini (2008:9), pembinaan keagamaan merupakan bimbingan yang mengembangkan dan membimbing apa yang terdapat pada diri tiap-tiap individu secara optimal yang sesuaidengan ajaran Islam sehingga setiap individu dapat berguna bagi diri sendiri, lingkungan dan masyarakat .

Pembinaan keagamaan juga dapat diintegrasikan dengan rekonsiliasi keluarga (*islah*). Dalam konteks ini, kegiatan keagamaan diarahkan untuk memperkuat hubungan emosional dan moral narapidana dengan keluarga melalui pendekatan religius, misalnya melalui kajian tentang pentingnya maaf, musyawarah, dan keharmonisan keluarga. Program pembinaan keagamaan dapat memfasilitasi dialog restoratif antara narapidana dan keluarga, menanamkan nilai saling menghormati, serta membangun motivasi bagi narapidana untuk kembali diterima dalam keluarga dan masyarakat secara harmonis. Dengan demikian, pembinaan keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai penguatan spiritual individu, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi sosial yang mendukung reintegrasi narapidana ke masyarakat secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, integrasi taubat restoratif dan islah dalam pembinaan keagamaan menciptakan pendekatan yang holistik, humanis, dan preventif. Narapidana dibimbing untuk menyadari kesalahan, memperbaiki diri, memulihkan hak korban, dan membina hubungan harmonis dengan keluarga serta masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemasyarakatan berbasis keadilan restoratif yang menekankan keseimbangan antara hak individu, hak korban, dan kepentingan sosial.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembinaan keagamaan adalah suatu usaha kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada sesuai dengan yang diharapkan pada sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu yang berkaitan dengan agama.

2) Materi Pembinaan Keagamaan

Materi Pembinaan Keagamaan Berdasarkan Taubat Restoratif (*Al-Haqqul Adami*) dan Rekonsiliasi Keluarga (*Islah*). Materi pembinaan keagamaan di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh dirancang untuk

mengintegrasikan taubat restoratif **(***Al-Haqqul Adami***)** dan rekonsiliasi keluarga **(***Islah***)**, sehingga pembinaan tidak hanya berfokus pada aspek spiritual individu, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan harmonisasi keluarga.

Berdasarkan taubat restoratif, materi pembinaan keagamaan mencakup empat dimensi utama.

a) Tawbah Ruhaniyah (Taubat Spiritual) menekankan kesadaran dosa, pengakuan kesalahan kepada Allah, permohonan ampun, serta tekad untuk tidak mengulanginya. Kegiatan ini meliputi pengajaran doa tobat, penguatan iman melalui tafsir dan pengajian, serta refleksi diri yang mendalam (al-Ghazali, t.t.).
b) Tawbah Akhlāqiyah (Taubat Moral/Psikologis) berfokus pada pembentukan karakter positif, seperti kejujuran, disiplin, empati terhadap korban, dan pengendalian emosi. Narapidana dibimbing melalui diskusi kasus, studi moral, dan pembiasaan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari di rutan (Al-Zuhaili, 1989).
c) Tawbah Ijtimā‘iyah (Taubat Sosial) menekankan pemulihan hubungan sosial dengan korban, keluarga, dan masyarakat. Narapidana diajarkan meminta maaf, memperbaiki kesalahan, dan menghormati hak-hak orang lain sesuai prinsip *al-haqqul adami* (Al-Qur’an, 25:70; 4:128).
d) Tawbah Qanuniyah (Taubat Yuridis) menekankan pemenuhan hak korban melalui mekanisme hukum atau mediasi, seperti restitusi atau kompensasi, untuk menegakkan keadilan restoratif. Hal ini menanamkan kesadaran bahwa tanggung jawab sosial dan hukum merupakan bagian penting dari rehabilitasi (Audah, 1992).

Selain itu, pembinaan keagamaan juga diintegrasikan dengan rekonsiliasi keluarga (***islah***), yang meliputi beberapa aspek.

a) peningkatan komunikasi keluarga, yaitu menekankan komunikasi efektif, musyawarah, dan sikap saling memaafkan antaranggota keluarga (Shihab, 2002).

b) penguatan dukungan moral dan emosional, di mana narapidana belajar menerima dukungan moral dari keluarga dan memberikan respons positif untuk memulihkan hubungan emosional (Asshiddiqie, 2014).
c) persiapan reintegrasi sosial, yang mengajarkan pentingnya memaafkan, bersikap toleran, dan membangun lingkungan sosial yang kondusif pasca-pembebasan (Ibn Taimiyah, 1991).

Dengan integrasi taubat restoratif dan islah, materi pembinaan keagamaan bersifat holistik, mencakup penguatan spiritual, pembentukan karakter moral, pemulihan hubungan sosial, dan pemulihan relasi keluarga. Pendekatan ini menyiapkan narapidana agar mampu menjalani kehidupan yang harmonis dan produktif bersama keluarga dan masyarakat setelah bebas.

Dengan menjalankan pembinaan keagamaan ini maka diharapkan implikasi dari pembinaan tersebut terhadap keutuhan rumah tangga narapidana residivis adalah sebagai berikut:

a. Transformasi dari "Beban" Menjadi "Subjek yang Bertanggung Jawab Implikasi: Pembinaan berbasis *Taubat Restoratif* mengubah mental narapidana dari sekadar "orang hukuman yang pasrah" menjadi "kepala keluarga yang sadar kesalahan". Dampak pada Keluarga: Ketika istri melihat suami (narapidana) menunjukkan penyesalan yang tulus bukan hanya karena dipenjara, tetapi karena merasa bersalah telah menelantarkan keluarga (*an-nadam*), hal ini memulihkan rasa hormat dan kepercayaan istri yang sempat hilang.
b. Mencegah Perceraian melalui Validasi Emosional (*Islah*) Implikasi: Proses *Islah* (rekonsiliasi) membuka sumbatan komunikasi. Banyak istri residivis menggugat cerai karena merasa diabaikan dan lelah menanggung malu sendiri. Dampak pada Keluarga: Dengan adanya fasilitasi *Islah* dalam pembinaan, keluhan istri didengar dan divalidasi oleh suami. Proses saling memaafkan (*forgiveness*) ini menjadi *barrier* (penghalang) terjadinya perceraian, sehingga struktur keluarga tetap utuh meskipun suami masih di dalam penjara.
c. Penguatan "Support System" untuk Mencegah Residivisme, Implikasi: Keutuhan rumah tangga bukan hanya tujuan akhir, tapi juga alat.

Pembinaan ini menjadikan keluarga sebagai mitra pengawasan. Dampak pada Keluarga: Keluarga yang telah direkonsiliasi akan menjadi benteng pertahanan. Istri yang "merangkul kembali" suami akan memberikan dukungan moral yang kuat, sehingga suami memiliki motivasi ganda untuk tidak kembali menggunakan narkoba atau melakukan kejahatan (residivis) demi menjaga amanah keluarga yang telah dipulihkan

3) Tujuan Pembinaan Keagamaan

Beranjak dari pengertian dan problem pembinaan keagamaan, maka tujuan dari Pembinaan agama Islam tersebut memiliki berbagai tujuan yang bermanfaat. Tujuan dilaksanakannya pembinaan Agama Islam, yaitu sebagai berikut:

a. Membantu individu atau seseorang untuk mengetahui, mengenal, dan memahami keadaan dirinya sendiri serta untuk mengingatkan individu terhadap *fitrahnya*.

Fitrah dalam hlm ini adalah *fitrah* ketauhidan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surat ar-Rum ayat 30, Yang berbunyi :

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًاۗ فِطْرَتَ ەاللّٰ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَاۗ لَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ ەاللّٰۗ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَ يَعْلَمُوْنَۙ ٣۝

مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَ تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَۙ ٣۝

Artinya : " Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (30), Dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah(31)" (QS. Ar − Rum : 30-31).

b. Membantu individu atau seseorang untuk menerima dirinya, yaitu menerima segala kekurangan dan kelebihan. Kelemahan yang ada bukan untuk disesali, akan tetapi dijadikan motivasi umtuk menjadi yang lebih baik. Artinya pembinaan agama Islam tersebut dapat membantu seseorang untuk tetap bertawakal kepada Allah SWT.

c. Membantu individu atau seseorang untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi
d. Membantu individu atau seseorang untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. (Munir: 2009:6)

B. KAJIAN PENELITIAN YANG RELEVAN

Pertama, Penelitian tentang Pembinaan Keagamaan Konvensional di Lembaga Pemasyarakatan Penelitian oleh Ahmad dkk. (2021) yang berjudul "Efektivitas Pembinaan Keagamaan dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan". Penelitian ini mengkaji bagaimana rutinitas ibadah, seperti pengajian dan salat berjamaah, memengaruhi tingkat kedisiplinan narapidana. Hasil Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa pembinaan keagamaan efektif dalam meningkatkan kepatuhan narapidana terhadap tata tertib Lapas dan memenuhi instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) demi mendapatkan remisi. Celah Analisis (Gap Analysis) penelitian ini memiliki kelemahan karena bersifat seragam (one-size-fits-all) dan tidak membedakan kurikulum pembinaan antara narapidana pemula dan narapidana residivis. Selain itu, parameter keberhasilan hanya diukur dari "kesalehan ritual" di dalam sel, tanpa menyentuh aspek perbaikan hubungan sosial narapidana dengan masyarakat di luar tembok penjara. Di sinilah tesis ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

Kedua, Penelitian tentang Tinjauan Kriminologis Stigmatisasi Mantan Narapidana, kajian sosiologi hukum oleh Susanti (2022) berjudul "Analisis Kriminologis Stigmatisasi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana dan Implikasinya Terhadap Residivisme". Hasil temuan Penelitian ini membuktikan secara empiris bekerjanya Labeling Theory. Mantan narapidana yang ditolak oleh masyarakat dan keluarganya akan mengalami frustrasi sosial, yang pada akhirnya

mendorong mereka melakukan penyimpangan sekunder (secondary deviance) atau kembali berbuat kejahatan. Celah Analisis (Gap Analysis) penelitian ini sangat tajam dalam membedah "akar masalah" (kausalitas) terjadinya residivisme, namun murni berhenti pada diagnosis kriminologi tanpa menawarkan solusi penyelesaian. Tesis ini mengambil pijakan dari temuan sosiologis tersebut, untuk kemudian menawarkan "obat penawar" berupa pelembagaan mediasi keluarga (ishlah) dari perspektif Hukum Keluarga Islam.

Ketiga, penelitian tentang Implementasi Hukum Keluarga Islam dalam Ranah Perdata dalam penelitian tesis oleh Rahman (2020) yang berjudul "Implementasi Konsep Ishlah dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama". Hasil Temuan: Menguraikan bahwa ishlah (mediasi perdamaian) adalah instrumen syariat yang paling esensial yang diwajibkan oleh Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 128) untuk memulihkan hubungan suami istri agar terhindar dari disolusi perkawinan (fasakh/thalaq). Celah Analisis (Gap Analysis) konsep ishlah dalam penelitian tersebut masih terkungkung pada yurisdiksi perdata murni (Pengadilan Agama).

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nisa: 128)

Tesis ini melakukan lompatan kebaruan (novelty) dengan

mengekstensifikasi (memperluas) penggunaan teori ishlah dari sekadar pencegah perceraian, menjadi instrumen Restorative Justice dalam sistem pemasyarakatan pidana guna menyembuhkan trauma keluarga narapidana.

Keempat, penelitian tentang Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, Kajian normatif oleh Santoso (2023) berjudul "Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022". Hasil Temuan Menyimpulkan bahwa paradigma pemenjaraan telah bergeser pada upaya reintegrasi sosial, di mana negara menjamin hak kerohanian narapidana sebagai bagian dari proses asimilasi agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat. Celah Analisis (Gap Analysis), karena berfokus pada kajian dogmatik hukum (legal-formal), penelitian ini gagal memotret anomali empiris di lapangan. Tesis ini melengkapi kajian normatif tersebut dengan observasi empiris di wilayah Rutan Kelas IIB Sungai Penuh, dengan menyoroti fakta bahwa keadilan restoratif sulit dicapai secara nyata jika tidak diintervensi menggunakan pendekatan adat dan agama lokal.

Kelima, Penelitian tentang Maqashid Syariah dan Pencegahan Kejahatan, Penelitian oleh Amelia (2021) dengan judul "Fungsi Hifdz Al-Nasl dalam Mencegah Kenakalan Remaja Perspektif Maqashid Syariah". Hasil temuan mengkonfirmasi bahwa pelindungan keturunan (Hifdz Al-Nasl) bukan sekadar larangan biologis, melainkan kewajiban orang tua untuk menjaga ikatan emosional dan pendidikan moral anak agar terhindar dari pergaulan bebas dan tindak pidana. Celah Analisis (Gap Analysis): Kajian ini memosisikan keluarga sebagai instrumen "pencegahan primer" (sebelum terjadinya kejahatan). Kebaruan dari tesis ini adalah menarik konsep Hifdz Al-Nasl ke fase paska-ajudikasi (setelah putusan pengadilan), menjadikannya sebagai alat analisis untuk memulihkan ikatan keluarga yang telah hancur akibat proses pemenjaraan

C. KERANGKA PIKIR TESIS

Kerangka pikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan adanya kesenjangan (*gap*) antara realitas empiris di lapangan (*Das Sein*) dengan kondisi ideal yang diamanatkan oleh konstitusi dan syariat (*Das Sollen*). Titik tolak penelitian ini bermula dari sebuah paradoks sosiologis di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh. Di satu sisi, masyarakat Sungai Penuh memegang teguh filosofi adat dan agama yang kuat; namun di sisi lain, tingginya stigmatisasi justru menyebabkan mantan narapidana mengalami penolakan sosial, kehilangan *support system* dari institusi keluarga, dan akhirnya terdorong kembali melakukan kejahatan (menjadi residivis).

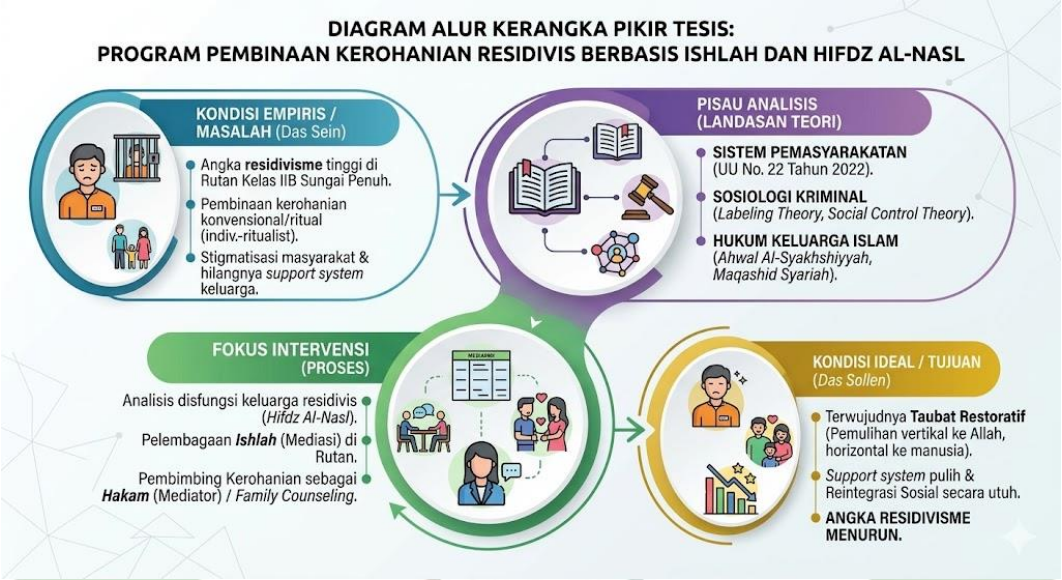
Menghadapi tingginya angka residivisme tersebut, program pembinaan kerohanian di Rutan saat ini dinilai belum efektif karena masih bersifat asimetris dan *individualistik-ritualistik*. Kurikulum yang diselenggarakan belum mendiferensiasikan kebutuhan psikososial antara narapidana baru dengan narapidana residivis, serta belum menyentuh aspek pemulihan hubungan sosial narapidana dengan keluarganya.

Untuk memecahkan kebuntuan tersebut, penelitian ini menggunakan tiga pisau analisis utama yang saling beririsan:

1. Teori Sosiologi Kriminal (*Labeling Theory* dan *Social Control Theory*) untuk membedah bagaimana putusnya ikatan keluarga (*attachment*) memicu kejahatan berulang.
2. Keadilan Restoratif (UU No. 22 Tahun 2022) untuk melegitimasi bahwa tujuan pemasyarakatan adalah reintegrasi sosial yang utuh.
3. Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyyah*) sebagai *Grand Theory* dan instrumen intervensi utama.

Melalui Hukum Keluarga Islam, penelitian ini menganalisis fenomena residivisme sebagai wujud kegagalan pelindungan keluarga (*Hifdz Al-Nasl*). Sebagai solusinya, penelitian ini mengonstruksikan pelembagaan Ishlah (Mediasi Perdamaian). Otoritas Rutan dan Pembimbing Kerohanian didorong untuk bertransformasi menjadi *Hakam* (mediator) yang memfasilitasi rekonsiliasi antara narapidana residivis dengan keluarganya. Melalui pergeseran dari "Taubat Ritual" menuju "Taubat Restoratif" ini, diharapkan

ikatan keluarga dapat dipulihkan, narapidana memiliki *support system* saat bebas, sehingga pada akhirnya siklus residivisme di wilayah Sungai Penuh dapat diputus secara holistik.



Gambar 1. Diagram Alur

KONDISI EMPIRIS / MASALAH (*DAS SEIN*)

- Tingginya angka residivisme di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh.
- Pembinaan kerohanian masih bersifat seragam, konvensional, dan *individual-ritualistik* (hanya fokus pada ibadah *mahdhah* di dalam sel).
- Narapidana residivis kehilangan *support system* akibat stigmatisasi masyarakat dan hancurnya ikatan keluarga pasca-pemenjaraan.

↓

PISAU ANALISIS / LANDASAN TEORI

1. Sistem Pemasyarakatan: Keadilan Restoratif & UU No. 22 Tahun 2022.
2. Sosiologi Kriminal: *Labeling Theory* (Pelabelan) & *Social Control Theory* (Putusnya Ikatan Sosial).
3. Hukum Keluarga Islam: *Ahwal Al-Syakhshiyyah* & Epistemologi *Maqashid Syariah*.

↓

FOKUS INTERVENSI (PROSES)

- Menganalisis disfungsi keluarga residivis melalui konsep Hifdz Al-Nasl (Pelindungan Keturunan).
- Mengintegrasikan konsep Ishlah (Rekonsiliasi/Mediasi) ke dalam kurikulum Rutan.
- Menjadikan Pembimbing Kerohanian sebagai *Hakam* (Mediator) melalui program *Family Counseling*.

↓

KONDISI IDEAL / TUJUAN (*DAS SOLLEN*)

- Terwujudnya konsep Taubat Restoratif (Pemulihan vertikal kepada Allah dan horizontal kepada keluarga).
- Pulihnya *support system* dan tercapainya Reintegrasi Sosial secara utuh.
- Menurunnya Angka Residivisme di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Mardalis dalam Joko Subagyo (2013:2) metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Penelitian adalah usaha yang dilakukan menggunakan metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab suatu problem. Jadi, metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan.

Metode penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang berusaha membuat deskripsi dari fenomena yang diselidiki dengan cara melukiskan dan mengklasifikasikan karakteristik fenomena tersebut secara naratif, faktual dan cermat, kemudian menuangkannya dalam bentuk kesimpulan.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya untuk menjelaskan masalah-masalah yang aktual, yakni masalah yang sedang terjadi atau masalah yang muncul pada saat sekarang.oleh sebab itu masalah yang layak diteliti dengan metode deskriptif, adalah masalah yang relevan, baik masalah yang mengandung aspek yang banyak, maupun masalah yang mengandung satu aspek saja yang mungkin hanya berupa kasus tunggal. Wina Sanjaya (2013:60).

Penelitian deskriptif ini menggunakan metode penelitian lapangan. Dalam metode penelitian deskriptif yang digunakan untuk memperoleh dan memaparkan data dari gejala-gejala yang ada serta menemukan keterangan-keterangan faktual tentang berbagai masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Wina Sanjaya (2013:67).

Jadi sifat penelitian ini adalah deskriptif dan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Sungai Penuh, Jambi.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokus (lokasi) utama yang dijadikan tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sungai Penuh, yang beralamat di Jl. Teuku Umar No.1, Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Rutan Kelas IIB Sungai Penuh merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan utama yang menyelenggarakan program pembinaan keagamaan dan kerohanian bagi narapidana di wilayah Sungai Penuh dan Kerinci. Hal ini menjadikannya lokus primer yang relevan untuk memotret realitas implementasi program pembinaan tersebut, khususnya bagi kelompok narapidana residivis, guna menganalisisnya dari perspektif Hukum Keluarga Islam.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, terhitung mulai dari tahapan persiapan hingga tahap akhir berupa ujian tesis (munaqasyah). Adapun draf rentang waktu pelaksanaan penelitian tesis ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Bulan I	Bulan II	Bulan III
1	Penyusunan dan pengajuan proposal penelitian	✓		
2	Seminar proposal dan revisi proposal	✓		
3	Pengurusan penelitian	✓		
4	Penyusunan instrumen penelitian (pedoman wawancara dan observasi)	✓		
5	Pengumpulan data (wawancara, observasi, dokumentasi)		✓	
6	Reduksi dan penyajian data awal		✓	
6.1	Analisis data			✓
6.2	Penarikan kesimpulan dan verifikasi data			✓
6.3	Penyusunan laporan penelitian (tesis)			✓

No	Tahapan Penelitian	Bulan I	Bulan II	Bulan III
6.4	Konsultasi dan revisi akhir			✓
7	Penyelesaian revisi laporan dan sidang			✓

C. Subjek dan Informan Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam tesis ini adalah pihak-pihak yang menjadi pusat pengamatan dan analisis peneliti terkait implementasi program pembinaan. Subjek penelitian ini terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu:

a. Subjek Implementor (Pelaksana Kebijakan): Adalah institusi dan pejabat struktural di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh yang bertanggung jawab penuh dalam merencanakan, mengeksekusi, dan mengevaluasi program pembinaan keagamaan dan kerohanian restoratif. Subjek ini difokuskan pada:
   - Kepala Rutan Kelas IIB Sungai Penuh.
   - Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan (Kasubsi Yantah).
   - Petugas staf Pembimbing Kerohanian/Wali Pemasyarakatan yang bertugas memfasilitasi program mediasi *ishlah*.

b. Subjek Sasaran Pembinaan (Narapidana Residivis): Adalah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang memiliki status hukum sebagai residivis (telah mengulangi tindak pidana) di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh. Peneliti memfokuskan pengamatan pada perilaku, respons, dan tingkat keberterimaan residivis terhadap kurikulum pembinaan kerohanian restoratif, khususnya yang melibatkan aspek mediasi dengan keluarga.

2. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu-individu yang bertindak sebagai sumber informasi primer atau kunci (*key informants*) yang memberikan keterangan, data, dan perspektif mendalam mengenai bagaimana program pembinaan tersebut berjalan. Informan penelitian dalam tesis ini ditentukan sebagai berikut:

a. Informan Kunci (*Key Informants*) dari Pihak Rutan: Adalah petugas yang memiliki autoritas dan pengetahuan mendalam mengenai kebijakan dan

SOP pembinaan.

- Kepala Rutan Kelas IIB Sungai Penuh: Berperan memberikan informasi kebijakan makro, visi-misi Rutan, dan evaluasi implementasi program restoratif.
- Kasubsi Pelayanan Tahanan: Berperan memberikan data teknis kurikulum pembinaan, statistik residivis, dan mekanisme kerja Pembimbing Kerohanian.
- Pembimbing Kerohanian (Fasilitator Mediasi): Berperan sebagai narasumber utama terkait praktik mediasi *ishlah* dengan keluarga, kendala psikologis residivis, dan dinamika proses perdamaian berbasis keluarga.

b. Informan Utama (*Main Informants*) dari Pihak Residivis: Adalah narapidana residivis yang dipilih secara *purposive* untuk diwawancarai secara mendalam mengenai persepsi, trauma sosial, penolakan keluarga, serta dampak nyata program pembinaan restoratif terhadap kesadaran mereka untuk tidak mengulangi kejahatan. Jumlah residivis yang menjadi informan akan disesuaikan dengan prinsip saturasi data (data jenuh).

c. Informan Penunjang (*Supporting Informants*) dari Unsur Keluarga: Karena tesis ini menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam (*Hifdz Al-Nasl*), keterlibatan informan keluarga sangatlah krusial. Peneliti akan mewawancarai anggota keluarga inti (istri, orang tua, atau anak) dari narapidana residivis yang dilibatkan dalam program mediasi *ishlah*. Mereka akan memberikan data mengenai tingkat stigmatisasi, pemaafan, kesiapan menerima kembali narapidana, dan pemulihan fungsi keluarga.

d. Informan Tambahan (*Additional Informants*) dari Tokoh Agama Mitra: Adalah da'i, ustadz, atau penyuluh agama (misalnya dari Kemenag Sungai Penuh/Kerinci) yang menjadi mitra Rutan dalam memberikan materi bimbingan kerohanian. Mereka dimintai informasi mengenai muatan materi restoratif yang diberikan dan relevansinya dengan doktrin *Hifdz Al-Nasl* dan *Ishlah*.

D. Sumber Data

Sugiyono (2017:70) menyebutkan terdapat dua macam sumber data dalam penelitian kualitatif yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti secara langsung melalui interaksi empiris dengan para informan kunci di lokus Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sungai Penuh, yang meliputi wawancara mendalam dengan pihak otoritas Rutan seperti Kepala Rutan, Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan, serta petugas pembimbing kerohanian yang bertindak sebagai fasilitator mediasi, dan juga wawancara serta observasi langsung terhadap perilaku dan respons narapidana residivis yang menjadi subjek pembinaan, serta anggota keluarga mereka yang dilibatkan dalam program mediasi *ishlah* untuk memulihkan fungsi keluarga.
2) Sementara itu, data sekunder dikumpulkan peneliti melalui studi dokumen dan pustaka untuk memperkuat, melengkapi, dan memberikan kerangka teoretis terhadap temuan di lapangan, yang mencakup bahan hukum primer seperti Al-Qur'an dan Hadis terkait ayat *ishlah* dan *maqashid syariah*, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan didukung oleh bahan hukum sekunder berupa profil Rutan, dokumen administrasi, kurikulum pembinaan restoratif, statistik residivis, serta literatur-literatur ilmiah dalam bentuk buku dan jurnal yang relevan dengan kriminologi, hukum keluarga Islam, dan praktik *Restorative Justice*.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci yang terjun langsung ke lapangan, didukung oleh alat bantu pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pedoman Observasi: Berupa panduan untuk mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dan pengamatan langsung terhadap kegiatan proses pembinaan keagamaan yang sedang berlangsung.

2. Pedoman Wawancara: Berupa pokok-pokok masalah yang disusun oleh pewawancara sebelum turun ke lapangan. Pedoman ini digunakan agar proses wawancara bebas terpimpin tetap terarah dan tidak menyimpang dari topik permasalahan.
3. Dokumentasi Tersurat: Berupa alat pengumpul data melalui catatan-catatan penting, dokumen tertulis, dan arsip foto yang sah untuk merekam informasi faktual.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari lapangan dalam kegiatan penelitian ini penulis menggunakan metode observasi, metode interview, dan metode dokumentasi.

Dalam penelitian kualitatif sosio-legal ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang saling melengkapi (*triangulasi teknik*). Pemilihan teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam, valid, serta untuk menguji keabsahan temuan di lapangan dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber dan metode. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data primer yang paling utama dalam penelitian ini. Peneliti melakukan interaksi langsung berupa tanya jawab terstruktur dan semi-terstruktur kepada para informan kunci (*key informants*) yang telah ditentukan secara purposif sampling. Teknik ini bertujuan untuk mengungkap persepsi, motif, pengalaman, trauma sosial, serta kendala psikologis residivis yang tidak terlihat melalui pengamatan fisik (Moleong, 2021: 186).

Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) sebagai instrumen bantu, namun tetap memberikan kebebasan bagi informan untuk mengeksplorasi jawabannya secara mendalam. Wawancara ini difokuskan pada:

a) Otoritas Rutan Sungai Penuh: Mengenai visi kebijakan restoratif,

mekanisme pembinaan, kendala struktural, dan perspektif mereka mengenai pelembagaan *ishlah* dengan keluarga residivis.

b) Narapidana Residivis: Mengenai persepsi mereka terhadap stigma, dinamika penolakan keluarga, serta keberterimaan mereka terhadap kurikulum bimbingan kerohanian berbasis *ishlah* dan *Hifdz Al-Nasl*.

c) Anggota Keluarga Residivis: Mengenai tingkat stigmatisasi dari masyarakat, trauma paska-pemenjaraan, proses pemaafan, dan kesiapan untuk menerima kembali serta memulihkan ikatan nasab/keluarga.

2. Observasi Partisipatif-Pasif (*Participant-Observation*)

Teknik kedua adalah observasi, yaitu pengamatan secara langsung dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena, interaksi sosial, dan perilaku yang terjadi di lokus penelitian (Rutan Kelas IIB Sungai Penuh). Peneliti menerapkan observasi partisipatif-pasif, di mana peneliti hadir di tempat penelitian, tetapi tidak ikut serta secara aktif dalam kegiatan yang sedang berlangsung (Sugiyono, 2019: 310). Peneliti hanya bertindak sebagai pengamat (asimilasi pasif).

Observasi ini difokuskan pada tiga objek pengamatan utama:

a) Observasi Implementasi Program: Mengamati secara langsung proses pelaksanaan program bimbingan kerohanian, materi restoratif yang diberikan oleh Tokoh Agama Mitra, serta interaksi Pembimbing Kerohanian Rutan saat memfasilitasi *Family Counseling* berbasis *ishlah*.

b) Observasi Perilaku Residivis: Mengamati perilaku, respon emosional, dan kedisiplinan residivis selama mengikuti program pembinaan, khususnya saat mereka berinteraksi dengan keluarga dalam sesi mediasi.

c) Observasi Kondisi Rutan: Mengamati fasilitas dan ekosistem bimbingan kerohanian yang tersedia di Rutan. Peneliti mencatat temuan ini dalam *field notes* (catatan lapangan) untuk cross-

check dengan data wawancara.

3. Studi Dokumentasi

Teknik ketiga adalah studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari, menganalisis, dan mencatat dokumen, arsip, regulasi, dan pustaka yang relevan dengan topik tesis. Studi dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat, melengkapi, dan memberikan kerangka normatif terhadap data primer yang ditemukan di lapangan.

Adapun dokumen yang dikumpulkan dan dianalisis dalam tesis ini meliputi:

a) Dokumen Regulasi/Normatif (Hukum Primer): Al-Qur'an dan Hadis (terkait ayat *ishlah* dan *Hifdz Al-Nasl*), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta Permenkumham/SOP internal Ditjenpas mengenai pembinaan restoratif.

b) Dokumen Administrasi/Empiris (Hukum Sekunder): Dokumen profil Rutan Kelas IIB Sungai Penuh, kurikulum dan modul bimbingan kerohanian restoratif, statistik demografi residivis, serta literatur-literatur ilmiah dalam bentuk buku dan jurnal yang relevan dengan sosiologi kriminologi, hukum keluarga Islam, dan *Restorative Justice*

G. Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, penelitian ini melakukan langkah verifikasi secara berkelanjutan di lapangan.

- Kredibilitas Wawancara: Pada saat proses wawancara berlangsung, peneliti langsung melakukan analisis awal terhadap jawaban responden; apabila jawaban dirasa belum memuaskan, peneliti akan terus melanjutkan pertanyaan hingga memperoleh data yang dianggap kredibel.

- Verifikasi Konsistensi: Kesimpulan awal yang ditarik masih bersifat sementara dan akan terus diuji. Kesimpulan tersebut baru dinyatakan sebagai kesimpulan yang kredibel apabila didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data.

H. Teknik Analisis Data

Menganalisis data sangat diperlukan dalam sutu penelitian, yaitu untuk memberikan makna pada data yang tersedia sehingga orang lain yang melihat dan membacanya dapat dengan mudah memahaminya. Teknik analisis data adalah pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola, kategori dan satuan urutan dasar sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan. Meleong (2002:76).

Menurut Miles dan Huberman, analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data dianggap kredibel. Sugiyono (2016:369).

Kemudian Miles dan Huberman membagi aktivitas dalam menganalisis data menjadi tiga yaitu :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

   Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujun yang akan dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus di jadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

   Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan

reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori signifikan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *phie chart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola buhungan, sehingga akan semakin mudah di pahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain degan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matriks, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Hubeman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tehap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dapat

diwujudkan dengan tema.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih berdifat sementara dan akan berkembang stelah penelitian berada di lapangan.

Dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa perbandingan berbagai kategori dan dapat berupa hubungan kausal, interaktif, dan hubungan struktural (hubungan jalur, atau variabel intervening satu atau lebih). Sugiyono (2016:375).

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut Miles dan Huberman dalam teknik analasis data dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu, *reduksi data, display data, dan verification* agar penelitian kualitatif deksriptif bisa dilakukan dengan benar dan tepat. Dan hasil yang didapat sesuai dengan apa yang diinginkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

Bagian ini menyajikan deskripsi komprehensif mengenai realitas empiris yang ditemukan oleh peneliti selama melakukan pengumpulan data di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sungai Penuh. Pada tahapan pemaparan awal ini, deskripsi hasil penelitian difokuskan pada analisis data yang bersumber dari observasi partisipatif-pasif dan studi dokumentasi institusional. Pemaparan dibagi ke dalam beberapa klasifikasi temuan, mulai dari kondisi objektif institusi, struktur kurikulum pembinaan, hingga pemotretan realitas sosiologis narapidana residivis dan keluarganya dari kacamata Hukum Keluarga Islam.

1. Kondisi Objektif dan Demografi Narapidana Residivis di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh

   Secara administratif dan yurisdiksional, Rutan Kelas IIB Sungai Penuh beroperasi di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi, yang mewadahi subjek hukum pelanggar pidana dari wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Berdasarkan telaah terhadap Dokumen Register Tahanan dan Narapidana pada kuartal pertama tahun pelaksanaan penelitian, ditemukan fakta bahwa Rutan ini beroperasi dalam kondisi overcrowding (kelebihan kapasitas hunian). Kondisi demografis yang padat ini secara langsung memengaruhi rasio ideal antara petugas pembina dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang berimplikasi pada efektivitas pengawasan dan bimbingan individual (Ditjenpas, 2023: 12).

   Di tengah padatnya populasi tersebut, peneliti melakukan pemetaan spesifik terhadap entitas narapidana residivis. Berdasarkan buku register perkara, narapidana residivis di Rutan ini didominasi oleh pelaku tindak pidana narkotika, pencurian dengan pemberatan (curat), dan penggelapan. Secara klasifikasi penempatan, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa tidak ada segregasi (pemisahan) blok hunian yang absolut antara

narapidana pemula (first-time offenders) dengan narapidana residivis. Kebijakan asimilasi ruang ini, secara kriminologis, berpotensi menciptakan ruang transmisi nilai-nilai kriminogenik, di mana residivis dapat bertindak sebagai agen penularan sub-kultur kejahatan kepada narapidana baru (Sahetapy, 2013: 58).

Lebih lanjut, telaah terhadap data administrasi Assessment Risiko dan Kebutuhan (yang diisi saat narapidana baru masuk) menunjukkan bahwa mayoritas residivis tercatat memiliki status perkawinan yang rentan. Sebagian besar masuk dengan status menikah, namun memiliki catatan ketidakharmonisan keluarga yang dipicu oleh rekam jejak kriminal mereka sebelumnya. Data dasar ini menjadi landasan penting untuk membedah lebih jauh bagaimana fungsi keluarga (Hifdz Al-Nasl) beroperasi—atau justru lumpuh—selama masa pembinaan berlangsung.

2. Mekanisme dan Kurikulum Pelaksanaan Program Pembinaan Keagamaan

Sebagai institusi yang mengemban amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Rutan Kelas IIB Sungai Penuh secara aktif menyelenggarakan program bimbingan kepribadian dengan titik berat pada pembinaan kerohanian dan keagamaan. Berdasarkan telaah terhadap Rencana Kerja Tahunan dan Jadwal Kegiatan Harian Sub Seksi Pelayanan Tahanan, program pembinaan keagamaan Islam telah terstruktur dalam rutinitas yang ketat.

Hasil observasi peneliti terhadap pelaksanaan kegiatan sehari-hari mencatat beberapa instrumen pembinaan yang berjalan, di antaranya: (a) kewajiban pelaksanaan salat fardu berjamaah di masjid Rutan, (b) program pemberantasan buta huruf Al-Qur'an (Iqra) hingga kelas tahsin bagi yang sudah lancar, (c) pembacaan Surah Yasin secara komunal setiap malam Jumat, dan (d) penyelenggaraan tausiyah (ceramah agama) tematik yang rutin diisi oleh penyuluh agama dari Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh/Kerinci selaku mitra kerja sama institusional.

Berdasarkan tinjauan terhadap instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang digunakan oleh Wali Pemasyarakatan, evaluasi pembinaan sangat menitikberatkan pada aspek kuantitatif. Narapidana, termasuk residivis, dinilai memiliki "Perkembangan Baik" apabila mereka secara konsisten mengisi presensi kehadiran di masjid dan tidak melakukan pelanggaran tata tertib (SOP Ditjenpas No. PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021). Kurikulum ini merepresentasikan penerapan model "Taubat Ritual", di mana perbaikan karakter diukur dari kepatuhan menjalankan ibadah mahdhah.

Namun, dari hasil telaah dokumen kurikulum tersebut, peneliti tidak menemukan adanya pembedaan modul materi (differentiated instruction) antara narapidana pemula dan residivis. Materi pembinaan bersifat universal dan mengasumsikan bahwa seluruh narapidana mengalami kekosongan spiritual yang sama. Bagi residivis yang pada dasarnya telah terpapar rutinitas ibadah pada masa hukuman sebelumnya, pengulangan materi dasar ini cenderung direspons sebagai sekadar rutinitas administratif demi menggugurkan kewajiban untuk mendapatkan hak remisi, bukan sebagai proses transformasi batin yang fundamental.

3. Observasi Dinamika Psikososial dan Kepatuhan Narapidana Residivis

Untuk melengkapi data dokumenter, peneliti melakukan serangkaian observasi partisipatif-pasif terhadap perilaku dan interaksi sosial narapidana residivis selama mengikuti program pembinaan keagamaan. Secara kasat mata, tingkat kepatuhan residivis dalam mengikuti jadwal salat berjamaah atau pengajian tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan narapidana lain. Mereka hadir secara fisik dan mematuhi tata tertib yang berlaku di dalam Rutan.

Akan tetapi, observasi yang lebih presisi pada momen-momen di luar jadwal ibadah formal (seperti saat berada di lapangan atau jam luang di selasar blok) memperlihatkan dinamika psikososial yang berbeda. Residivis cenderung menampilkan bahasa tubuh yang lebih tertutup dan membangun barrier (dinding pembatas) sosial. Mereka lebih sering

berinteraksi secara intens dalam kelompok-kelompok kecil (klik) yang diisi oleh sesama residivis. Dalam kacamata Social Control Theory (Hirschi, 2002: 20), kecenderungan isolasi dan pembentukan klik ini merupakan kompensasi dari hilangnya ikatan kasih sayang (attachment) dari masyarakat dan keluarga di dunia luar. Karena mereka merasa ditolak oleh masyarakat konvensional akibat label "mantan narapidana", mereka mencari validasi eksistensi dan dukungan emosional dari kelompok yang tidak akan menghakimi masa lalu mereka, yakni sesama pelanggar hukum.

4. Realitas Disfungsi Keluarga (Hifdz Al-Nasl) Berdasarkan Telaah Dokumen Kunjungan

   Salah satu temuan paling krusial dalam tahapan pengumpulan data non-wawancara ini didapatkan melalui analisis terhadap Buku Register Layanan Kunjungan WBP dan Layanan Penitipan Barang Rutan Kelas IIB Sungai Penuh. Data registrasi kunjungan ini dijadikan sebagai indikator kuantitatif untuk mengukur tingkat kepedulian, penerimaan, dan berfungsinya ikatan Hifdz Al-Nasl (pelindungan nasab/keluarga) terhadap narapidana.

   Hasil tabulasi data kunjungan selama tiga bulan masa observasi menunjukkan disparitas (kesenjangan) yang sangat ekstrem. Narapidana pemula umumnya menerima kunjungan fisik atau kiriman barang/makanan dari keluarga inti (istri, orang tua, atau anak) secara rutin, setidaknya satu hingga dua kali dalam sebulan. Sebaliknya, frekuensi kunjungan terhadap narapidana residivis mengalami penurunan yang drastis. Berdasarkan buku register, sebagian besar residivis tercatat tidak pernah menerima kunjungan fisik dari anggota keluarga inti sejak bulan pertama masa penahanan mereka kembali. Beberapa di antaranya hanya menerima kiriman barang yang dititipkan di pos penjagaan bagian depan tanpa disertai pertemuan tatap muka.

   Fenomena administratif ini merupakan manifestasi empiris dari secondary victimization (viktimisasi sekunder) dan frustrasi sosial yang dialami oleh keluarga (Mulyadi, 2021: 94). Hancurnya reputasi

keluarga, tekanan ekonomi akibat hilangnya pencari nafkah, dan aib sosial yang ditanggung berulang kali di tengah masyarakat beradat, mendorong institusi keluarga untuk menjatuhkan "sanksi sosial" berupa pengabaian (abandonment). Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, putusnya akses kunjungan ini bukan sekadar persoalan logistik, melainkan indikasi kuat terjadinya disfungsi Hifdz Al-Nasl. Institusi keluarga yang sejatinya difilosofikan sebagai ruang sakinah dan sistem kontrol utama untuk mencegah kejahatan, telah mencabut dukungannya. Narapidana residivis dibiarkan menghadapi masa krisisnya sendirian, yang bermuara pada keputusasaan emosional yang menggerus makna dari seluruh ibadah ritual yang mereka kerjakan di dalam masjid Rutan.

5. Tinjauan Institusional terhadap Pelembagaan Mediasi (Ishlah) dalam Kurikulum

Berangkat dari temuan mengenai tingginya tingkat pengabaian keluarga terhadap residivis, peneliti melakukan tinjauan lebih lanjut terhadap instrumen struktural Rutan untuk melihat upaya penanggulangan masalah tersebut. Berdasarkan penelusuran terhadap Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Bimbingan Kepribadian dan Rencana Kerja Sub Seksi Pelayanan Tahanan, peneliti tidak menemukan adanya klausul, jadwal, maupun pedoman resmi yang mengamanatkan penyelenggaraan program mediasi keluarga (Family Counseling atau Ishlah).

Kurikulum pembinaan kerohanian yang terlembagakan secara resmi murni bersifat satu arah (vertikal ke Tuhan) dan belum menyentuh domain resolusi konflik secara horizontal (pemulihan hubungan dengan manusia). Meskipun ruang kunjungan fisik tersedia, otoritas institusi belum memosisikan diri sebagai Hakam (mediator aktif) yang diwajibkan secara struktural untuk memanggil pihak keluarga, memberikan edukasi moral pemaafan, dan menjembatani

rekonsiliasi agar narapidana residivis dapat diterima kembali (Mubarok, 2019: 77).

Kekosongan instrumen ishlah secara formal ini mengonfirmasi bahwa ekosistem pemasyarakatan saat ini masih mengalami hambatan dalam mengejawantahkan filosofi keadilan restoratif secara paripurna. Tanpa adanya pelembagaan mediasi, pembinaan kerohanian berpotensi kehilangan daya ikatnya ketika narapidana residivis dibebaskan kelak, karena mereka akan kembali menghadapi gerbang rumah yang terkunci dan struktur sosial yang tetap memusuhi mereka.

6. Ekosistem Pemasyarakatan dan Demografi Narapidana Residivis

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sungai Penuh merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah yurisdiksi Kanwil Ditjenpas Jambi. Secara ekologis dan sosiokultural, institusi ini berdiri di tengah masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci yang memiliki fondasi filosofi *adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*. Karakteristik demografis masyarakat luar yang religius ini paradoks dengan kompleksitas masalah yang terjadi di dalam tembok rutan, di mana tingkat pelanggaran hukum, khususnya kejahatan berulang (residivisme), terus menunjukkan dinamika yang fluktuatif.

Untuk memahami bagaimana program pembinaan keagamaan beroperasi, peneliti terlebih dahulu membedah ekosistem fisik dan administratif rutan. Berdasarkan studi dokumentasi terhadap Buku Register Tahanan dan Narapidana per kuartal pertama tahun pelaksanaan penelitian, ditemukan fakta empiris bahwa Rutan Kelas IIB Sungai Penuh beroperasi dalam kondisi *overcrowding* (kelebihan kapasitas hunian). Rasio antara jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan petugas pengamanan dan pembina tidak mencapai titik ideal.

Kondisi *overcrowding* ini menciptakan efek domino terhadap tata kelola penempatan WBP. Hasil observasi partisipatif di blok

hunian menunjukkan bahwa **tidak terdapat segregasi (pemisahan) spasial yang tegas antara narapidana pemula (*first-time offenders*) dengan narapidana residivis**. Narapidana dari berbagai latar belakang tindak pidana—dengan dominasi kasus narkotika, pencurian dengan pemberatan (curat), dan penggelapan—ditempatkan dalam blok atau sel yang sama akibat keterbatasan infrastruktur.

Temuan observasional ini dikonfirmasi melalui wawancara mendalam dengan pihak otoritas keamanan rutan. Terkait kebijakan penempatan yang bercampur ini, Staf Pengamanan Rutan memberikan penjelasan struktural:

"Idealnya memang residivis dan tahanan baru itu dipisah agar karakter keras residivis tidak menular ke yang baru. Tapi realitas di lapangan, blok hunian kita sangat terbatas dan selalu overkapasitas. Kami terpaksa mencampur mereka berdasarkan ketersediaan ruang, bukan berdasarkan status residivisnya. Hal ini memang membuat pengawasan karakter menjadi lebih berat bagi petugas." **(Wawancara dengan Informan [R], Staf Pengaman Rutan Kelas IIB Sungai Penuh, 2026).**

Absennya segregasi ini melahirkan ekosistem interaksi sosial yang kompleks. Berdasarkan pengamatan langsung (field notes) selama kegiatan jam angin (waktu luang di luar sel), peneliti memotret dinamika psikososial yang khas dari kelompok residivis. Berbeda dengan narapidana pemula yang masih sering menunjukkan raut kecemasan atau kebingungan, narapidana residivis menampilkan bahasa tubuh yang sangat adaptif terhadap kerasnya lingkungan penjara, namun cenderung apatis terhadap interaksi konvensional.

Mereka secara sosiologis membentuk "klik" atau kelompok eksklusif sesama residivis. Dalam kelompok ini, obrolan yang terbangun kerap kali bernuansa kriminogenik, mendiskusikan pengalaman kejahatan masa lalu, atau mengeluhkan penolakan dari keluarga mereka di luar. Narapidana residivis terlihat membangun barrier (dinding pembatas) emosional dengan petugas dan program-program formal rutan pada fase-fase awal penahanan kembali mereka.

Kondisi demografis dan arsitektur sosial di atas memberikan kesimpulan awal bahwa ekosistem Rutan Kelas IIB Sungai Penuh saat ini sangat rentan bertransformasi menjadi school of crime (sekolah kejahatan) jika intervensi pembinaan tidak dilakukan secara spesifik. Di tengah ekosistem yang overcrowded dan tercampur ini, narapidana residivis membawa beban psikologis ganda: mereka kebal terhadap rutinitas penjara, namun rapuh secara emosional karena kehilangan dukungan dari dunia luar. Pemetaan ekosistem ini menjadi pijakan krusial untuk mengevaluasi apakah kurikulum pembinaan keagamaan yang berjalan saat ini mampu menembus "tembok" apatisme para residivis tersebut.

7. Persepsi Institusional terhadap "Keberhasilan" Pembinaan

Implementasi sebuah kebijakan publik—dalam hal ini program bimbingan kerohanian—sangat bergantung pada bagaimana institusi pelaksana mendefinisikan dan mengukur "keberhasilan" dari program tersebut. Secara filosofis, keberhasilan sistem pemasyarakatan diukur dari kemampuan narapidana untuk berintegrasi kembali secara sehat ke dalam masyarakat, serta tidak mengulangi tindak pidananya (reintegrasi sosial paripurna). Namun, penjabaran filosofi ini ke dalam tataran operasional di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh memperlihatkan adanya penyempitan makna keberhasilan yang direduksi menjadi sekadar kepatuhan birokratis dan administratif.

Berdasarkan telaah terhadap praktik evaluasi narapidana di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh, parameter keberhasilan pembinaan diukur secara kuantitatif melalui instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN). Instrumen ini dirancang untuk menilai dua variabel utama: pembinaan kepribadian (termasuk keagamaan) dan pembinaan kemandirian. Dalam praktiknya, variabel keagamaan memiliki bobot yang sangat determinan. Narapidana yang tercatat aktif mengikuti salat berjamaah, tidak pernah memicu keributan di dalam blok, dan patuh pada instruksi

petugas keamanan, akan mendapatkan predikat "Berkelakuan Baik".

Persepsi institusional yang pragmatis ini dikonfirmasi melalui wawancara mendalam dengan pihak manajerial Rutan. Saat ditanya mengenai indikator yang digunakan untuk menyatakan bahwa seorang narapidana (termasuk residivis) "telah sadar" dan layak diusulkan untuk mendapatkan hak integrasi seperti Pembebasan Bersyarat (PB) atau Cuti Menjelang Bebas (CMB), pejabat terkait memberikan afirmasi yang berpusat pada stabilitas keamanan internal Rutan:

"Bagi kami, tolak ukur keberhasilan pembinaan itu yang paling terlihat adalah perubahan sikap di dalam Rutan. Kalau dulunya dia (narapidana) suka melawan petugas atau bikin masalah di kamar, lalu sekarang dia jadi rajin ibadah, santun, dan nilai SPPN-nya memenuhi standar, itu sudah kami anggap berhasil dan berkelakuan baik. Berdasarkan data administrasi itulah kami berani mengusulkan hak integrasi (PB/CB) mereka ke pusat. Kalau urusan apakah nanti setelah bebas dia diterima masyarakat atau tidak, itu sebenarnya sudah di luar wewenang dan jangkauan kami." (Wawancara dengan Informan [OA], [Jabatan: misal Kasubsi Pelayanan Tahanan Kelas IIB Sungai Penuh, 2026).

Kutipan wawancara di atas membedah mindset institusional yang berkembang, di mana orientasi keberhasilan pembinaan bersifat inward-looking (melihat ke dalam). Institusi memandang narapidana sebagai subjek yang berhasil dibina apabila mereka tidak mengganggu ketertiban (stabilitas keamanan) dan mematuhi rutinitas ibadah. Hal ini menciptakan budaya "Rehabilitasi Administratif", di mana ketaatan beragama kerap kali digunakan oleh narapidana—khususnya para residivis—sebagai instrumen pragmatis semata untuk mempercepat proses kebebasan mereka.

Bagi narapidana residivis, instrumen SPPN ini bukanlah hal yang asing. Pengalaman masa lalu mereka di penjara telah mengajarkan mereka cara untuk "beradaptasi" dan "bertahan hidup" dalam sistem birokrasi pemasyarakatan. Mereka sangat memahami bahwa menampilkan citra diri yang religius (salat di saf depan, rajin membaca Al-Qur'an) adalah jalur tercepat untuk mendapatkan penilaian baik dari Wali Pemasyarakatan. Akibatnya, terjadi kamuflase sosiologis; kesalehan yang ditampilkan sering kali bersifat artifisial, terputus dari substansi pertobatan yang sejati.

Persepsi institusional yang mengandalkan "Taubat Ritual" ini terbukti memiliki blind spot (titik buta) yang fatal ketika dihadapkan pada entitas residivis. Rutan menganggap mereka telah "sadar", namun Rutan tidak memiliki parameter atau instrumen untuk mengukur apakah narapidana tersebut telah memulihkan kerusakan sosial yang ditimbulkannya di luar sana. Institusi tidak pernah mengevaluasi apakah istri, anak, atau orang tua residivis tersebut telah memberikan maaf (ishlah) dan siap menerima mereka kembali.

Ketika narapidana residivis tersebut akhirnya dibebaskan berbekal predikat "Berkelakuan Baik" secara administratif, mereka langsung berbenturan dengan realitas sosial yang belum pulih. Mereka keluar dari tembok Rutan menuju keluarga yang masih memendam trauma dan masyarakat yang masih menempelkan stigma kriminogenik. Ketimpangan antara persepsi keberhasilan institusi dengan realitas penolakan sosial inilah yang menjadi lokus utama kegagalan reintegrasi, yang bermuara pada lahirnya temuan khusus mengenai disfungsi institusi keluarga dalam tahapan penelitian selanjutnya.

Berdasarkan observasi di dalam Rutan, narapidana residivis cenderung menunjukkan sikap apatis, sinis terhadap program pembinaan, serta lebih nyaman bergaul dengan sesama

residivis. Sikap tersebut lahir dari pengalaman traumatis ketika mereka mencoba kembali hidup normal setelah bebas, namun masyarakat tetap memberi label negatif sebagai "penjahat". Hal ini tergambar dalam wawancara dengan Informan NR-1, residivis kasus pencurian:

"Waktu saya bebas dari hukuman yang pertama, saya benar-benar niat mau tobat, Pak. Saya mulai rajin ke masjid di kampung. Tapi tatapan orang-orang ke saya itu beda, sinis, seolah saya ini penyakit menular. Yang paling bikin sakit hati, setiap ada ayam tetangga yang hilang atau barang yang kemalingan di dusun, nama saya yang pertama kali dicari dan dituduh. Saya merasa percuma jadi orang baik kalau di mata mereka saya tetap maling. Akhirnya saya stres, saya temui lagi teman-teman lama, dan betul-betul mencuri lagi."

Wawancara tersebut menunjukkan bekerjanya konsep Labeling Theory dari Howard S. Becker, di mana masyarakat menempelkan master status sebagai "mantan narapidana" yang menutupi identitas positif lainnya. Akibatnya, mantan narapidana mengalami eksklusi sosial dan ekonomi.

Kondisi serupa juga dialami oleh Informan NR-2, residivis kasus narkotika: *"Saya sudah mencoba cari kerja halal, jadi kuli bangunan atau ikut orang berladang. Tapi begitu mereka tahu saya mantan napi narkoba, pelan-pelan saya disingkirkan. Tidak ada yang mau mempekerjakan saya. Sementara anak istri di rumah butuh makan setiap hari. Keluarga istri juga mulai menekan karena saya dianggap aib dan pengangguran. Dalam kondisi terjepit, tidak ada jalan lain selain kembali ke jaringan lama karena cuma mereka yang mau menerima saya dan langsung kasih uang."*

Dari temuan tersebut terlihat bahwa stigma masyarakat memicu secondary victimization berupa penolakan ekonomi dan sosial. Penolakan tersebut melahirkan frustrasi sosial yang

akhirnya mendorong mantan narapidana kembali melakukan tindak pidana (secondary deviance). Dengan demikian, residivisme tidak hanya lahir dari faktor individu, tetapi juga akibat kegagalan masyarakat menyediakan ruang reintegrasi sosial bagi eks-WBP.

Data administrasi kunjungan di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh memperlihatkan bahwa sebagian besar narapidana residivis mengalami zero-visit atau nihil kunjungan keluarga setelah beberapa waktu menjalani pidana. Absennya kunjungan tersebut bukan sekadar persoalan jarak atau biaya, tetapi merupakan bentuk pengabaian emosional akibat kelelahan psikologis keluarga. Hal ini terlihat dalam pengakuan Informan K-1, istri narapidana residivis:

"Kalau waktu dia dipenjara yang pertama dulu, saya masih rutin besuk, Pak. Saya bawakan makanan, saya beri semangat supaya dia berubah. Tapi ternyata setelah bebas, dia mengulangi lagi kesalahannya dan ditangkap lagi. Jujur, hati saya hancur dan sudah lelah. Saya malu keluar rumah karena omongan tetangga. Belum lagi saya harus banting tulang sendiri menghidupi dua anak karena dia tidak menafkahi. Sekarang, keluarga besar saya sudah mendesak saya untuk mengajukan cerai saja ke Pengadilan Agama."

Wawancara tersebut menunjukkan runtuhnya fungsi keluarga dalam aspek nafkah lahir dan batin, pendidikan moral (tarbiyah), serta ketahanan perkawinan. Dalam perspektif Ahwal Al-Syakhshiyyah, pemenjaraan menyebabkan suami kehilangan kemampuan menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga, sementara istri dan anak harus menanggung tekanan sosial secara berkepanjangan. Akibatnya, perceraian menjadi pilihan yang dianggap paling realistis oleh keluarga. Kondisi ini memperparah keterputusan hubungan emosional antara residivis dengan keluarga inti. Ketika keluarga tidak lagi menerima mereka, maka proses reintegrasi sosial menjadi semakin sulit. Temuan ini menegaskan

bahwa residivisme tidak dapat dipisahkan dari runtuhnya perlindungan keluarga. Hilangnya dukungan keluarga menyebabkan narapidana kehilangan motivasi untuk berubah dan kembali mencari penerimaan pada lingkungan lama yang bersifat kriminogenik.

Di tengah tingginya angka disfungsi keluarga, penelitian menemukan adanya praktik ishlah atau mediasi perdamaian yang dilakukan secara informal oleh petugas pembinaan kerohanian di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh. Meskipun belum terlembaga secara resmi dalam SOP maupun kurikulum pembinaan, praktik ini menjadi bentuk intervensi psikososial yang cukup penting. Salah satu staf pembimbing kerohanian menjelaskan:

"Sering kali ada WBP yang tiba-tiba mengurung diri, tidak mau makan, apalagi ke masjid, karena baru saja dikunjungi istrinya yang minta pisah atau mengeluh tidak kuat menanggung malu. Biasanya saya ambil inisiatif. Waktu keluarganya datang lagi, saya ajak bicara dari hati ke hati dan saya sampaikan nasihat agama. Kadang berhasil membuat keluarganya luluh dan menunda perceraian."

Praktik tersebut menunjukkan bahwa petugas secara de facto telah menjalankan fungsi sebagai hakam (mediator) dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga emosional dan kekeluargaan, dengan tujuan menjaga keutuhan rumah tangga serta memulihkan hubungan antara narapidana dan keluarganya.

Secara sosiologis, praktik ishlah ini berfungsi sebagai bentuk family counseling dan crisis intervention untuk mencegah keputusasaan psikologis narapidana. Sementara dalam perspektif Islam, praktik tersebut merupakan implementasi prinsip "Wa as-shulhu khair" dalam QS. An-Nisa ayat 128, bahwa perdamaian dan rekonsiliasi keluarga lebih utama.

Namun demikian, praktik mediasi ini masih bersifat sporadis

dan bergantung pada empati personal petugas. Belum terdapat sistem, kurikulum, maupun perangkat hukum yang secara khusus mengatur mediasi keluarga dalam program pembinaan kerohanian di Rutan. Akibatnya, tidak semua narapidana residivis memperoleh akses terhadap pendampingan tersebut.

B. Temuan Khusus

Kondisi *overcrowding* ini menciptakan efek domino terhadap tata kelola penempatan WBP. Hasil observasi partisipatif di blok hunian menunjukkan bahwa tidak terdapat segregasi (pemisahan) spasial yang tegas antara narapidana pemula (*first-time offenders*) dengan narapidana residivis. Narapidana dari berbagai latar belakang tindak pidana—dengan dominasi kasus narkotika, pencurian dengan pemberatan (curat), dan penggelapan—ditempatkan dalam blok atau sel yang sama akibat keterbatasan infrastruktur.

Temuan observasional ini dikonfirmasi melalui wawancara mendalam dengan pihak otoritas keamanan rutan. Terkait kebijakan penempatan yang bercampur ini, Staf Pengamanan Rutan memberikan penjelasan struktural:

> *"Idealnya memang residivis dan tahanan baru itu dipisah agar karakter keras residivis tidak menular ke yang baru. Tapi realitas di lapangan, blok hunian kita sangat terbatas dan selalu overkapasitas. Kami terpaksa mencampur mereka berdasarkan ketersediaan ruang, bukan berdasarkan status residivisnya. Hal ini memang membuat pengawasan karakter menjadi lebih berat bagi petugas."* (Wawancara dengan Informan [R], Staf Pengaman Rutan Kelas IIB Sungai Penuh, 2026).

Absennya segregasi ini melahirkan ekosistem interaksi sosial yang kompleks. Berdasarkan pengamatan langsung (field notes) selama kegiatan jam angin (waktu luang di luar sel), peneliti memotret dinamika psikososial yang khas dari kelompok residivis. Berbeda dengan narapidana pemula yang masih sering menunjukkan raut kecemasan atau kebingungan, narapidana residivis menampilkan bahasa tubuh yang sangat adaptif terhadap kerasnya lingkungan penjara, namun cenderung apatis terhadap interaksi konvensional.

Mereka secara sosiologis membentuk "klik" atau kelompok eksklusif sesama residivis. Dalam kelompok ini, obrolan yang terbangun kerap kali bernuansa kriminogenik, mendiskusikan pengalaman kejahatan masa lalu, atau mengeluhkan penolakan dari keluarga mereka di luar. Narapidana residivis terlihat membangun barrier (dinding pembatas) emosional dengan petugas dan program-program formal rutan pada fase-fase awal penahanan kembali mereka.

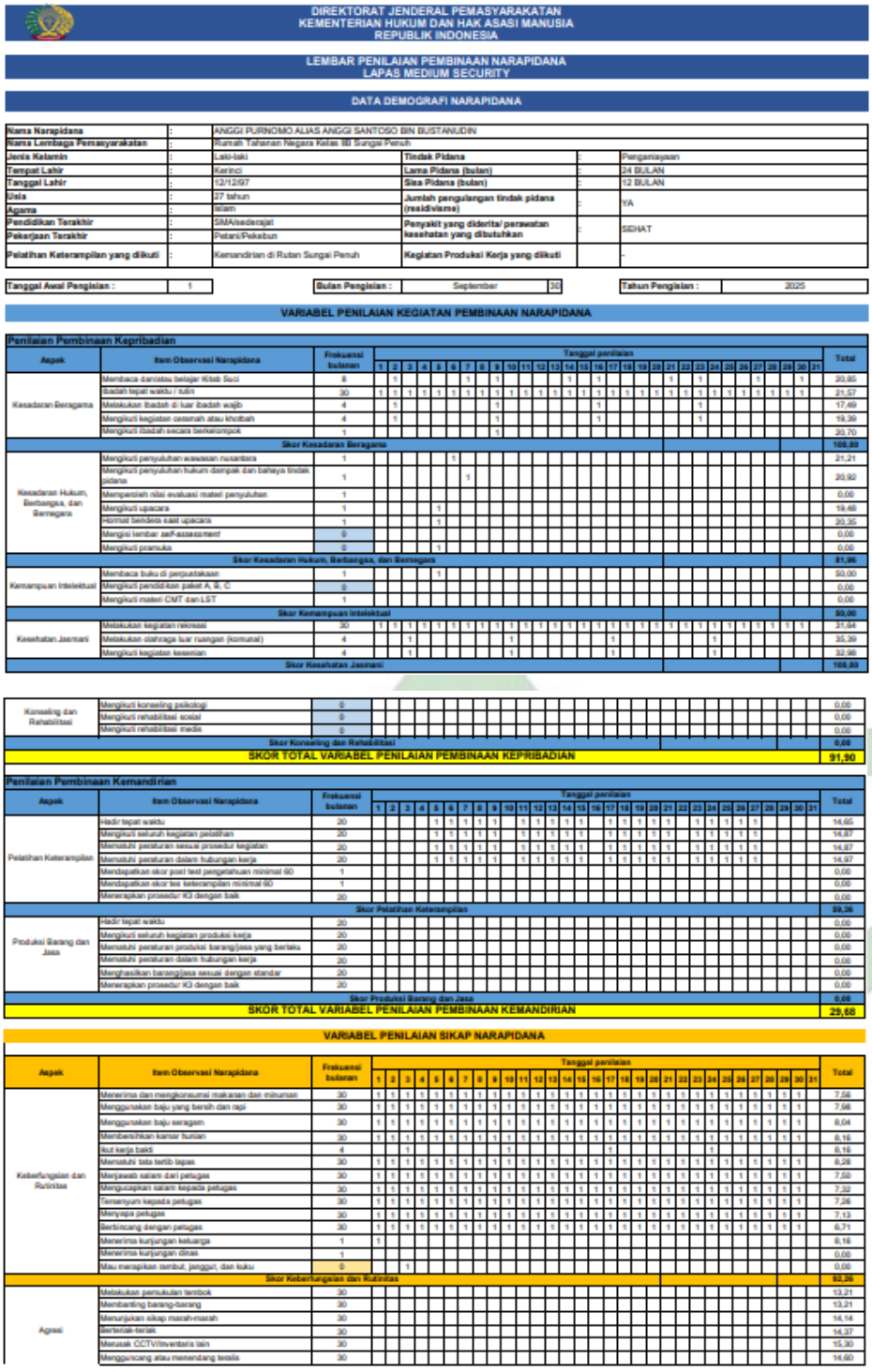
Kondisi demografis dan arsitektur sosial di atas memberikan kesimpulan awal bahwa ekosistem Rutan Kelas IIB Sungai Penuh saat ini sangat rentan bertransformasi menjadi school of crime (sekolah kejahatan) jika intervensi pembinaan tidak dilakukan secara spesifik. Di tengah ekosistem yang overcrowded dan tercampur ini, narapidana residivis membawa beban psikologis ganda: mereka kebal terhadap rutinitas penjara, namun rapuh secara emosional karena kehilangan dukungan dari dunia luar. Pemetaan ekosistem ini menjadi pijakan krusial untuk mengevaluasi apakah kurikulum pembinaan keagamaan yang berjalan saat ini mampu menembus "tembok" apatisme para residivis tersebut.

Implementasi sebuah kebijakan publik—dalam hal ini program bimbingan kerohanian—sangat bergantung pada bagaimana institusi pelaksana mendefinisikan dan mengukur "keberhasilan" dari program tersebut. Secara filosofis, keberhasilan sistem pemasyarakatan diukur dari kemampuan narapidana untuk berintegrasi kembali secara sehat ke dalam masyarakat, serta tidak mengulangi tindak pidananya (reintegrasi sosial paripurna). Namun, penjabaran filosofi ini ke dalam tataran operasional di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh memperlihatkan adanya penyempitan makna keberhasilan yang direduksi menjadi sekadar kepatuhan birokratis dan administratif.

Berdasarkan telaah terhadap praktik evaluasi narapidana di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh, parameter keberhasilan pembinaan diukur secara kuantitatif melalui instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN). Instrumen ini dirancang untuk menilai dua variabel utama: pembinaan kepribadian (termasuk keagamaan) dan pembinaan kemandirian. Dalam praktiknya, variabel keagamaan memiliki bobot yang sangat determinan. Narapidana yang tercatat aktif mengikuti salat berjamaah, tidak pernah memicu keributan di dalam blok, dan patuh pada

instruksi petugas keamanan, akan mendapatkan predikat "Berkelakuan Baik".

Tabel 2. SPPN



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PENILAIAN PEMBINAAN NARAPIDANA
LAPAS MEDIUM SECURITY

DATA DEMOGRAFI NARAPIDANA

Nama Narapidana	:	ANGGI PURNOMO ALIAS ANGGI SANTOSO BIN BUSTANUDIN			
Nama Lembaga Pemasyarakatan	:	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sungai Penuh			
Jenis Kelamin	:	Laki-laki	Tindak Pidana	:	Pengamanjaan
Tempat Lahir	:	Kerinci	Lama Pidana (bulan)	:	24 BULAN
Tanggal Lahir	:	12/12/97	Sisa Pidana (bulan)	:	12 BULAN
Usia	:	27 tahun	Jumlah pengulangan tindak pidana (residivisme)	:	YA
Agama	:	Islam			
Pendidikan Terakhir	:	SMA/sederajat	Penyakit yang diderita/ perawatan kesehatan yang dibutuhkan	:	SEHAT
Pekerjaan Terakhir	:	Petani/Pekebun			
Pelatihan Keterampilan yang diikuti	:	Kemandirian di Rutan Sungai Penuh	Kegiatan Produksi Kerja yang diikuti	:	-

Tanggal Awal Pengisian :	1	Bulan Pengisian :	September	30	Tahun Pengisian : 2025

VARIABEL PENILAIAN KEGIATAN PEMBINAAN NARAPIDANA

Penilaian Pembinaan Kepribadian

Aspek	Item Observasi Narapidana	Frekuensi bulanan	Tanggal penilaian 1–31	Total
Kesadaran Beragama	Membaca dan/atau belajar Kitab Suci	8		30,85
	Ibadah tepat waktu / rutin	30		21,57
	Melakukan ibadah di luar ibadah wajib	4		17,49
	Mengikuti kegiatan ceramah atau khotbah	4		19,39
	Mengikuti ibadah secara berkelompok	1		20,70
Skor Kesadaran Beragama				109,99
Kesadaran Hukum, Berbangsa, dan Bernegara	Mengikuti penyuluhan kewaspadaan nusantara	1		21,21
	Mengikuti penyuluhan hukum dampak dan bahaya tindak pidana	1		20,92
	Memperoleh nilai evaluasi materi penyuluhan	1		0,00
	Mengikuti upacara	1		19,48
	Hormat bendera saat upacara	1		20,35
	Mengisi lembar self-assessment	0		0,00
	Mengikuti pramuka	0		0,00
Skor Kesadaran Hukum, Berbangsa, dan Bernegara				81,96
Kemampuan Intelektual	Membaca buku di perpustakaan	1		50,00
	Mengikuti pendidikan paket A, B, C	0		0,00
	Mengikuti materi CMT dan LST	1		0,00
Skor Kemampuan Intelektual				50,00
Kesehatan Jasmani	Melakukan kegiatan rekreasi	30		31,64
	Melakukan olahraga luar ruangan (komunal)	4		35,39
	Mengikuti kegiatan kesenian	4		32,96
Skor Kesehatan Jasmani				100,00
Konseling dan Rehabilitasi	Mengikuti konseling psikologi	0		0,00
	Mengikuti rehabilitasi sosial	0		0,00
	Mengikuti rehabilitasi medis	0		0,00
Skor Konseling dan Rehabilitasi				0,00
SKOR TOTAL VARIABEL PENILAIAN PEMBINAAN KEPRIBADIAN				91,90

Penilaian Pembinaan Kemandirian

Aspek	Item Observasi Narapidana	Frekuensi bulanan	Tanggal penilaian 1–31	Total
Pelatihan Keterampilan	Hadir tepat waktu	20		14,65
	Mengikuti seluruh kegiatan pelatihan	20		14,87
	Memahami peraturan sesuai prosedur kegiatan	20		14,87
	Memahami peraturan dalam hubungan kerja	20		14,97
	Mendapatkan skor post test pengetahuan minimal 60	1		0,00
	Mendapatkan skor tes keterampilan minimal 60	1		0,00
	Menerapkan prosedur K3 dengan baik	20		0,00
Skor Pelatihan Keterampilan				59,36
Produksi Barang dan Jasa	Hadir tepat waktu	20		0,00
	Mengikuti seluruh kegiatan produksi kerja	20		0,00
	Memahami peraturan produksi barang/jasa yang berlaku	20		0,00
	Memahami peraturan dalam hubungan kerja	20		0,00
	Menghasilkan barang/jasa sesuai dengan standar	20		0,00
	Menerapkan prosedur K3 dengan baik	20		0,00
Skor Produksi Barang dan Jasa				0,00
SKOR TOTAL VARIABEL PENILAIAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN				29,68

VARIABEL PENILAIAN SIKAP NARAPIDANA

Aspek	Item Observasi Narapidana	Frekuensi bulanan	Tanggal penilaian 1–31	Total
Keberfungsian dan Rutinitas	Menerima dan mengkonsumsi makanan dan minuman	30		7,56
	Menggunakan baju yang bersih dan rapi	30		7,98
	Menggunakan baju seragam	30		8,04
	Membersihkan kamar hunian	30		6,16
	Ikut kerja bakti	4		6,16
	Memahami tata tertib lapas	30		6,28
	Menjawab salam dari petugas	30		7,50
	Mengucapkan salam kepada petugas	30		7,32
	Tersenyum kepada petugas	30		7,26
	Menyapa petugas	30		7,13
	Berbincang dengan petugas	30		6,71
	Menerima kunjungan keluarga	1		6,16
	Menerima kunjungan dinas	1		0,00
	Mau merapikan sambut, jenggut, dan kuku	0		0,00
Skor Keberfungsian dan Rutinitas				92,36
Agresi	Melakukan pemukulan terhdap	30		13,21
	Membanting barang-barang	30		13,21
	Menunjukan sikap marah-marah	30		14,14
	Berteriak-teriak	30		14,37
	Merusak CCTV/Inventaris lain	30		15,30
	Menggunting atau memendang tersiis	30		14,60

	Memanjat teralis	30																																15,18
	Skor Agresi																																	**100,00**
Pelanggaran Hukum	Berupaya melarikan diri	30																																25,00
	Mengancam/menyerang petugas	30																																25,00
	Berkelahi dengan narapidana lain	30																																25,00
	Melakukan dugaan tindak pidana lain	30																																25,00
	Skor Pelanggaran Hukum																																	**100,00**
Kemampuan mempengaruhi	Membujuk petugas Pemasyarakatan melakukan pelanggaran secara langsung	30																																32,84
	Menggunakan jaringan untuk membujuk petugas Pemasyarakatan melakukan pelanggaran	30																																33,83
	Membujuk atau mengajak narapidana lain melakukan pelanggaran	30																																33,33
	Skor Kemampuan mempengaruhi																																	**100,00**
Ekspresi Simbolik	Menggambar simbol yang berkaitan dengan ideologi ekstrimisme kekerasan	30																																19,51
	Meminta sesuatu yang berkaitan dengan ideologi ekstrimisme kekerasan	30																																20,28
	Membuat pernyataan yang menunjukkan niat untuk melakukan aksi teror seperti memberikan doktrin	30																																20,58
	Menggunakan kata "kami" dan "mereka" dalam maksud memisahkan antara kelompoknya dengan petugas	30																																19,82
	Menggunakan sandi untuk menghina petugas	30																																19,82
	Skor Ekspresi Simbolik																																	**100,00**
	SKOR TOTAL VARIABEL PENILAIAN SIKAP																																	**97,68**

VARIABEL PENILAIAN KONDISI MENTAL NARAPIDANA

Aspek	Item Observasi Narapidana	Frekuensi bulanan	Tanggal penilaian																															Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Depresi	Tidak mau bangun dari tempat tidur	30																																12,51
	Sulit tidur	30																																13,14
	Tidak mau mandi	30																																12,62
	Tidak mau makan/minum	30																																13,03
	Murung terus-menerus	30																																12,83
	Menangis terus-menerus	30																																12,30
	Menatap dinding dengan lama	30																																11,68
	Tidak mau berbicara	30																																11,89
	Skor Depresi																																	**100,00**
Kecemasan	Melakukan perilaku berulang-ulang	30																																34,67
	Tidak bisa fokus terhadap banyak hal	30																																33,24
	Takut ditempatkan di ruang sendiri	30																																32,09
	Skor Kecemasan																																	**100,00**
Psikosomatis	Mengalami gejala fisik pada saat situasi di bawah tekanan	30																																100,00
	Skor Psikosomatis																																	**100,00**
Malingering	Mengeluhkan sesuatu secara terus-menerus untuk kepentingan diri sendiri untuk menghindari kewajiban	30																																100,00
	Skor Malingering																																	**100,00**
Potensi Bunuh Diri	Menyakiti diri sendiri	30																																24,72
	Membenturkan kepala ke benda keras	30																																23,97
	Melakukan usaha untuk bunuh diri	30																																25,84
	Mengatakan ingin bunuh diri	30																																25,47
	Skor Potensi Bunuh Diri																																	**100,00**
	SKOR TOTAL VARIABEL PENILAIAN KONDISI MENTAL																																	**100,00**

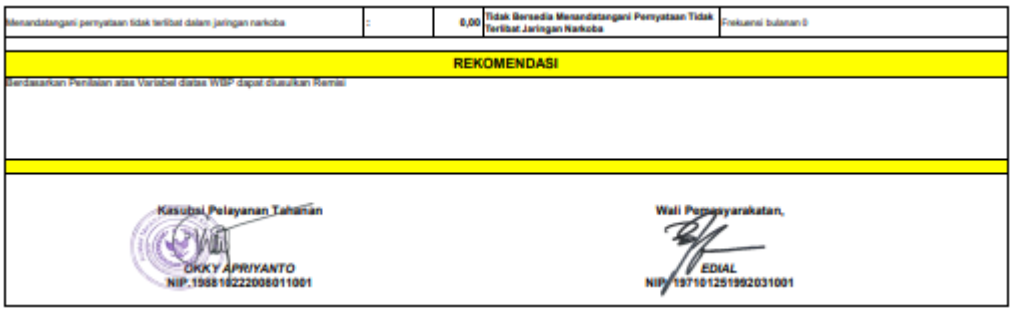
PERNYATAAN KOMITMEN

Item Observasi Narapidana	Frekuensi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Menandatangani pernyataan kesetiaan terhadap NKRI	0																																0,00
Menandatangani pernyataan tidak terlibat dalam jaringan narkoba	0																																0,00
Skor Pernyataan Komitmen																																	**0,00**

HASIL PENILAIAN PEMBINAAN NARAPIDANA

Nama Narapidana	:	[illegible] BUSTANUDIN	Nama Lapas	:	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sungai Penuh
Jenis Kelamin	:	Laki-laki	Kategori Lapas	:	LAPAS MEDIUM SECURITY
Tindak Pidana	:	Penganiayaan	Bulan Penilaian	:	September / 2025
Lama Pidana	:	24 BULAN	Keterangan lainnya:	:	

VARIABEL & ASPEK		SKOR	KETERANGAN SKOR	CATATAN SKOR (tuliskan data pendukung pada setiap skor aspek)
Total Penilaian Pembinaan Kepribadian	:	**91,90**	**SANGAT BAIK**	
Aspek Kesadaran Beragama	:	100,00	Sangat Baik	
Aspek Kesadaran Hukum, Berbangsa, dan Bernegara	:	81,96	Baik	
Aspek Kemampuan Intelektual	:	50,00	Cukup Baik	
Aspek Kesehatan Jasmani	:	100,00	Sangat Baik	
Aspek Konseling dan Rehabilitasi	:	0,00	Sangat Tidak Baik	
Total Penilaian Pembinaan Kemandirian	:	**29,68**	**TIDAK BAIK**	
Aspek Pelatihan Keterampilan	:	59,36	Cukup Baik	
Aspek Produksi Barang/Jasa	:	0,00	Sangat Tidak Baik	[illegible] Kemandirian
Total Penilaian Sikap	:	**97,68**	**SANGAT PATUH**	
Aspek Keberfungsian dan Rutinitas	:	92,26	Sangat Patuh	
Aspek Agresi	:	100,00	Sangat Patuh	
Aspek Pelanggaran Hukum	:	100,00	Sangat Patuh	
Aspek Kemampuan mempengaruhi	:	100,00	Sangat Patuh	
Aspek Ekspresi Simbolik	:	100,00	Sangat Patuh	
Total Penilaian Kondisi Mental	:	**100,00**	**SANGAT SEHAT MENTAL**	
Aspek Depresi	:	100,00	Sangat Sehat Mental	
Aspek Kecemasan	:	100,00	Sangat Sehat Mental	
Aspek Psikosomatis	:	100,00	Sangat Sehat Mental	
Aspek Malingering	:	100,00	Sangat Sehat Mental	
Aspek Potensi Bunuh Diri	:	100,00	Sangat Sehat Mental	
Pernyataan Komitmen	:			
Menandatangani pernyataan kesetiaan terhadap NKRI	:	0,00	Tidak Bersedia Menandatangani Pernyataan NKRI	Frekuensi bulanan 0



Menandatangani pernyataan tidak terlibat dalam jaringan narkoba	:	0,00	Tidak Bersedia Menandatangani Pernyataan Tidak Terlibat Jaringan Narkoba	Frekuensi bulanan 0

REKOMENDASI

Berdasarkan Penilaian atas Variabel diatas WBP dapat diusulkan Remisi

Kasubsi Pelayanan Tahanan

OKKY APRIYANTO
NIP.198810222008011001

Wali Pemasyarakatan,

EDIAL
NIP. 197101251992031001

Persepsi institusional yang pragmatis ini dikonfirmasi melalui wawancara mendalam dengan pihak manajerial Rutan. Saat ditanya mengenai indikator yang digunakan untuk menyatakan bahwa seorang narapidana (termasuk residivis) "telah sadar" dan layak diusulkan untuk mendapatkan hak integrasi seperti Pembebasan Bersyarat (PB) atau Cuti Menjelang Bebas (CMB), pejabat terkait memberikan afirmasi yang berpusat pada stabilitas keamanan internal Rutan:

"Bagi kami, tolak ukur keberhasilan pembinaan itu yang paling terlihat adalah perubahan sikap di dalam Rutan. Kalau dulunya dia (narapidana) suka melawan petugas atau bikin masalah di kamar, lalu sekarang dia jadi rajin ibadah, santun, dan nilai SPPN-nya memenuhi standar, itu sudah kami anggap berhasil dan berkelakuan baik. Berdasarkan data administrasi itulah kami berani mengusulkan hak integrasi (PB/CB) mereka ke pusat. Kalau urusan apakah nanti setelah bebas dia diterima masyarakat atau tidak, itu sebenarnya sudah di luar wewenang dan jangkauan kami." (Wawancara dengan Informan [OA], [Jabatan: misal Kasubsi Pelayanan Tahanan Kelas IIB Sungai Penuh, 2026).

Kutipan wawancara di atas membedah mindset institusional yang berkembang, di mana orientasi keberhasilan pembinaan bersifat inward-looking (melihat ke dalam). Institusi memandang narapidana sebagai subjek yang berhasil dibina apabila mereka tidak mengganggu ketertiban (stabilitas keamanan) dan mematuhi rutinitas ibadah. Hal ini menciptakan budaya "Rehabilitasi Administratif", di mana ketaatan beragama kerap kali digunakan oleh narapidana—khususnya para residivis—sebagai instrumen pragmatis semata untuk mempercepat proses kebebasan mereka.

Bagi narapidana residivis, instrumen SPPN ini bukanlah hal yang asing. Pengalaman masa lalu mereka di penjara telah mengajarkan mereka cara untuk "beradaptasi" dan "bertahan hidup" dalam sistem birokrasi pemasyarakatan. Mereka sangat memahami bahwa menampilkan citra diri yang religius (salat di saf depan, rajin membaca Al-Qur'an) adalah jalur tercepat untuk mendapatkan penilaian baik dari Wali Pemasyarakatan. Akibatnya, terjadi kamuflase sosiologis; kesalehan yang ditampilkan sering kali bersifat artifisial, terputus dari substansi pertobatan yang sejati.

Persepsi institusional yang mengandalkan "Taubat Ritual" ini terbukti memiliki blind spot (titik buta) yang fatal ketika dihadapkan pada entitas residivis. Rutan menganggap mereka telah "sadar", namun Rutan tidak memiliki parameter atau instrumen untuk mengukur apakah narapidana tersebut telah memulihkan kerusakan sosial yang ditimbulkannya di luar sana. Institusi tidak pernah mengevaluasi apakah istri, anak, atau orang tua residivis tersebut telah memberikan maaf (ishlah) dan siap menerima mereka kembali.

Ketika narapidana residivis tersebut akhirnya dibebaskan berbekal predikat "Berkelakuan Baik" secara administratif, mereka langsung berbenturan dengan realitas sosial yang belum pulih. Mereka keluar dari tembok Rutan menuju keluarga yang masih memendam trauma dan masyarakat yang masih menempelkan stigma kriminogenik. Ketimpangan antara persepsi keberhasilan institusi dengan realitas penolakan sosial inilah yang menjadi lokus utama kegagalan reintegrasi, yang bermuara pada lahirnya temuan khusus mengenai disfungsi institusi keluarga dalam tahapan penelitian selanjutnya.

Berdasarkan observasi di dalam Rutan, narapidana residivis cenderung menunjukkan sikap apatis, sinis terhadap program pembinaan, serta lebih nyaman bergaul dengan sesama residivis. Sikap tersebut lahir dari pengalaman traumatis ketika mereka mencoba kembali hidup normal setelah bebas, namun masyarakat tetap memberi label negatif sebagai “penjahat”. Hal ini tergambar dalam wawancara dengan Informan NR-1, residivis kasus pencurian:

"Waktu saya bebas dari hukuman yang pertama, saya benar-benar niat mau tobat, Pak. Saya mulai rajin ke masjid di kampung. Tapi tatapan orang-orang ke saya itu beda, sinis, seolah saya ini penyakit menular. Yang paling bikin sakit hati, setiap ada ayam tetangga yang hilang atau barang yang kemalingan di dusun, nama saya yang pertama kali dicari dan dituduh. Saya merasa percuma jadi orang baik kalau di mata mereka saya tetap maling. Akhirnya saya stres, saya temui lagi teman-teman lama, dan betul-betul mencuri lagi."

Wawancara tersebut menunjukkan bekerjanya konsep Labeling Theory dari Howard S. Becker, di mana masyarakat menempelkan master status sebagai "mantan narapidana" yang menutupi identitas positif lainnya. Akibatnya, mantan narapidana mengalami eksklusi sosial dan ekonomi.

Kondisi serupa juga dialami oleh Informan NR-2, residivis kasus narkotika:

"Saya sudah mencoba cari kerja halal, jadi kuli bangunan atau ikut orang berladang. Tapi begitu mereka tahu saya mantan napi narkoba, pelan-pelan saya disingkirkan. Tidak ada yang mau mempekerjakan saya. Sementara anak istri di rumah butuh makan setiap hari. Keluarga istri juga mulai menekan karena saya dianggap aib dan pengangguran. Dalam kondisi terjepit, tidak ada jalan lain selain kembali ke jaringan lama karena cuma mereka yang mau menerima saya dan langsung kasih uang."

Dari temuan tersebut terlihat bahwa stigma masyarakat memicu secondary victimization berupa penolakan ekonomi dan sosial. Penolakan tersebut melahirkan frustrasi sosial yang akhirnya mendorong mantan narapidana kembali melakukan tindak pidana (secondary deviance). Dengan demikian, residivisme tidak hanya lahir dari faktor individu, tetapi juga akibat kegagalan masyarakat menyediakan ruang reintegrasi sosial bagi eks-WBP.

Data administrasi kunjungan di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh memperlihatkan bahwa sebagian besar narapidana residivis mengalami

zero-visit atau nihil kunjungan keluarga setelah beberapa waktu menjalani pidana. Absennya kunjungan tersebut bukan sekadar persoalan jarak atau biaya, tetapi merupakan bentuk pengabaian emosional akibat kelelahan psikologis keluarga. Hal ini terlihat dalam pengakuan Informan K-1, istri narapidana residivis:

"Kalau waktu dia dipenjara yang pertama dulu, saya masih rutin besuk, Pak. Saya bawakan makanan, saya beri semangat supaya dia berubah. Tapi ternyata setelah bebas, dia mengulangi lagi kesalahannya dan ditangkap lagi. Jujur, hati saya hancur dan sudah lelah. Saya malu keluar rumah karena omongan tetangga. Belum lagi saya harus banting tulang sendiri menghidupi dua anak karena dia tidak menafkahi. Sekarang, keluarga besar saya sudah mendesak saya untuk mengajukan cerai saja ke Pengadilan Agama."

Wawancara tersebut menunjukkan runtuhnya fungsi keluarga dalam aspek nafkah lahir dan batin, pendidikan moral (tarbiyah), serta ketahanan perkawinan. Dalam perspektif Ahwal Al-Syakhshiyyah, pemenjaraan menyebabkan suami kehilangan kemampuan menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga, sementara istri dan anak harus menanggung tekanan sosial secara berkepanjangan. Akibatnya, perceraian menjadi pilihan yang dianggap paling realistis oleh keluarga. Kondisi ini memperparah keterputusan hubungan emosional antara residivis dengan keluarga inti. Ketika keluarga tidak lagi menerima mereka, maka proses reintegrasi sosial menjadi semakin sulit. Temuan ini menegaskan bahwa residivisme tidak dapat dipisahkan dari runtuhnya perlindungan keluarga. Hilangnya dukungan keluarga menyebabkan narapidana kehilangan motivasi untuk berubah dan kembali mencari penerimaan pada lingkungan lama yang bersifat kriminogenik.

Di tengah tingginya angka disfungsi keluarga, penelitian menemukan adanya praktik ishlah atau mediasi perdamaian yang dilakukan secara informal oleh petugas pembinaan kerohanian di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh. Meskipun belum terlembaga secara resmi dalam SOP maupun kurikulum pembinaan, praktik ini menjadi bentuk intervensi

psikososial yang cukup penting. Salah satu staf pembimbing kerohanian menjelaskan:

"Sering kali ada WBP yang tiba-tiba mengurung diri, tidak mau makan, apalagi ke masjid, karena baru saja dikunjungi istrinya yang minta pisah atau mengeluh tidak kuat menanggung malu. Biasanya saya ambil inisiatif. Waktu keluarganya datang lagi, saya ajak bicara dari hati ke hati dan saya sampaikan nasihat agama. Kadang berhasil membuat keluarganya luluh dan menunda perceraian."

Praktik tersebut menunjukkan bahwa petugas secara de facto telah menjalankan fungsi sebagai hakam (mediator) dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga emosional dan kekeluargaan, dengan tujuan menjaga keutuhan rumah tangga serta memulihkan hubungan antara narapidana dan keluarganya.

Secara sosiologis, praktik ishlah ini berfungsi sebagai bentuk family counseling dan crisis intervention untuk mencegah keputusasaan psikologis narapidana. Sementara dalam perspektif Islam, praktik tersebut merupakan implementasi prinsip "Wa as-shulhu khair" dalam QS. An-Nisa ayat 128, bahwa perdamaian dan rekonsiliasi keluarga lebih utama.

Namun demikian, praktik mediasi ini masih bersifat sporadis dan bergantung pada empati personal petugas. Belum terdapat sistem, kurikulum, maupun perangkat hukum yang secara khusus mengatur mediasi keluarga dalam program pembinaan kerohanian di Rutan. Akibatnya, tidak semua narapidana residivis memperoleh akses terhadap pendampingan tersebut.

1. **Mekanisme dan Problematika Implementasi Program Pembinaan Keagamaan dan Kerohanian bagi Narapidana Residivis di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh**
   a. Dominasi Pembinaan Ritualistik dan Ketiadaan Pendekatan Reintegratif

      Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh, ditemukan bahwa mekanisme pembinaan keagamaan yang berjalan masih berorientasi pada

pembinaan ritual ibadah mahdhah seperti salat berjamaah, pengajian, ceramah agama, pembelajaran membaca Al-Qur'an, serta peringatan hari besar Islam. Program tersebut secara administratif berjalan rutin, namun belum menyentuh akar persoalan psikososial yang dialami oleh narapidana residivis.

Dalam praktiknya, kurikulum pembinaan kerohanian lebih menekankan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan (hablum minallah), sementara dimensi horizontal berupa pemulihan relasi sosial dan keluarga belum terintegrasi secara sistematis. Akibatnya, pembinaan agama kehilangan daya transformasi sosial karena tidak mampu menjawab trauma, stigma, dan kehancuran relasi domestik yang menjadi penyebab utama residivisme.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa banyak residivis mengikuti kegiatan ibadah hanya sebagai rutinitas institusional, bukan sebagai bentuk kesadaran spiritual yang utuh. Hal ini tampak dari sikap apatis, rendahnya partisipasi emosional dalam kegiatan keagamaan, serta munculnya kelompok eksklusif sesama residivis di dalam blok tahanan.

b. Fenomena Kekosongan Makna Taubat dalam Sistem Pemasyarakatan

Hasil wawancara dengan beberapa residivis menunjukkan adanya krisis eksistensial dalam proses pertobatan mereka. Secara spiritual mereka berusaha berubah melalui ibadah, namun realitas sosial di luar penjara menghancurkan motivasi perubahan tersebut. Kondisi ini melahirkan fenomena yang dapat disebut sebagai "taubat yang kehilangan ruang sosial". Narapidana telah dibina untuk menjadi pribadi religius, tetapi masyarakat tetap memberikan label permanen sebagai "penjahat".

Dalam perspektif sosiologis, pembinaan kerohanian di Rutan gagal dikoneksikan dengan mekanisme penerimaan sosial pasca-pembebasan. Akibatnya, terjadi benturan antara identitas spiritual baru yang dibangun di dalam Rutan dengan identitas sosial lama yang dipaksakan masyarakat. Benturan identitas ini memicu frustrasi

psikologis yang berujung pada pengulangan tindak pidana.

Temuan empiris menunjukkan bahwa program pembinaan di Rutan belum memiliki desain kurikulum yang berbasis kebutuhan psikososial residivis. Seluruh program masih bersifat seragam antara narapidana pemula dan residivis, padahal karakter problematik keduanya sangat berbeda. Residivis pada umumnya telah mengalami penolakan sosial berulang, kehancuran rumah tangga, kehilangan legitimasi moral, tekanan ekonomi, dan trauma psikologis akibat stigmatisasi. Namun kondisi tersebut belum dijadikan basis penyusunan materi pembinaan. Tidak ditemukan sesi khusus mengenai rekonstruksi relasi keluarga, pendidikan fikih keluarga, terapi psikospiritual, mediasi konflik rumah tangga, maupun konseling reintegrasi sosial. Hal ini menyebabkan pembinaan agama berjalan normatif dan kurang adaptif terhadap realitas sosial residivis.

c. Lemahnya Integrasi Antar-Lembaga dalam Pembinaan Reintegrasi Sosial

Temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa pembinaan di Rutan berjalan secara parsial tanpa integrasi kuat dengan institusi eksternal seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas), Kantor Urusan Agama (KUA), Penyuluh Agama Islam, maupun lembaga sosial masyarakat. Akibat lemahnya koordinasi tersebut, proses reintegrasi sosial narapidana tidak dipersiapkan secara matang sejak masa pembinaan di dalam Rutan. Pendampingan keluarga hampir tidak tersentuh secara kelembagaan, sehingga narapidana menghadapi pembebasan dalam kondisi relasi sosial yang telah runtuh.

d. Embrio Family Counseling yang Masih Bersifat Personal dan Sporadis

Meskipun belum ada SOP resmi, penelitian menemukan adanya praktik mediasi informal yang dilakukan oleh beberapa petugas pembinaan kerohanian. Praktik tersebut lahir dari empati personal petugas ketika menghadapi WBP yang mengalami depresi akibat gugatan cerai atau penolakan keluarga. Petugas terkadang

mengambil inisiatif mempertemukan keluarga dengan WBP, memberikan nasihat agama, membujuk istri agar menunda perceraian, serta memediasi konflik rumah tangga secara informal. Namun praktik ini memiliki kelemahan mendasar tidak terstruktur, tidak memiliki legitimasi kelembagaan, bergantung pada inisiatif personal, dan tidak memiliki standar evaluasi keberhasilan. Dengan demikian, mekanisme ishlah yang sebenarnya potensial dalam mencegah residivisme belum berkembang menjadi program strategis institusional.

2. Tinjauan Hukum Keluarga Islam dalam Memotret Terputusnya Perlindungan Keluarga sebagai Faktor Determinan Penyebab Terjadinya Residivis di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh

a. Krisis Hifdz Al-Nasl sebagai Dampak Sistemik Pemenjaraan Berulang

Dalam perspektif Maqashid Syariah, keluarga merupakan institusi fundamental yang harus dilindungi demi menjaga keturunan (Hifdz Al-Nasl). Namun temuan lapangan menunjukkan bahwa residivisme justru menjadi faktor penghancur keberlangsungan keluarga. Pemenjaraan berulang menyebabkan runtuhnya komunikasi keluarga, hilangnya fungsi kasih sayang, keretakan hubungan suami-istri, serta terabaikannya hak anak. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa residivisme bukan hanya persoalan kriminalitas individu, tetapi juga krisis perlindungan keluarga dalam perspektif Hukum Islam.

b. Gugurnya Fungsi Nafkah dan Kepemimpinan Rumah Tangga

Penelitian menunjukkan bahwa mayoritas narapidana residivis mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsi qawwamah (kepemimpinan rumah tangga). Pemenjaraan menyebabkan suami kehilangan kemampuan memberikan nafkah lahir, batin, perlindungan emosional, dan pendidikan moral bagi keluarga. Akibat tekanan ekonomi dan sosial tersebut, banyak istri memilih mengajukan perceraian sebagai bentuk penyelamatan diri dan anak-anak mereka. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, kondisi ini menunjukkan terganggunya maqashid perkawinan yang seharusnya dibangun atas asas sakinah, mawaddah wa

rahmah.

c. Perceraian sebagai Manifestasi Disintegrasi Sosial Keluarga

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa residivisme memiliki korelasi langsung dengan meningkatnya ancaman perceraian. Banyak keluarga residivis mengalami tekanan ekonomi, rasa malu sosial, intimidasi lingkungan, dan kelelahan psikologis. Akumulasi tekanan tersebut mendorong terjadinya disolusi perkawinan. Dalam konteks hukum positif, perceraian tersebut memperoleh legitimasi melalui Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai alasan perceraian akibat hukuman pidana. Namun secara sosiologis, perceraian tersebut mempercepat proses keterputusan sosial residivis. Ketika keluarga inti telah menolak, maka residivis kehilangan benteng terakhir untuk kembali hidup normal di masyarakat.

d. Hilangnya Fungsi Keluarga sebagai Social Control

Dalam perspektif kriminologi dan Hukum Islam, keluarga berfungsi sebagai sistem kontrol sosial primer. Akan tetapi, penelitian menunjukkan bahwa ketika keluarga mengalami disfungsi, maka kontrol moral terhadap individu ikut melemah. Anak-anak kehilangan figur ayah, istri kehilangan perlindungan, sedangkan narapidana kehilangan motivasi emosional untuk berubah. Situasi ini menciptakan kekosongan afeksi yang mendorong residivis kembali mencari penerimaan dalam kelompok kriminal lama. Dengan demikian, putusnya perlindungan keluarga terbukti menjadi faktor determinan yang mempercepat terjadinya residivisme.

e. Paradoks Masyarakat Agamis dan Lumpuhnya Nilai Ishlah

Penelitian juga menemukan paradoks sosial dalam masyarakat yang religius. Nilai agama secara normatif mengajarkan taubat, ishlah, dan kasih sayang, namun praktik sosial justru menunjukkan pengucilan, stigma permanen, dan penolakan terhadap mantan narapidana. Akibatnya, ruang rekonsiliasi sosial tertutup. Eks-WBP kehilangan kesempatan untuk membuktikan perubahan diri mereka. Dalam perspektif Hukum Islam, kondisi ini menunjukkan belum terimplementasikannya prinsip ishlah secara substantif dalam kehidupan sosial masyarakat.

3. **Konstruksi Pelembagaan Mediasi Perdamaian (Ishlah) Berbasis Hukum Keluarga Islam dalam Kurikulum Pembinaan Kerohanian sebagai Instrumen Strategis Pencegahan Residivisme di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh**

a. Rekonstruksi Paradigma Pembinaan: Dari Ritualistik Menuju Restoratif

Penelitian menunjukkan perlunya perubahan paradigma pembinaan keagamaan di Rutan. Pembinaan tidak lagi cukup berfokus pada ritual ibadah individual, tetapi harus diarahkan pada model pembinaan restoratif berbasis pemulihan hubungan sosial dan keluarga. Konsep ishlah dalam Hukum Islam dapat dijadikan landasan utama untuk membangun sistem pembinaan yang: memulihkan relasi keluarga, merekonstruksi identitas sosial narapidana, dan memperkuat reintegrasi sosial pasca-pembebasan.

b. Pelembagaan Family Counseling Berbasis Hukum Islam

Penelitian menemukan bahwa praktik mediasi keluarga yang selama ini dilakukan petugas memiliki efektivitas psikologis yang cukup signifikan. Oleh karena itu, praktik tersebut perlu dilembagakan secara formal dalam bentuk layanan konseling keluarga, mediasi perkawinan, terapi psikospiritual, dan pendampingan rekonsiliasi keluarga. Program tersebut dapat dilaksanakan melalui kolaborasi antara penyuluh agama, konselor keluarga Islam, petugas pemasyarakatan, serta tokoh agama lokal.

c. Pembentukan Forum Ishlah Keluarga Narapidana

Sebagai bentuk konkret pelembagaan ishlah, penelitian ini menawarkan pembentukan Forum Ishlah Keluarga Narapidana di lingkungan Rutan Kelas IIB Sungai Penuh. Forum ini berfungsi sebagai ruang mediasi konflik keluarga, sarana komunikasi emosional, wadah rekonsiliasi pasangan, serta instrumen pencegahan perceraian. Melalui forum ini, keluarga tidak hanya diposisikan sebagai pihak luar, tetapi sebagai subjek utama dalam proses rehabilitasi narapidana.

d. Integrasi Kurikulum Fikih Keluarga dalam Pembinaan Kerohanian

Kurikulum pembinaan keagamaan perlu diperluas dengan materi fikih keluarga, hak dan kewajiban suami istri, parenting Islami, tanggung jawab nafkah, dan etika sosial pasca-taubat. Tujuannya adalah membangun kesadaran bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran hukum negara, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah keluarga dalam Islam.

e. Ishlah sebagai Instrumen Kriminologis Pencegahan Residivisme

Dalam perspektif integratif antara Kriminologi dan Hukum Keluarga Islam, ishlah memiliki fungsi strategis sebagai mekanisme pemulihan identitas sosial, penguatan kontrol sosial keluarga, pemulihan dukungan emosional, dan sarana reintegrasi sosial. Ketika keluarga kembali menerima narapidana, maka muncul internal containment berupa rasa tanggung jawab moral untuk tidak mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, pelembagaan mediasi perdamaian berbasis Hukum Keluarga Islam bukan hanya relevan secara normatif-religius, tetapi juga terbukti memiliki fungsi kriminologis yang sangat strategis dalam menekan angka residivisme di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh.

C. Pembahasan

1. Bentuk Mekanisme dan Problematika implementasi program pembinaan keagamaan dan kerohanian bagi narapidana residivis di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh

Implementasi program pembinaan keagamaan dan kerohanian di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan membentuk kembali kesadaran moral dan spiritual warga binaan, termasuk narapidana residivis. Berdasarkan hasil observasi dan telaah dokumen institusional, program pembinaan tersebut dijalankan secara sistematis melalui pola kegiatan yang terjadwal dan terintegrasi dengan tata tertib kehidupan sehari-hari di dalam Rutan. Pembinaan diarahkan pada penguatan dimensi religius sebagai instrumen pengendalian diri, pembentukan kesadaran hukum, dan upaya penanaman nilai-nilai moral keagamaan agar narapidana mampu meninggalkan perilaku kriminal ketika kembali ke masyarakat.

Mekanisme pembinaan dimulai sejak narapidana memasuki lingkungan Rutan melalui proses registrasi administratif dan assessment awal. Pada tahap ini, petugas melakukan pendataan identitas, riwayat tindak pidana, serta kondisi psikososial narapidana. Hasil assessment tersebut kemudian menjadi dasar dalam penempatan blok hunian dan pengawasan pembinaan. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak ditemukan mekanisme klasifikasi khusus terhadap narapidana residivis dalam konteks pembinaan kerohanian. Narapidana residivis diperlakukan sama dengan narapidana pemula dalam seluruh aktivitas pembinaan, baik dari sisi materi, metode, maupun evaluasi keberhasilan program.

Program pembinaan kerohanian di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh lebih dominan menggunakan pendekatan ritualistik. Aktivitas keagamaan dilaksanakan melalui kewajiban mengikuti salat berjamaah lima waktu di masjid Rutan, pengajian rutin, pembelajaran membaca Al-Qur'an, ceramah agama, serta kegiatan keagamaan kolektif lainnya seperti pembacaan Surah Yasin dan peringatan hari besar Islam. Secara formal, seluruh narapidana diwajibkan mengikuti kegiatan tersebut sebagai bagian dari pembinaan kepribadian. Kehadiran dan kepatuhan terhadap tata tertib menjadi indikator utama penilaian keberhasilan pembinaan.

Dalam implementasinya, program pembinaan keagamaan tersebut memiliki pola yang bersifat top-down, yakni seluruh materi dan bentuk kegiatan telah ditentukan oleh pihak institusi tanpa mempertimbangkan kebutuhan individual narapidana. Materi pembinaan cenderung berorientasi pada penguatan ibadah mahdhah seperti salat, membaca Al-Qur'an, dan tausiyah moral. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa akar permasalahan kriminalitas semata-mata disebabkan oleh lemahnya spiritualitas individu, sehingga solusi yang ditawarkan lebih berfokus pada peningkatan aktivitas ibadah formal.

Hasil observasi menunjukkan bahwa narapidana residivis pada umumnya mampu mengikuti seluruh kegiatan pembinaan secara tertib. Mereka hadir dalam kegiatan salat berjamaah, mengikuti pengajian, serta mematuhi instruksi petugas pembinaan. Namun, kepatuhan tersebut lebih

banyak bersifat administratif dibandingkan substantif. Banyak residivis memandang pembinaan sebagai kewajiban formal yang harus dijalankan demi memperoleh penilaian baik, remisi, atau kemudahan administratif lainnya. Dengan kata lain, partisipasi dalam kegiatan keagamaan belum sepenuhnya mencerminkan transformasi kesadaran moral yang mendalam.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya problematika mendasar dalam implementasi pembinaan kerohanian, yakni terjadinya formalisasi religiusitas. Ibadah dijalankan dalam kerangka disiplin institusional, tetapi belum menyentuh aspek psikologis dan emosional narapidana residivis. Dalam banyak kasus, residivis telah mengalami siklus pembinaan serupa pada masa hukuman sebelumnya. Pengulangan materi dasar yang sama menyebabkan sebagian dari mereka mengalami kejenuhan dan kehilangan makna spiritual dari kegiatan yang dijalankan. Pembinaan berubah menjadi rutinitas monoton yang bersifat simbolik, bukan proses refleksi dan perubahan perilaku secara mendasar.

Problematika lain yang ditemukan adalah tidak adanya diferensiasi kurikulum pembinaan berdasarkan tingkat risiko dan pengalaman kriminal narapidana. Residivis yang memiliki pengalaman kriminal berulang serta kompleksitas persoalan sosial diperlakukan sama dengan pelaku kejahatan pertama. Padahal, secara psikologis dan sosiologis, residivis memiliki karakteristik berbeda, termasuk tingkat trauma sosial, stigma masyarakat, dan krisis identitas yang lebih berat. Ketidakmampuan sistem pembinaan dalam membaca kebutuhan spesifik residivis menyebabkan program pembinaan berjalan secara generalistik dan kurang efektif.

Selain itu, kondisi overcrowding di Rutan turut memengaruhi kualitas implementasi pembinaan. Jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas menyebabkan rasio antara petugas pembina dan narapidana menjadi tidak ideal. Akibatnya, pembinaan lebih bersifat kolektif dan sulit menyentuh pendekatan personal. Petugas pembina tidak memiliki cukup ruang dan waktu untuk melakukan pendampingan psikologis

maupun spiritual secara mendalam terhadap narapidana residivis. Situasi ini menyebabkan hubungan pembina dan warga binaan lebih bersifat administratif dibandingkan relasional.

Dalam konteks sosial, hasil observasi menunjukkan bahwa narapidana residivis mengalami kecenderungan isolasi sosial di dalam lingkungan Rutan. Mereka lebih banyak membentuk kelompok kecil dengan sesama residivis dan cenderung menjaga jarak dari narapidana lain. Pola interaksi tersebut memperlihatkan adanya krisis kepercayaan terhadap lingkungan sosial yang lebih luas. Kehilangan dukungan keluarga dan stigma masyarakat membuat residivis mencari rasa aman dalam kelompok yang memiliki pengalaman serupa. Kondisi ini berpotensi memperkuat subkultur kriminal di dalam Rutan apabila tidak diimbangi dengan pendekatan pembinaan yang menyentuh aspek emosional dan sosial secara lebih mendalam.

Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, problematika implementasi pembinaan semakin terlihat pada lemahnya fungsi Hifdz Al-Nasl dalam kehidupan narapidana residivis. Berdasarkan data kunjungan keluarga, sebagian besar residivis mengalami penurunan drastis dalam intensitas kunjungan maupun perhatian keluarga. Banyak di antara mereka yang tidak lagi dikunjungi pasangan, orang tua, ataupun anak-anaknya. Putusnya relasi emosional tersebut menciptakan tekanan psikologis yang besar dan berdampak langsung terhadap efektivitas pembinaan kerohanian.

Ketiadaan dukungan keluarga menyebabkan proses taubat dan perubahan perilaku kehilangan fondasi sosialnya. Dalam ajaran Islam, keluarga merupakan lingkungan utama pembentukan akhlak dan penguatan spiritual individu. Akan tetapi, pada kasus residivis, institusi keluarga justru mengalami disfungsi akibat akumulasi rasa kecewa, malu sosial, dan tekanan ekonomi yang terus berulang. Akibatnya, narapidana residivis menjalani pembinaan dalam kondisi keterasingan emosional yang mendalam.

Problematika lain yang cukup signifikan adalah belum adanya pelembagaan program mediasi keluarga atau ishlah dalam sistem pembinaan resmi Rutan. Berdasarkan telaah SOP dan dokumen program kerja, pembinaan kerohanian hanya berfokus pada hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan tanpa menyentuh rekonsiliasi horizontal antara narapidana dengan keluarga maupun masyarakat. Padahal, dalam perspektif keadilan restoratif dan Hukum Keluarga Islam, pemulihan hubungan sosial merupakan elemen penting dalam proses rehabilitasi narapidana.

Ketiadaan mekanisme ishlah menyebabkan Rutan belum mampu berfungsi sebagai mediator aktif dalam menyelesaikan konflik antara residivis dan keluarganya. Institusi pemasyarakatan belum memiliki program khusus untuk mempertemukan pihak keluarga, memberikan konseling keluarga, ataupun membangun komunikasi yang sehat antara narapidana dan lingkungan sosialnya. Akibatnya, residivis tetap menghadapi penolakan sosial meskipun telah menjalani pembinaan agama secara intensif di dalam Rutan.

Dari hasil pengamatan lapangan, dapat dipahami bahwa pembinaan kerohanian yang hanya berorientasi pada ritual ibadah belum cukup untuk mengatasi akar masalah residivisme. Narapidana residivis tidak hanya membutuhkan penguatan spiritual, tetapi juga pemulihan identitas sosial, dukungan emosional, dan rekonstruksi hubungan keluarga. Ketika aspek-aspek tersebut diabaikan, maka pembinaan keagamaan berpotensi kehilangan relevansi praktisnya setelah narapidana kembali ke masyarakat.

Dengan demikian, implementasi program pembinaan keagamaan dan kerohanian di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh menunjukkan dua realitas sekaligus. Di satu sisi, institusi telah berhasil membangun sistem pembinaan religius yang terstruktur dan disiplin. Namun di sisi lain, mekanisme tersebut masih menghadapi berbagai problematika mendasar, mulai dari pendekatan yang terlalu formalistik, tidak adanya diferensiasi pembinaan bagi residivis, lemahnya dukungan keluarga, hingga belum terlembaganya mekanisme ishlah dan rehabilitasi sosial secara

komprehensif. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan narapidana residivis tidak cukup diukur melalui kepatuhan ritual semata, melainkan harus dilihat dari sejauh mana pembinaan mampu memulihkan kesadaran moral, hubungan sosial, dan kesiapan mereka untuk kembali hidup secara bermartabat di tengah masyarakat.

b. Tinjauan Hukum Keluarga Islam dalam memotret terputusnya perlindungan keluarga sebagai factor determinan penyebab terjadinya residivis di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keluarga bukan sekadar institusi biologis yang dibangun atas dasar hubungan nasab dan perkawinan, melainkan merupakan ruang utama pembentukan moral, spiritual, dan kontrol sosial individu. Keluarga diposisikan sebagai madrasah pertama yang bertugas menjaga keberlangsungan agama (Hifdz Ad-Din), menjaga keturunan (Hifdz Al-Nasl), serta menjaga stabilitas psikologis dan sosial anggota keluarga. Oleh sebab itu, ketika institusi keluarga mengalami disfungsi, maka dampaknya tidak hanya bersifat domestik, tetapi dapat berkembang menjadi problem sosial dan kriminalitas yang lebih luas, termasuk fenomena residivisme.

Temuan empiris di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh menunjukkan bahwa pengulangan tindak pidana oleh narapidana residivis tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegagalan individu dalam mengendalikan perilaku menyimpang. Residivisme justru memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan terputusnya perlindungan keluarga sebagai sistem kontrol sosial primer. Dalam konteks ini, Hukum Keluarga Islam memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif karena memandang keluarga sebagai basis utama pemeliharaan akhlak dan rehabilitasi sosial individu.

Secara normatif, konsep keluarga dalam Islam dibangun di atas prinsip mawaddah wa rahmah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Rumah tangga ideal dalam Islam bukan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, melainkan ruang perlindungan emosional dan spiritual bagi seluruh anggota keluarga. Ketika seorang individu mengalami kegagalan

sosial, termasuk terlibat tindak pidana dan menjalani pidana penjara, keluarga seharusnya hadir sebagai ruang penerimaan terakhir yang tetap menjaga martabat kemanusiaannya. Akan tetapi, temuan penelitian menunjukkan bahwa fungsi tersebut justru mengalami keruntuhan pada sebagian besar narapidana residivis di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam, mayoritas residivis mengalami penolakan emosional dari keluarga setelah mereka kembali menjalani pidana untuk kedua kalinya atau lebih. Fenomena zero-visit (nihil kunjungan) yang ditemukan dalam buku register layanan kunjungan menjadi indikator empiris bahwa hubungan kekeluargaan mengalami degradasi yang sangat serius. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, kondisi tersebut menunjukkan lumpuhnya fungsi Hifdz Al-Nasl, yaitu perlindungan terhadap keberlangsungan dan kehormatan keluarga.

Konsep Hifdz Al-Nasl dalam Maqashid Syariah tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap keturunan secara biologis, tetapi juga mencakup pemeliharaan keharmonisan rumah tangga, keberlanjutan pendidikan moral anak, serta perlindungan martabat keluarga dari kehancuran sosial. Ketika seorang residivis ditolak oleh istri, dijauhi anak, atau diputus hubungan emosional oleh keluarganya sendiri, maka yang hancur bukan hanya relasi interpersonal, tetapi juga struktur perlindungan sosial yang selama ini menjadi benteng terakhir bagi individu tersebut untuk bertahan dari tekanan sosial masyarakat.

Temuan wawancara dengan keluarga narapidana menunjukkan bahwa pemenjaraan berulang menimbulkan akumulasi frustrasi yang sangat besar. Keluarga merasa lelah menanggung malu sosial, tekanan ekonomi, dan ketidakpastian masa depan. Dalam banyak kasus, istri residivis harus memikul peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh anak tanpa dukungan suami. Kondisi ini memunculkan konflik domestik yang berujung pada keinginan untuk mengakhiri perkawinan melalui perceraian.

Dalam perspektif Ahwal Al-Syakhshiyyah, fenomena tersebut menunjukkan terganggunya keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Islam mewajibkan suami memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarganya. Namun, ketika seorang narapidana menjalani pidana penjara dalam waktu yang lama dan berulang, kemampuan menjalankan kewajiban tersebut menjadi lumpuh. Akibatnya, rumah tangga kehilangan fungsi ekonominya, sementara tekanan sosial terhadap keluarga terus meningkat.

Kondisi tersebut diperparah oleh adanya stigma sosial masyarakat terhadap keluarga narapidana residivis. Dalam masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi norma adat seperti Sungai Penuh dan Kerinci, status "keluarga mantan narapidana" sering kali menjadi aib kolektif yang menurunkan posisi sosial keluarga di tengah masyarakat. Akibatnya, keluarga residivis turut mengalami secondary victimization atau viktimisasi sekunder. Mereka bukan hanya menjadi korban dari perilaku kriminal anggota keluarganya, tetapi juga korban dari penilaian sosial masyarakat yang menghakimi secara terus-menerus.

Dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam, kondisi tersebut sangat berbahaya karena merusak asas sakinah dalam rumah tangga. Rumah tangga yang seharusnya menjadi ruang ketenteraman justru berubah menjadi ruang konflik, tekanan, dan rasa malu sosial. Ketika fungsi sakinah hilang, maka relasi keluarga menjadi rapuh dan kehilangan kapasitasnya sebagai ruang rehabilitasi moral bagi anggota keluarga yang bermasalah.

Penelitian ini menemukan bahwa banyak narapidana residivis mengalami kehancuran psikologis bukan terutama karena hukuman pidana yang dijalani, melainkan karena kehilangan dukungan keluarga. Surat gugatan cerai, penolakan kunjungan, atau sikap dingin keluarga menjadi pukulan emosional yang jauh lebih berat dibandingkan sanksi penjara itu sendiri. Dalam situasi demikian, program pembinaan keagamaan di dalam Rutan sering kali kehilangan daya transformasinya karena narapidana merasa tidak lagi memiliki tempat untuk kembali setelah bebas nanti.

Dalam perspektif kriminologi Islam, keluarga memiliki fungsi kontrol sosial yang sangat fundamental. Keluarga bertugas menanamkan nilai halal-haram, membentuk rasa tanggung jawab, dan menjadi sistem pengawasan moral yang paling dekat dengan individu. Ketika fungsi tersebut terputus, maka individu kehilangan jangkar sosial yang menghubungkannya dengan kehidupan yang normatif. Akibatnya, mantan narapidana lebih mudah kembali ke lingkungan lama yang bersifat kriminogenik karena kelompok itulah yang masih bersedia menerima mereka tanpa stigma.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa residivis yang kehilangan dukungan keluarga cenderung mengalami hopelessness atau keputusasaan sosial. Mereka merasa bahwa usaha untuk berubah tidak lagi memiliki makna karena keluarga dan masyarakat tetap menempatkan mereka sebagai "penjahat". Dalam kondisi demikian, kejahatan akhirnya dipandang sebagai satu-satunya ruang sosial yang masih memberikan penerimaan dan akses ekonomi.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa residivisme sesungguhnya bukan hanya problem hukum pidana, melainkan problem kegagalan pemulihan keluarga. Sistem pemasyarakatan selama ini terlalu berfokus pada rehabilitasi individu di dalam penjara, tetapi belum menyentuh rekonstruksi hubungan keluarga sebagai faktor utama keberhasilan reintegrasi sosial.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pendekatan pembinaan yang hanya menitikberatkan pada ibadah ritual tanpa memulihkan hubungan kekeluargaan merupakan pendekatan yang parsial. Islam tidak hanya menekankan hubungan vertikal dengan Tuhan (hablum minallah), tetapi juga hubungan horizontal dengan sesama manusia (hablum minannas). Oleh sebab itu, taubat dalam Islam tidak cukup dimaknai sebagai peningkatan aktivitas ibadah, tetapi juga mencakup perbaikan hubungan sosial dan pemenuhan tanggung jawab terhadap keluarga.

Ketiadaan program mediasi keluarga (ishlah) secara formal di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh menunjukkan adanya kekosongan paradigma dalam sistem pembinaan. Padahal, konsep ishlah memiliki posisi yang sangat sentral dalam Hukum Keluarga Islam. Ishlah tidak hanya dipahami sebagai perdamaian formal, tetapi sebagai proses pemulihan hubungan emosional, rekonsiliasi moral, dan penguatan kembali ikatan kekeluargaan yang rusak akibat konflik.

Praktik mediasi informal yang dilakukan oleh beberapa petugas Rutan membuktikan bahwa pendekatan ishlah memiliki dampak psikologis yang sangat besar bagi narapidana residivis. Ketika keluarga bersedia datang, memaafkan, atau sekadar membuka komunikasi kembali, kondisi psikologis narapidana menjadi lebih stabil dan terbuka terhadap proses pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak cukup diukur dari kepatuhan mengikuti salat berjamaah atau pengajian, tetapi juga dari pulihnya hubungan sosial dan emosional antara narapidana dengan keluarganya.

Dengan demikian, Hukum Keluarga Islam memotret residivisme sebagai konsekuensi dari terputusnya perlindungan keluarga yang berfungsi sebagai sistem kontrol sosial primer. Ketika fungsi Hifdz Al-Nasl mengalami keruntuhan akibat stigma, tekanan ekonomi, perceraian, dan pengabaian emosional, maka narapidana kehilangan basis moral dan sosial untuk mempertahankan perubahan perilakunya. Dalam situasi tersebut, residivisme menjadi sangat mungkin terjadi karena individu tidak lagi memiliki ruang penerimaan sosial yang sehat di luar lingkungan kriminal.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa upaya pencegahan residivisme di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh tidak dapat hanya bertumpu pada pembinaan ritual keagamaan yang bersifat individualistik. Sistem pemasyarakatan harus direkonstruksi dengan pendekatan berbasis keluarga melalui pelembagaan program ishlah, konseling keluarga, dan mediasi sosial yang terintegrasi dalam kurikulum pembinaan. Reintegrasi sosial yang berhasil hanya dapat terwujud apabila

keluarga kembali berfungsi sebagai ruang perlindungan, penerimaan, dan pemulihan martabat bagi narapidana residivis setelah mereka kembali ke tengah masyarakat.

3. Kontruksi Pelembagaan mediasi perdamaian (Ishlah) berbasis hokum keluarga islam didalam kurikulum pembinaan kerohanian sebagai instrument strategis untuk mencegah residivisme di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh

Penelitian menunjukkan bahwa problem utama residivisme di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh tidak hanya bersumber dari lemahnya kesadaran hukum individu, tetapi juga berakar pada terputusnya fungsi perlindungan keluarga sebagai sistem kontrol sosial primer. Program pembinaan kerohanian yang selama ini dijalankan oleh institusi pemasyarakatan memang telah berhasil membangun kepatuhan ritual keagamaan secara administratif, namun belum mampu menyentuh dimensi pemulihan hubungan sosial yang menjadi faktor fundamental dalam keberhasilan reintegrasi narapidana residivis. Dalam konteks inilah, konstruksi pelembagaan mediasi perdamaian (ishlah) berbasis Hukum Keluarga Islam menjadi relevan untuk diposisikan sebagai instrumen strategis dalam mencegah residivisme.

Secara konseptual, ishlah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam tidak hanya dimaknai sebagai perdamaian formal antara dua pihak yang bersengketa, melainkan sebagai proses rekonsiliasi menyeluruh yang bertujuan memulihkan hubungan emosional, memperbaiki komunikasi, menghapus dendam sosial, serta mengembalikan fungsi keluarga sebagai ruang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dalam konteks narapidana residivis, ishlah memiliki makna yang lebih luas, yaitu membangun kembali jembatan hubungan antara narapidana dengan keluarga inti yang telah mengalami keretakan akibat pemenjaraan berulang.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa sebagian besar narapidana residivis mengalami degradasi hubungan keluarga yang sangat serius. Fenomena nihil kunjungan, penolakan emosional dari pasangan,

hingga ancaman perceraian menunjukkan bahwa keluarga tidak lagi berfungsi sebagai ruang penerimaan sosial bagi narapidana. Dalam perspektif Maqashid Syariah, kondisi ini merupakan bentuk kegagalan pelaksanaan Hifdz Al-Nasl, yakni perlindungan terhadap keberlangsungan dan kehormatan institusi keluarga. Ketika fungsi Hifdz Al-Nasl lumpuh, maka narapidana kehilangan jangkar sosial yang dapat menopang proses pertobatan dan perubahan perilakunya.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan pembinaan kerohanian yang selama ini diterapkan masih terjebak pada paradigma "taubat ritual". Institusi pemasyarakatan mengukur keberhasilan pembinaan melalui indikator administratif seperti kehadiran salat berjamaah, kepatuhan terhadap tata tertib, dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan formal. Padahal, dalam ajaran Islam, taubat tidak hanya berkaitan dengan hubungan vertikal kepada Allah (hablum minallah), tetapi juga menuntut perbaikan hubungan horizontal dengan sesama manusia (hablum minannas). Dengan demikian, pembinaan kerohanian yang mengabaikan rekonsiliasi keluarga sesungguhnya belum menyentuh esensi transformasi sosial yang diharapkan dari sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan temuan empiris tersebut, penelitian ini memandang bahwa pelembagaan ishlah harus dikonstruksi sebagai bagian integral dari kurikulum pembinaan kerohanian di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh. Pelembagaan ini tidak cukup dilakukan secara informal atau insidental oleh petugas tertentu, tetapi harus dibangun melalui sistem yang terstruktur, normatif, dan berkelanjutan dalam tata kelola pemasyarakatan. Dalam konteks ini, Rutan tidak lagi hanya berfungsi sebagai institusi penghukuman dan pembinaan individual, tetapi juga sebagai mediator sosial yang aktif memfasilitasi pemulihan hubungan keluarga narapidana residivis.

Secara operasional, konstruksi pelembagaan ishlah dapat diwujudkan melalui beberapa tahapan strategis. Pertama, integrasi program mediasi keluarga ke dalam kurikulum resmi pembinaan kerohanian. Selama ini, kurikulum pembinaan hanya berfokus pada materi

ibadah mahdhah seperti salat, membaca Al-Qur'an, dan ceramah agama. Ke depan, materi pembinaan harus diperluas dengan memasukkan tema-tema tentang tanggung jawab keluarga, hak dan kewajiban suami-istri, pendidikan anak, etika meminta maaf, pemulihan hubungan keluarga, serta pentingnya dukungan emosional dalam Islam. Dengan demikian, pembinaan kerohanian tidak berhenti pada pembentukan kesalehan ritual, tetapi berkembang menuju pembentukan kesalehan sosial.

Kedua, pembentukan unit layanan mediasi keluarga berbasis ishlah di lingkungan Rutan. Unit ini dapat melibatkan petugas pemasyarakatan, penyuluh agama, konselor keluarga Islam, serta tokoh masyarakat yang memahami pendekatan keagamaan dan sosial. Fungsi utama unit tersebut adalah memfasilitasi dialog antara narapidana residivis dengan keluarganya secara bertahap dan terarah. Dalam proses ini, Rutan berperan sebagai hakam (mediator) yang menjembatani konflik emosional akibat pengkhianatan kepercayaan, tekanan ekonomi, dan rasa malu sosial yang dialami keluarga.

Ketiga, rekonstruksi sistem evaluasi keberhasilan pembinaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem penilaian yang berlaku saat ini terlalu berorientasi pada kepatuhan administratif. Oleh karena itu, indikator keberhasilan pembinaan perlu diperluas dengan memasukkan aspek pemulihan hubungan sosial. Misalnya, keberhasilan pembinaan tidak hanya diukur dari kehadiran dalam salat berjamaah, tetapi juga dari peningkatan komunikasi keluarga, keterlibatan keluarga dalam proses pembinaan, dan kemampuan narapidana membangun kembali tanggung jawab sosialnya. Dengan perubahan paradigma ini, pembinaan kerohanian akan lebih substantif dan berorientasi pada reintegrasi sosial yang nyata.

Keempat, pelembagaan pendekatan restoratif berbasis keluarga dalam sistem pemasyarakatan. Selama ini, sistem pemasyarakatan masih cenderung menempatkan kejahatan sebagai persoalan individual antara pelaku dan negara. Padahal, residivisme menunjukkan bahwa dampak kejahatan juga menghancurkan relasi keluarga dan struktur sosial. Oleh sebab itu, konsep restorative justice perlu diterjemahkan ke dalam

pendekatan yang lebih humanis melalui penguatan kembali relasi kekeluargaan. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keluarga merupakan benteng moral utama yang mampu mencegah individu kembali ke lingkungan kriminal.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa ketika keluarga mulai membuka ruang komunikasi kembali, kondisi psikologis narapidana residivis menjadi lebih stabil dan terbuka terhadap proses pembinaan. Hal ini membuktikan bahwa dukungan emosional keluarga memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat dibandingkan sekadar tekanan disiplin institusional. Narapidana yang merasa masih diterima oleh keluarganya cenderung memiliki harapan hidup, motivasi berubah, dan orientasi masa depan yang lebih positif. Sebaliknya, narapidana yang mengalami pengabaian keluarga menunjukkan kecenderungan apatis, frustrasi sosial, dan keterikatan yang lebih kuat dengan kelompok subkultur kriminal.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, keluarga memiliki fungsi sebagai agen kontrol sosial informal yang paling efektif. Kontrol sosial yang dibangun melalui kasih sayang, nasihat moral, dan tanggung jawab emosional jauh lebih kuat dibandingkan kontrol represif berbasis hukuman semata. Oleh karena itu, pelembagaan ishlah bukan hanya strategi moral-keagamaan, tetapi juga strategi kriminologis untuk memutus rantai residivisme.

Selain itu, konstruksi pelembagaan ishlah juga memiliki relevansi dengan konteks sosial masyarakat Sungai Penuh dan Kerinci yang religius dan menjunjung tinggi nilai adat. Dalam masyarakat seperti ini, stigma sosial terhadap mantan narapidana sering kali menjadi penghambat utama reintegrasi sosial. Oleh sebab itu, mediasi keluarga dapat menjadi pintu awal untuk memulihkan legitimasi sosial narapidana sebelum mereka kembali ke masyarakat. Ketika keluarga kembali menerima narapidana, maka peluang masyarakat untuk ikut menerima juga menjadi lebih besar karena keluarga merupakan representasi sosial utama dalam struktur masyarakat adat dan religius.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan residivisme tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan penghukuman dan pembinaan ritualistik semata. Residivisme harus dipahami sebagai problem multidimensional yang berkaitan erat dengan keruntuhan relasi keluarga, stigma sosial, dan kegagalan reintegrasi sosial. Dalam konteks tersebut, pelembagaan mediasi perdamaian (ishlah) berbasis Hukum Keluarga Islam menjadi instrumen strategis yang mampu menjembatani kebutuhan spiritual, emosional, dan sosial narapidana residivis.

Melalui konstruksi pelembagaan ishlah, sistem pemasyarakatan dapat bergerak dari paradigma "rehabilitasi administratif" menuju paradigma "rehabilitasi restoratif-humanistik". Pembinaan tidak lagi sekadar menghasilkan narapidana yang patuh secara formal di dalam Rutan, tetapi juga menghasilkan individu yang kembali memiliki ikatan keluarga, diterima secara sosial, dan memiliki peluang nyata untuk menjalani kehidupan yang bermartabat setelah bebas. Dalam kerangka inilah, pelembagaan ishlah berbasis Hukum Keluarga Islam menjadi model pembinaan yang relevan, kontekstual, dan strategis dalam membangun sistem pemasyarakatan yang lebih berkeadilan dan efektif dalam mencegah residivisme di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis integratif antara Hukum Keluarga Islam dan Kriminologi terhadap program pembinaan di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh, tesis ini menyimpulkan:

1. **Mekanisme dan Problematika Implementasi Program Pembinaan Keagamaan dan Kerohanian**

   Program pembinaan keagamaan di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh telah berjalan melalui kegiatan ibadah seperti salat berjamaah, pengajian, dan pembelajaran Al-Qur'an. Namun, pembinaan masih bersifat ritualistik dan administratif karena lebih menekankan kepatuhan formal dibandingkan pemulihan psikologis dan sosial narapidana residivis. Tidak adanya kurikulum khusus bagi residivis, kondisi overcrowding, serta lemahnya pendekatan personal menyebabkan pembinaan belum mampu membentuk perubahan perilaku dan kesiapan reintegrasi sosial secara optimal.

2. **Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Faktor Penyebab Residivisme**

   Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, residivisme dipengaruhi oleh terputusnya fungsi keluarga sebagai sistem kontrol sosial dan perlindungan moral. Pemenjaraan berulang menyebabkan hilangnya nafkah, kasih sayang, dan dukungan emosional sehingga banyak residivis mengalami penolakan keluarga, perceraian, dan stigma masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan terganggunya prinsip *Hifdz Al-Nasl* dan mendorong mantan narapidana kembali ke lingkungan kriminal akibat kehilangan ruang penerimaan sosial.

3. **Konstruksi Pelembagaan Ishlah sebagai Instrumen Pencegahan Residivisme**

   Pencegahan residivisme perlu dilakukan melalui pelembagaan mediasi perdamaian (*ishlah*) berbasis Hukum Keluarga Islam dalam program pembinaan kerohanian. Program ini dapat diwujudkan melalui

konseling keluarga, mediasi konflik rumah tangga, dan pendampingan rekonsiliasi keluarga secara terstruktur. Dengan pendekatan tersebut, pembinaan tidak hanya membentuk kepatuhan ibadah, tetapi juga memulihkan hubungan keluarga dan memperkuat reintegrasi sosial narapidana setelah bebas.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini membawa implikasi yang signifikan, baik secara teoretis maupun praktis:

1. Implikasi Teoretis: Penelitian ini memperkaya diskursus Hukum Keluarga Islam dengan membuktikan bahwa *Ahwal Al-Syakhshiyyah* tidak hanya relevan dalam ranah perdata, tetapi merupakan instrumen pencegahan kejahatan yang esensial. Secara kriminologis, tesis ini memperkuat *Social Control Theory* dengan menegaskan bahwa keluarga adalah unit kontrol sosial paling efektif yang melampaui efektivitas jeruji besi.
2. Implikasi Praktis (Manajerial): Implikasi ini menuntut perubahan paradigma pada Rutan Kelas IIB Sungai Penuh untuk tidak hanya bertindak sebagai penjaga fisik, tetapi sebagai mediator sosial. Diperlukan rekonstruksi kurikulum pembinaan dari yang berbasis "hafalan/ritual" menjadi berbasis "pemulihan relasi dan tanggung jawab keluarga".
3. Implikasi Yuridis: Adanya urgensi untuk meninjau kembali kriteria "Kelakuan Baik" dalam UU Pemasyarakatan. Implikasinya adalah perlunya penyelarasan antara instrumen Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) dengan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang berfokus pada kesiapan keluarga menerima kembali narapidana.

C. Saran

1. Bagi Rutan Kelas IIB Sungai Penuh: Disarankan untuk segera menyusun SOP *Family Counseling* yang terstruktur. Rutan harus memfasilitasi pertemuan mediasi antara narapidana dan keluarga inti secara berkala sebagai bagian dari kurikulum pembinaan wajib untuk menumbuhkan kesadaran tanggung jawab pasca-bebas.
2. Bagi Balai Pemasyarakatan (Bapas): Pembimbing Kemasyarakatan (PK) disarankan untuk lebih proaktif menjalankan fungsi *Hakam*. Litmas untuk

pengusulan integrasi (PB/CB/Asimilasi) tidak boleh hanya formalitas administratif, tetapi harus memuat bukti otentik adanya *ishlah* (perdamaian) antara narapidana dengan pihak keluarga dan korban.

3. Bagi Masyarakat dan Tokoh Adat Sungai Penuh: Disarankan adanya sinergi melalui Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) untuk melakukan destigmatisasi terhadap keluarga narapidana. Prosesi pemaafan secara adat dapat menjadi instrumen pendukung untuk memperkuat legitimasi sosial eks-narapidana di tengah masyarakat yang agamis.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Mengingat keterbatasan dalam variabel hukum adat, disarankan peneliti berikutnya untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai integrasi sanksi adat Sungai Penuh dengan mekanisme Keadilan Restoratif nasional guna menekan angka residivisme secara lebih holistik

DAFTAR PUSTAKA

Al-Fasi, A. (1993). *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.

Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.

Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.

Al-Qur'an al-Karim.

Arief, B. N. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Arief, B. N. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.

Asy-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Dar Ibn Affan.

Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Thought.

Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh (Jilid 9: Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah)*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: The Free Press.

Chazawi, A. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, dan Teori Pemidanaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Dirdjosisworo, S. (2010). *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Dwidja, P. (2014). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Residivis*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 1(2).

Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.* Jurnal Hukum Lex Generalis, 1(2).

Goffman, E. (1961). *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates.* New York: Anchor Books.

Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.

Lemert, E. M. (1951). *Social Pathology: A Systematic Approach to the Theory of Sociopathic Behavior*. New York: McGraw-Hill.

Lestari, S. (2021). Efektivitas Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Melalui Pendekatan Keagamaan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1).

Mahrus, A. (2017). Implementasi Maqashid Syariah dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Maslahah*, 8(1).

Priyatno, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Siregar, H. (2019). Analisis Sosiologis Terhadap Faktor Penyebab Residivisme. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1).

Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1978). *Criminology*. Philadelphia: Lippincott.

Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Wibowo, P. (2020). Reintegrasi Sosial Narapidana: Antara Harapan dan Realita. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3).

Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

Zulfa, E. A. (2011). *Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana. (Disertasi)*. Jakarta: Universitas Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

TABLE PEDOMAN WAWANCARA

Instrumen: Lembar Catatan Lapangan (*Field Notes*).

A. Objek Observasi: Ekosistem Rutan dan Residivis (Teori: *Labeling Theory* & *Hifdz Al-Nasl*)

No	Aspek yang Diamati	Indikator Pengamatan (Variabel Teori)
1	Stigma dan Pelabelan (Labeling)	Mengamati apakah ada perbedaan perlakuan atau bahasa (label) yang digunakan petugas atau sesama narapidana terhadap narapidana residivis dibandingkan narapidana pemula.
2	Interaksi Sosial Residivis (Social Control Theory)	Mengamati apakah residivis cenderung mengisolasi diri, terlihat putus asa, atau justru hanya bergaul ketat dengan sesama residivis lain di dalam Rutan.
3	Indikator Disfungsi Keluarga (Hifdz Al-Nasl)	Mengamati seberapa sering residivis menerima kunjungan dari keluarga inti (istri/anak/orang tua). Apakah ada residivis yang terlihat tidak pernah dikunjungi sama sekali?
4	Dampak Pemenjaraan pada Ikatan Keluarga	Saat momen kunjungan (jika ada), amati suasana interaksi. Apakah terlihat tegang, acuh tak acuh, atau emosional penuh pemaafan?

B. Objek Observasi: Implementasi Program Pembinaan (Teori: Taubat Ritual vs Taubat Restoratif & *Ishlah*)

No	Aspek yang Diamati	Indikator Pengamatan (Variabel Teori)
5	Muara Materi Pembinaan (Kritik Taubat Ritual)	Mengamati materi yang diberikan (oleh ustadz mitra/petugas). Apakah materi hanya fokus pada tata cara ibadah (mahdhah), atau ada materi tentang akhlak sosial, pemaafan, dan tanggung jawab keluarga?
6	Pelembagaan Ishlah (Mediasi)	Mengamati apakah Rutan memfasilitasi sesi khusus yang mempertemukan residivis dengan keluarganya dalam format konseling keluarga (Family Counseling)?
7	Peran Pembimbing sebagai Hakam (Mediator)	Mengamati interaksi petugas pembimbing kerohanian. Apakah mereka bertindak pasif sebagai penyuluh, atau aktif memediasi konflik, mendamaikan, dan mengedukasi keluarga untuk menerima kembali residivis?
8	Respon Residivis terhadap Ishlah	Mengamati bagaimana ekspresi dan emosi residivis saat dihadapkan pada program yang menuntut mereka meminta maaf dan berjanji pada keluarga (bukan cuma pada Tuhan).

BAGIAN II: PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM (*IN-DEPTH INTERVIEW*)

Tujuan: Menggali persepsi, motif, pengalaman batin, trauma, dan kendala psikososial informan yang tidak terlihat melalui observasi.

A. Informan Kunci: Otoritas Rutan (Kepala/Kasubsi/Pembimbing) (Teori: Implementasi UU Pemasyarakatan, Keadilan Restoratif, & Konsep *Ishlah/Hakam*)

Tujuan: Mengetahui kebijakan makro, SOP, materi pembinaan, kendala struktural, dan perspektif mereka mengenai pelembagaan *ishlah* dengan keluarga.

1. **Regulasi & Kebijakan:** Sejauh mana Rutan Kelas IIB Sungai Penuh telah mengimplementasikan semangat Keadilan Restoratif (UU No. 22 Tahun 2022) dalam kurikulum bimbingan kerohanian, khususnya bagi narapidana residivis?
2. **Kurikulum Pembinaan:** Apakah ada diferensiasi (perbedaan) muatan materi pembinaan antara narapidana residivis dengan narapidana pemula? Mengapa demikian?
3. **Kritik *Taubat Ritual*:** Selama ini, bagaimana Rutan mengukur keberhasilan pembinaan kerohanian? Apakah hanya dari kedisiplinan ibadah *mahdhah* (salat/mengaji), atau ada indikator perbaikan hubungan sosial mereka di luar?
4. **Pelembagaan *Ishlah*:** Apakah Rutan memiliki program khusus untuk memfasilitasi *Family Counseling* atau mediasi *ishlah* antara residivis dengan keluarganya? Bagaimana mekanisme teknisnya?
5. **Peran Pembimbing sebagai *Hakam*:** Dalam konsep *ishlah*, Pembimbing Kerohanian didorong bertindak sebagai *Hakam* (mediator). Sejauh mana para petugas pembimbing siap dan telah menjalankan peran mediasi ini? Apakah ada pelatihan mediasi berbasis hukum keluarga Islam bagi petugas?
6. **Kendala Implementasi:** Apa kendala struktural terbesar dalam menyelenggarakan pembinaan berbasis rekonsiliasi keluarga ini di wilayah Sungai Penuh yang religius dan beradat?

B. Informan Utama: Narapidana Residivis (Teori: *Labeling*, *Social Control Theory*, Trauma, & Respons terhadap *Ishlah*)

Tujuan: Menggali trauma paska-pemenjaraan, stigmatisasi, penolakan keluarga, serta respons mereka terhadap program pembinaan kerohanian restoranatif.

1. **Trauma Pemenjaraan:** Bagaimana perasaan Anda setelah mengetahui bahwa Anda kembali lagi ke Rutan ini? Trauma apa yang paling Anda rasakan sebagai residivis?

2. **St stigmatisasi (*Labeling*):** Bagaimana sikap masyarakat Sungai Penuh atau keluarga besar terhadap Anda setelah menyandang label "mantan narapidana" dari penahanan sebelumnya?
3. **Putusnya Ikatan Keluarga (*Attachment*):** Setelah dipenjara kembali, bagaimana kondisi hubungan Anda dengan istri, anak, atau orang tua? Sejauh mana dukungan mereka terhadap Anda saat ini? (Variabel Hirschi).
4. **Kritik *Taubat Ritual*:** Selama masa penahanan sebelumnya, Anda telah mengikuti program kerohanian (salat/mengaji). Mengapa setelah bebas Anda justru terdorong mengulangi kejahatan kembali? Apa yang kurang dari pembinaan sebelumnya?
5. **Respons terhadap *Ishlah*** Jika Rutan memfasilitasi program untuk mempertemukan Anda dengan keluarga guna meminta maaf dan berdamai (medasi *ishlah*), apakah Anda bersedia mengikutinya? Mengapa? (Aspek Taubat Restoratif).
6. **Komitmen Jangka Panjang (*Stake in Conformity*):** Apa yang paling Anda butuhkan saat bebas nanti agar Anda tidak lagi melakukan kejahatan? Apakah dukungan ekonomi, atau penerimaan utuh dari keluarga?

C. Informan Keluarga: (Istri/Orang Tua/Anak) (Teori: *Secondary Victimization*, Trauma, Pemaafan, & Pemulihan *Hifdz Al-Nasl*)

Tujuan: Mengetahui tingkat stigmatisasi yang mereka rasakan, trauma paska-pemenjaraan, proses pemaafan, dan kesiapan menerima kembali residivis.

1. **Dampak Sosiologis (*Secondary Victimization*):** Bagaimana stigma atau pandangan tetangga di Sungai Penuh terhadap keluarga Anda setelah salah satu anggota keluarga (narapidana residivis) kembali dipenjara?
2. **Trauma Paska-Pemenjaraan:** Bagaimana dampak psikologis dan ekonomi yang dirasakan keluarga (seperti hilangnya nafkah/hak asuh/reputasi) akibat pemenjaraan ini? (Variabel *Hifdz Al-Nasl*).
3. **Disfungsi Keluarga:** Jujur saja, apakah di dalam hati keluarga ada niat untuk mengabaikan, menolak, atau bahkan menceraikan narapidana residivis tersebut karena rasa malu atau keputusasaan?
4. **Proses Pemaafan & *Ishlah*** Sejauh mana keluarga siap memaafkan kesalahan narapidana residivis tersebut dan menerimanya kembali ke rumah tanpa prasangka saat ia bebas nanti? (Variabel QS. An-Nisa: 128).

5. **Pelembagaan *Ishlah*** Apakah keluarga pernah dilibatkan oleh Rutan Sungai Penuh dalam program konseling keluarga atau sesi mediasi perdamaian dengan narapidana residivis?
6. **Edukasi oleh *Hakam*:** Bagaimana tanggapan keluarga jika Pembimbing Kerohanian Rutan mendatangi rumah Anda untuk memberikan edukasi mengenai kewajiban *Hifdz Al-Nasl* (menjaga keluarga) dengan cara merangkul kembali anggota keluarga yang sedang tersesat?

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian






WBP
RUTAN
SUNGAI PENUH
WARGA BINAAN
RUTAN SUNGAI PENUH

KERINCI

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARAJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
Nomor : In.31/DPs/PP.009/09/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
TAHUN AKADEMIK : 2025/2026 Ganjil
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA

Menimbang :
a. Bahwa untuk menjamin ketancaran penyelesaian studi mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Kerinci dirasa perlu menunjuk Dosen Pembimbing penyusun Tesis,
b. Bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syara untuk diangkat sebagai Pembimbing penulisan Tesis tersebut.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3177 Tahun 2014 tentang izin Penyelenggara Program Magister pada IAIN Kerinci dengan Program Studi Pendidikan Agama Islam.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 656 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) pada Institut Agama Islam Negeri Kerinci
7. Buku panduan Akademik Program Pascasarjana IAIN Kerinci Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk :
1. **Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag** **NIP. 196008041993031003**
   Sebagai **Pembimbing I**
2. Dr. Widiya Yul, M.Pd.I **NIP. 199001022019032010**
   sebagai **Pembimbing II**

Dari Mahasiswa
Nama : **Ricko Darusian**
NIM : 220024028
Program Studi : S2 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul : **Konsep Taubat Rekonsiliasi Keluarga dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Narapidana Residivis di Rutan Kelas II B Sungai Penuh**

Kedua : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorium sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : Sungai Penuh
PADA TANGGAL : 12 November 2025
DIREKTUR,

Prof. Dr. Hj. Wasmiati, M.Pd.I
NIP. 196707101994012001

Tembusan:
1. Rektor IAIN Kerinci
2. Arsip

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAMBI
Jl. Jendral Basuki Rahmat, Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36128.
Laman: kanwilpasjambi@gmail.com Pos-el: kanwilpasjambi@gmail.com

Nomor : WP.5-UM.01.01-236 10 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Izin Penelitian a.n Ricko Darusian

Yth. Direktur Institut Agama Islam Negeri Kerinci
di Tempat

Menindaklanjuti surat Direktur Direktur Institut Agama Islam Negeri Kerinci Nomor B-117/In.31/DPs/PP.00.9/02/2026 hal Permohonan izin Penelitian a/n Ricko Darusian. Bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami memberikan Izin kepada Mahasiswa S2 yang akan melakukan Penelitian pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sungai Penuh, pada tanggal 1 Maret 2026 s.d 31 Mei 2026. Dengan data sebagai berikut :

Nama	: Ricko Darusian
NIM	: 220024028
Tempat Penelitian	: Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sungai Penuh

Perlu kami sampaikan bahwa selama Mahasiswa melakukan Penelitian harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sungai Penuh dan laporan hasil penelitian disampaikan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENIMIPAS

Irwan Rahmat Gumilar

Tembusan:

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sungai Penuh.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAMBI
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SUNGAI PENUH
Jalan Jendral Sudirman No.16 Kota Sungai Penuh
Laman : www.rutansungaipenuh.kemenkumham.go.id Pos-el : rutanspn@gmail.com

SURAT KETERANGAN
WP.5.PAS.6-UM.01.01-455

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Rutan Kelas IIB Sungai Penuh, menerangkan bahwa :

Nama	: RICKO DARUSIAN
NIM	: 2200247028
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: "Implementasi Konsep dalam Upaya Rekonsiliasi Keluarga Narapidana Residivis Perspektif Hukum Keluarga Islam di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh".

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Rutan Kelas IIB Sungai Penuh pada tanggal 01 Februari s.d. 31 Maret 2026.

Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 13 April 2026
Kepala,

SAHAT PARSAULIAN
NIP. 198907032009121001